



Katalog BPS: 9502002

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

2003-2008



Badan Pusat Statistik - Indonesia

NERACA ARUS DANA INDONESIA

2003 - 2008

<https://www.bps.go.id>

TIM PENYUSUN NAD TAHUNAN INDONESIA

BPS, BANK INDONESIA, DEPARTEMEN KEUANGAN

**NERACA ARUS DANA INDONESIA
2003 - 2008**

Katalog BPS/ BPS Catalogue : 9502002
Nomor Publikasi/ Publication Number : 07230.0902
I S S N : 0854-6967
Ukuran Buku/ Book Size : 21,5 cm x 28,5 cm
Jumlah Halaman/ Total Pages : 144 Halaman/ Pages

Naskah/Manuscript:

Subdit Neraca Modal dan Luar Negeri
Sub Directorate of Foreign and Capital Accounts

Gambar Kulit/Cover Design:

Subdit Neraca Modal dan Luar Negeri/
Sub Directorate of Foreign and Capital Accounts

Diterbitkan Oleh/Published by:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia
BPS - Statistics Indonesia

Dicetak Oleh/Printed by:

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya/
*May be cited with reference to the source***

KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2003-2008 merupakan publikasi kesembilanbelas yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Publikasi ini merupakan perwujudan dari hasil kerjasama Tim Penyusunan NAD Indonesia yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan.

NAD Indonesia 2003-2008 ini masih mengikuti format publikasi NAD tahun sebelumnya baik dari segi pembagian sektor/institusi maupun kategori transaksi finansialnya. Beberapa angka yang disajikan dalam publikasi ini mengalami perbaikan sesuai dengan revisi data pendapatan nasional. Di samping itu, sejalan dengan makin baiknya data lembaga keuangan non-bank, maka dalam publikasi ini ditambahkan pula analisis mengenai sektor tersebut. Disadari bahwa publikasi ini masih mengandung kelemahan terutama dari segi kecepatan pengadaan datanya. Oleh karena itu upaya mempercepat pengadaan data dan meningkatkan mutu publikasi ini terus dilakukan. Dalam konteks ini masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat dihargai.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan NAD Indonesia ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi dan lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Diharapkan kerjasama yang baik ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2009

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

RUSMAN HERIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
BAB II KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA	5
2.1 Penjelasan Umum	5
2.2 Kerangka Teori NAD	6
2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional.....	10
2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan	13
2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana	15
2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD	17
BAB III KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA	21
3.1 Kerangka NAD Indonesia	21
3.2 Sumber Data	29
3.3 Metode Penyusunan	32
BAB IV ANALISIS DESKRIPTIF NERACA ARUS DANA INDONESIA	37
4.1 Neraca Pembiayaan Sektoral	37
4.2 Tinjauan Ekonomi Indonesia Berdasar NAD 2008	47
4.3 Tinjauan NAD Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2008.....	50
4.4 <i>Velocity of Money</i>	55
BAB V KESIMPULAN	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	
TABEL-TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan investasi sangat dirasakan oleh semua sektor produksi guna memperbesar penciptaan nilai tambah dan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan investasi tersebut, berbagai dana diperlukan guna membiayainya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti pinjaman dan hibah.

Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan peran lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana (selanjutnya disebut sebagai sektor surplus) dengan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit)¹. Peranan lembaga keuangan ini pada masa lalu kurang begitu menonjol. Sedangkan di lain pihak penyedia dana hanya melakukan investasi finansialnya pada instrumen-instrumen yang masih terbatas seperti tabungan dan deposito. Akibatnya belum semua dana digunakan secara optimal untuk pembiayaan investasi. Sementara itu sektor produksi (investor) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dananya.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah sejak permulaan dasawarsa 1980 mulai melakukan reformasi ekonomi khususnya di bidang perbankan, misalnya penentuan tingkat suku bunga. Dengan demikian, pemilik dana dapat melakukan investasi finansial dengan pilihan yang lebih luas dan menarik. Di samping itu, dengan meningkatnya kegiatan pasar modal yang ditunjukkan oleh makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang "*go-public*", menyebabkan para pemilik dana mempunyai alternatif tambahan dalam berinvestasi finansial yang bersifat langsung yaitu dengan cara membeli saham dan sertifikat di pasar modal. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, arus finansial dari sektor surplus ke sektor defisit melalui instrumen-instrumen yang ada menjadi tidak sederhana lagi. Perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam sektor finansial ini perlu dicatat dan dipantau secara berkala dalam satu sistem data yang lengkap, komprehensif dan konsisten sehingga berguna sebagai masukan dalam

¹ Dalam kaitan neraca arus dana, sektor surplus merupakan sektor yang memiliki tabungan lebih besar dari kebutuhan investasi realnya, sebaliknya disebut sektor defisit. Selanjutnya investasi real merupakan besarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh masing-masing sektor.

menentukan arah kebijakan ekonomi dan moneter secara lebih tepat. Sistem data tersebut selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

Selama ini sistem data mengenai statistik produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian nasional (sektor riil) telah disajikan secara berkala baik dalam Statistik Pendapatan Nasional, Tabel Input-Output Indonesia, maupun dalam bentuk neraca-neraca lainnya.² Sebagian besar neraca-neraca ini hanya menggambarkan besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi dan pembentukan modal yang terjadi di masing-masing sektor. Gambaran mengenai bagaimana sektor-sektor ini memperoleh dan memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiayai investasi riil maupun untuk investasi finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian pula sektor-sektor yang terpaksa melakukan pinjaman untuk membiayai investasi riil karena tabungannya tidak memadai, serta jenis-jenis instrumen finansial apa yang digunakan untuk melakukan pinjaman tersebut belum tergambarkan dalam neraca-neraca di atas. Neraca Arus Dana mencoba mencatat seluruh transaksi ini dari sisi finansialnya, sehingga arus finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit dapat tergambarkan. Arus finansial tersebut akan merefleksikan perubahan harta dan kewajiban finansial melalui perubahan instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, perubahan uang kas, hutang, piutang dan sebagainya.

Sebenarnya untuk mengantisipasi perkembangan di atas, Badan Pusat Statistik sejak tahun 1987 telah membuat suatu studi mengenai *Neraca Arus Dana Indonesia* untuk tahun 1980. Walaupun data yang digunakan masih sangat terbatas, namun usaha ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan NAD yang sebenarnya.

Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya telah berhasil disusun NAD Indonesia 1984-1988, yang merupakan hasil kerja Tim Teknis yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Untuk menghasilkan publikasi tersebut, Tim Teknis telah bekerja selama lebih kurang dua tahun dengan dukungan biaya dan konsultan dari Bank Dunia/IBRD.

Berdasarkan pengalaman penyusunan tersebut, kini Tim Teknis telah dapat menyusun secara berkala NAD Indonesia. Publikasi NAD kesembilanbelas ini mencakup

periode 2003-2008, yang merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Pada masa mendatang usaha untuk memperbaiki sistem NAD baik dari segi mutu maupun analisisnya terus dikembangkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2003-2008 merupakan publikasi ketujuhbelas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, sebagai realisasi dari hasil kerja Tim Penyusun NAD Indonesia. Penerbitan publikasi ini mempunyai tujuan antara lain:

- a. Memperkenalkan wawasan penggunaan sistem data makro, yang berkaitan dengan arus penyediaan dan penggunaan dana antar sektor.
- b. Melengkapi sistem data neraca nasional yang selama ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik.
- c. Menyebarluaskan data dan informasi yang terdapat di dalam neraca arus dana sebagai bahan referensi bagi para pengguna data khususnya di bidang ekonomi moneter.
- d. Menyajikan analisis deskriptif yang berkaitan dengan neraca pembiayaan sektoral, keterkaitan finansial antar sektor, dan penyebab "*financial deepening*" berdasarkan data NAD 2003-2008.
- e. Dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan NAD Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan NAD tahunan ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

- Bab I: Pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II: Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguraikan mengenai definisi dan kerangka teori NAD. Selain itu dijelaskan pula hubungan NAD dengan sistem neraca nasional. Untuk mendapat gambaran yang jelas perlu diketahui

² Keseluruhan neraca tersebut dibuat berdasarkan Sistem Neraca Nasional (SNA), yang disarankan oleh PBB, United Nations, A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No. 2, New York 1968.

bagaimana cara membuat NAD dari perusahaan. Kegunaan dan keterbatasan NAD akan dijelaskan di akhir bab ini.

- Bab III: Neraca Arus Dana Indonesia, membahas mengenai kerangka NAD Indonesia, sumber data, dan metode penyusunan.
- Bab IV: Analisis Deskriptif Neraca Arus Dana Indonesia, menguraikan secara deskriptif mengenai neraca pembiayaan modal sektoral, dan keterkaitan finansial antar sektor.
- Bab V: Kesimpulan, memberikan ringkasan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

<https://www.bps.go.id>

BAB II KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

2.1 Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data yang dirancang untuk memperlihatkan transaksi finansial³ antar berbagai sektor ekonomi, misalnya: pemerintah, perusahaan pemerintah, asuransi, bank umum, perusahaan swasta non finansial, dan sebagainya. Setiap sektor dalam NAD memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial, seperti: deposito, obligasi, pinjaman, dan sebagainya. Instrumen finansial ini merupakan komponen harta atau kewajiban finansial dari masing-masing sektor. Karena memasukkan sektor luar negeri sebagai salah satu sektornya, maka disebut juga sebagai sistem yang terbuka untuk setiap transaksi. Dengan kata lain, setiap pembelian instrumen finansial pada suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

NAD merupakan salah satu bagian dari sistem neraca nasional. Sistem ini mencakup semua neraca yang menggambarkan seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam bentuk terpadu (*integrated accounts*). Termasuk dalam sistem ini adalah neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, tabel input-output, dan neraca sosial ekonomi. Seluruh neraca-neraca itu menggambarkan berbagai ragam aspek kegiatan ekonomi. Neraca pendapatan nasional dan tabel input-output menggambarkan kegiatan produksi atau pembelian dan penjualan barang dan jasa sehingga dikenal juga dengan sebutan neraca riil. Sedangkan NAD sebagai neraca modal dalam neraca pembayaran menunjukkan neraca keuangan yang memungkinkan terjadinya kegiatan di sektor riil.

Bab ini menjelaskan secara umum kerangka teori dan cara penyusunan NAD. Selain itu akan diuraikan pula kedudukan NAD dalam sistem neraca nasional. Bagi para pengguna NAD, diberikan pula uraian tentang kegunaan NAD untuk perencanaan dan analisis ekonomi makro. Sedangkan pada akhir bab ini diuraikan beberapa masalah dan keterbatasan NAD.

³ Transaksi finansial adalah transaksi yang dicerminkan oleh instrumen-instrumen finansial dalam neraca akhir tahun.

2.2 Kerangka Teori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi, tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah investasi (I) atau $Y = C + I$. Jika tabungan (S) didefinisikan sebagai $S = Y - C$, maka $S = I$.

Umumnya pendapatan sektor rumah tangga secara makro selalu lebih besar dari pengeluaran, sebaliknya sektor swasta nonfinansial selalu defisit. Dengan demikian, sektor swasta nonfinansial harus meminjam dari sektor rumah tangga. Sektor lainnya, misalnya bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan menyalurkannya ke sektor lain. NAD menyediakan data keuangan secara rinci mengenai pinjam-meminjam tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Kolomnya menggambarkan sektor dan barisnya menggambarkan berbagai jenis instrumen finansial. Setiap sektor mempunyai dua kolom, yaitu kolom pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana) dan kolom kedua menyatakan perubahan kewajiban (sumber dana). Kenaikan jumlah harta maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif, sebaliknya penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut menunjukkan konsep "*net*" dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunyai arus yang berasal dari transaksi bulanan, harian dan mungkin untuk instrumen finansial tertentu dapat terjadi setiap saat. Padahal NAD hanya mencatat perubahan dalam setahun. Konsep net semacam ini, secara sederhana diperoleh dengan cara mengurangkan neraca akhir dan awal tahun, dengan mengabaikan masalah revaluasi.

Tabel 2.1 menggambarkan contoh NAD yang disederhanakan. Dalam contoh ini ada lima sektor yang ditampilkan yaitu sektor keuangan, rumah tangga, pemerintah, bisnis dan luar negeri. Sektor luar negeri memperlihatkan transaksi antara bukan penduduk dan penduduk Indonesia. Selain itu, dalam contoh ini hanya mencantumkan beberapa jenis kategori transaksi.

**TABEL 2.1 NERACA ARUS DANA SEDERHANA
(Triliun Rupiah)**

TRANSAKSI		KEUANGAN		RUMAH TANGGA		PEMRINTAH		BISNIS		LUAR NEGERI		TOTAL	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
0100	Tabungan Bruto		1		19		6		15		3		44
0200	Perolehan Barang Modal	1		9		8		26		0			44
0300	Pinjaman Neto	0		10		-2		-11		3			0
0400	Selisih Statistik			2		-1		0		-1			0
0500	Inv. Finansial Neto	0		8		-1		-11		4			0
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	14		12		5		13		16			60
0700	Jumlah Sumber Finansial		14		4		6		24		12		60
0800	Cadangan Valas		1							1			1
1000	Deposito		6	3		3		1		-1			6
1100	Surat Berharga (Jangka Pendek)	1	3			1		1					3
1200	Pinjaman	13			4		4		6	11	10		24
1300	Modal dan Penyertaan			2		1			4	1			4
1400	Surat Berharga (Jangka Panjang)						-1	11		-1			-1
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		2	2									2
1800	Kredit Dagang								10	1	2		12
9000	Rupa-rupa		2	5			3		4	4			9

Keterangan : P = Penggunaan, dan S = Sumber

Pemahaman data pada Tabel 2.1 dapat dilakukan secara sederhana. Sektor rumah tangga, kelebihan pendapatan atas pengeluarannya, sehingga menghasilkan tabungan bruto sebesar Rp19 triliun, sedangkan tabungan bruto sektor pemerintah hanya sebesar Rp6 triliun. Sektor rumah tangga, melakukan investasi atau pengeluaran untuk pembentukan modal sebesar Rp9 triliun, sisanya dipinjamkan kepada sektor lain yang tercermin pada kewajiban di sektor-sektor lain. Penambahan harta finansial di rumah tangga berupa deposito, modal dan penyertaan, cadangan asuransi dan pensiun, serta rupa-rupa masing-masing sebesar 3, 2, 2, dan 5 triliun rupiah. Keseluruhan tambahan harta di sektor rumah tangga atau jumlah penggunaan finansial mencapai jumlah Rp12 triliun. Pada saat yang bersamaan rumah tangga menambah kewajiban finansialnya berupa pinjaman sebesar Rp4 triliun. Berdasarkan persamaan akuntansi, pinjaman neto harus sama dengan investasi finansial neto, karena pinjaman merupakan tagihan pada sektor lain. Adanya selisih statistik disebabkan karena kedua kategori tersebut diestimasi

dari sumber data yang berbeda. Pinjaman neto diperoleh dari neraca riil, sedangkan investasi finansial neto dari neraca finansial. Pada tabel 2.1 untuk sektor rumah tangga tampak bahwa pinjaman neto sebesar Rp10 triliun dan investasi finansial neto Rp8 triliun, atau terdapat selisih statistik sebesar Rp2 triliun. Perilaku sektor bisnis berbeda dengan rumah tangga. Sektor ini memperoleh dana dari hasil operasinya berupa laba ditahan dan penyusutan, yang menghasilkan tabungan bruto sebesar Rp15 triliun. Pembentukan modal sektor bisnis sebesar Rp26 triliun melebihi dana yang diperoleh dari tabungannya. Akibatnya sektor ini harus menutupi kekurangan sumber dana finansialnya sebesar Rp11 triliun. Kenyataan ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah kewajiban finansial sebesar Rp24 triliun. Sebagian dari dana tersebut (Rp13 triliun) digunakan untuk membeli harta finansial dan sisanya sebesar Rp11 triliun merupakan pinjaman neto. Pada tabel 2.1 tampak bahwa untuk sektor bisnis, pinjaman neto sama dengan investasi finansial neto, sehingga selisih statistiknya sama dengan nol.

Sektor keuangan biasanya tidak banyak menghasilkan dana sendiri dalam melakukan kegiatan usahanya, tetapi peranan sektor ini sangat besar bagi kegiatan pasar finansial, khususnya bertindak sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari sektor surplus ke sektor defisit. Pada tabel 2.1 terlihat bahwa sektor ini hanya menghasilkan dana dari kegiatannya berupa tabungan bruto sebanyak Rp1 triliun, sama dengan penggunaan untuk pembentukan modal, sehingga pinjaman netonya sama dengan nol. Namun jumlah pertambahan harta finansial sektor keuangan cukup besar, yaitu sebesar Rp14 triliun yang berasal dari surat berharga jangka pendek Rp1 triliun dan pinjaman sebesar Rp13 triliun. Sumber dana atau pertambahan jumlah kewajibannya juga sebesar Rp14 triliun yang merupakan pertambahan kewajiban deposito sebesar Rp6 triliun dan sisanya Rp8 triliun merupakan gabungan dari jenis kewajiban lainnya. Perbedaan antara pertambahan harta dan kewajiban sama dengan nol, begitu pula pinjaman neto dan selisih statistiknya.

Pemerintah menjalankan kegiatannya dengan surplus berjalan sebesar Rp6 triliun, tetapi melakukan investasi harta nonfinansial (pembentukan modal) sejumlah Rp8 triliun, sehingga pemerintah membutuhkan pinjaman sebanyak Rp2 triliun. Dari sisi kewajiban (sumber), sektor ini menambah pinjamannya sebesar Rp4 triliun dan Rp3 triliun berupa kewajiban lainnya. Di samping itu, terjadi pula penerimaan kembali obligasi pemerintah yang menyebabkan penurunan kewajiban sebesar Rp1 triliun. Dengan demikian jumlah

seluruh penambahan kewajiban sektor pemerintah menjadi Rp6 triliun. Kalau dilihat dari sisi harta (penggunaan), jumlah penggunaan finansialnya sebesar Rp5 triliun yang terdiri penambahan deposito, surat berharga jangka pendek, dan penyertaan modal. Perbedaan antara jumlah penggunaan dan sumber finansial adalah $5-6 = \text{minus } 1$ triliun rupiah. Pada hal pinjaman netonya minus Rp 2 triliun, sehingga menimbulkan selisih statistik minus Rp1 triliun.

Sektor luar negeri sebenarnya memperlihatkan beberapa bagian dari neraca pembayaran Indonesia yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk NAD. Defisit neraca berjalan Indonesia dengan luar negeri sebesar Rp3 triliun (lihat Tabel 2.1). Angka ini menunjukkan surplus sebesar Rp3 triliun dari sudut pandang luar negeri dan besaran ini dimasukkan pula ke dalam kategori tabungan bruto, karena dalam NAD, sektor ini tidak mempunyai investasi riil. Dalam NAD, sektor luar negeri mempunyai klaim finansial atas modal fisik, tidak dalam pembentukan modal secara langsung, sehingga nilainya sama dengan nol. Pada sisi penggunaan, sektor ini menaikkan jumlah harta finansialnya sebesar Rp16 triliun, dengan komponen terbesar berbentuk pinjaman sejumlah Rp11 triliun. Sebaliknya jumlah sumber finansialnya atau penambahan kewajiban terhadap Indonesia sejumlah Rp12 triliun. Dengan demikian investasi finansial netonya $16-12 = 4$ triliun rupiah tidak sama dengan pinjaman netonya (Rp3 triliun), sehingga terjadi selisih statistik sejumlah Rp1 triliun.

Dua kolom terakhir memperlihatkan jumlah masing-masing kategori transaksi. Jika dibaca menurut baris menunjukkan jumlah transaksi masing-masing jenis instrumen finansial dalam periode bersangkutan. Satu instrumen finansial dicatat dua kali, satu sebagai harta dan satu lagi sebagai kewajiban. Dengan kata lain, setiap harta finansial suatu sektor merupakan kewajiban finansial sektor lainnya. Sebagai contoh jumlah seluruh harta berupa pinjaman yang diberikan sama dengan jumlah seluruh pinjaman yang diterima (kewajiban) oleh seluruh sektor, yaitu sebesar Rp24 triliun (ditunjukkan dalam Tabel 2.1 pada dua kolom terakhir untuk baris pinjaman). Hal yang sama dapat pula dilihat untuk kategori transaksi lainnya. Dua kolom terakhir ini juga menunjukkan bahwa jumlah tabungan bruto sama dengan jumlah perolehan harta non finansial atau investasi riil sebesar Rp44 triliun.

Dari uraian di atas tampak adanya keterkaitan antar sektor yang disajikan dalam matriks NAD. Misalnya deposito, yang merupakan kewajiban sektor keuangan meningkat sebesar Rp6 triliun. Peningkatan kewajiban sektor ini harus diimbangi dengan

peningkatan pemilikan harta pada instrumen yang sama oleh sektor-sektor lainnya. Pada tabel 2.1, jika dibaca sepanjang baris deposito, tampak bahwa rumah tangga dan pemerintah menambah hartanya masing-masing sebesar Rp3 triliun, sektor bisnis menambah Rp1 triliun, sedangkan luar negeri menurunkan hartanya sebanyak Rp1 triliun.

Berdasarkan kerangka NAD dalam beberapa kasus memungkinkan untuk melihat keterkaitan sektor pada dua sisi transaksinya. Misalnya (tidak tampak dalam Tabel 2.1), cadangan asuransi jiwa hanya boleh menjadi kewajiban (sisi sumber) sektor asuransi dan sebaliknya merupakan harta (sisi penggunaan) bagi rumah tangga. Ternyata hubungan semacam ini tidak seluruhnya dapat ditangkap dalam penyajian NAD.⁴

Jika tabel 2.1 diperhatikan kembali, kenaikan harta berupa modal pada rumah tangga sebesar Rp2 triliun mungkin berasal dari modal saham tahun yang lalu dan modal yang disimpan oleh sektor keuangan atau benar-benar dari saham perusahaan yang baru dikeluarkan atau mungkin juga kombinasi dari keduanya.

2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional

Pada sistem neraca nasional (*integrated system of national accounts*) setidaknya menyajikan 4 (empat) neraca pokok yaitu: neraca produksi, neraca pendapatan dan pengeluaran, neraca modal dan neraca luar negeri. Neraca produksi memperlihatkan bagaimana nilai tambah diciptakan oleh ekonomi, baik menurut lapangan usaha maupun menurut komponen penggunaannya. Neraca pendapatan dan pengeluaran memperlihatkan besarnya tabungan yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya neraca modal memperlihatkan berapa besar kemampuan tabungan dalam membiayai pembentukan modal dan berapa pinjaman neto yang harus dilakukan. Sedangkan neraca luar negeri memperlihatkan transaksi dengan luar negeri baik dalam bentuk barang dan jasa (ekspor dan impor) maupun dalam bentuk pinjaman dan transfer modal.

Bila sistem neraca nasional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka ada dua neraca yang mempunyai hubungan erat, yaitu neraca pendapatan dan pengeluaran, dan neraca modal. Dari neraca pendapatan dan pengeluaran dapat diturunkan tabungan bruto, sedangkan dari neraca modal dapat diturunkan pembentukan modal tetap dan

⁴ Sebenarnya NAD dapat disajikan dalam dua cara. Pertama, menyajikan data mengenai sumber dan penggunaan dana menurut instrumen finansial dan sektor. Kelemahan penyajian menurut cara ini adalah tidak dapat diketahui secara langsung hubungan antar sektor atau dari siapa kepada siapa suatu instrumen finansial itu diperjual-belikan. Untuk mengatasi kelemahan ini dibuat cara penyajian kedua, yang menyajikan NAD antar sektor. Contoh penggunaannya diberikan dalam Bab IV.

pinjaman neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan instrumen-instrumen baik di sisi penggunaan maupun sumber.

Neraca pendapatan dan pengeluaran (*income and outlay accounts*) pada intinya merupakan gabungan dari neraca pendapatan dan pengeluaran sektoral, yang dalam beberapa hal dapat disamakan dengan laporan rugi laba perusahaan. Pada sistem neraca ini juga berlaku suatu persamaan yang menunjukkan bahwa pengeluaran suatu sektor merupakan pendapatan di sektor lainnya. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran sama dengan tabungan (bisa positif maupun negatif). Istilah pengeluaran yang digunakan di sini tidak termasuk pengeluaran untuk harta finansial maupun non finansial (disebut *current expenditure*). Angka tabungan yang berasal dari neraca pendapatan dan pengeluaran selanjutnya dicatat pada neraca modal (*capital finance accounts*) yang mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Neraca terakhir ini mencatat tabungan bruto dan pembentukan modal atau harta riil yang terdiri dari pembentukan modal tetap bruto ditambah perubahan stok. NAD juga mencatat pembelian neto barang tak berwujud, seperti: hak paten dan nama baik (*goodwill*) walaupun data semacam itu tidak lengkap atau belum tersedia saat ini.

Jumlah sektor dalam neraca pendapatan dan pengeluaran, dan neraca modal lebih sedikit dibandingkan jumlah sektor dalam NAD, bahkan untuk beberapa negara yang sudah menyusunnya, beberapa sektor NAD hanya diwakili oleh satu sektor saja.

NAD juga mempunyai kaitan dengan sistem neraca pembayaran. Dalam NAD, surplus/defisit pada neraca pembayaran adalah negatif/positif pada tabungan di sektor luar negeri. Bagian neraca modal dalam neraca pembayaran mencatat transaksi luar negeri menurut instrumen finansial. NAD juga mencatat hal yang serupa tetapi mungkin berbeda dalam kategori dan rinciannya.

Tujuan penyusunan NAD adalah menyediakan data rinci mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi dari beberapa sektor surplus ke beberapa sektor defisit lainnya dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu sistem data keuangan yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten dengan data dari neraca riil (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca pendapatan nasional.

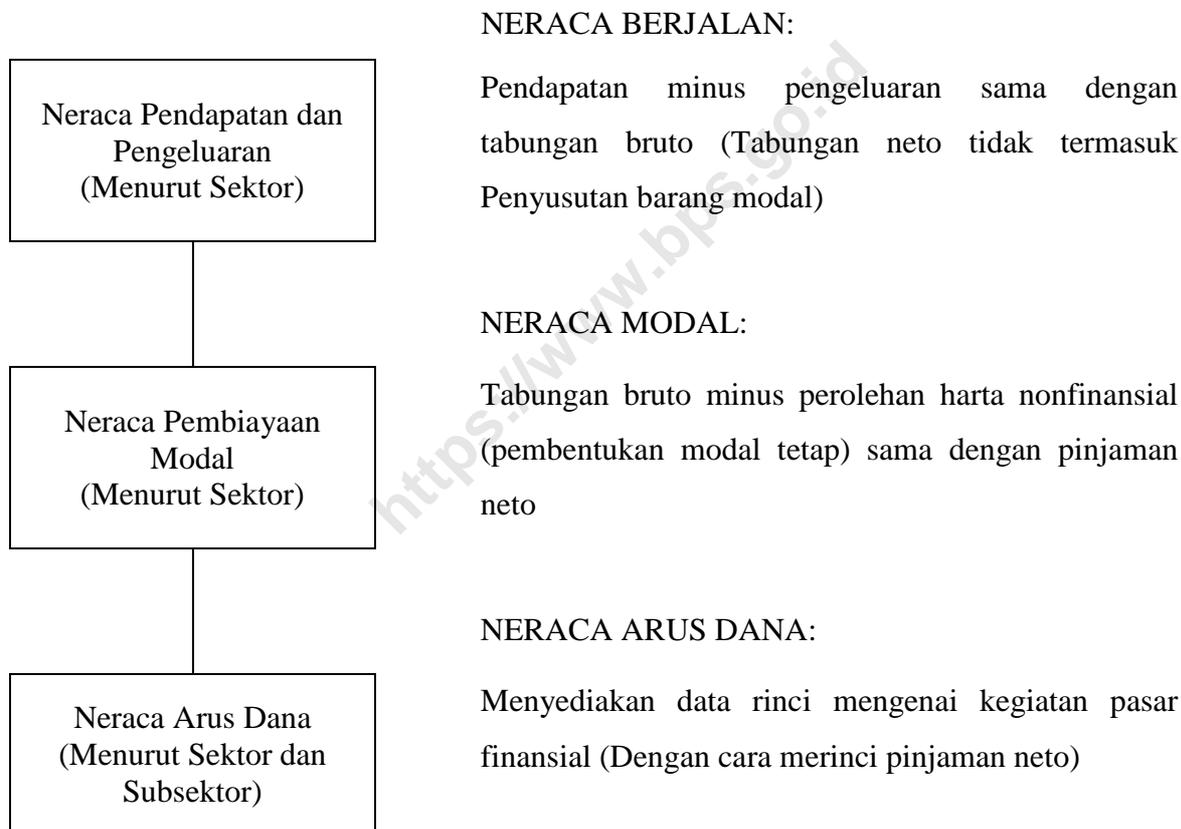
Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel dari sektor riil melalui keputusan atas besarnya tabungan dan investasi, dan sebagian lagi ditentukan

oleh variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbagai jenis instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara empiris, misalnya untuk melihat interaksi antara tabungan dan investasi, hutang dan piutang, perilaku perantara finansial, dan penentuan tingkat suku bunga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara neraca pendapatan dan pengeluaran, serta neraca modal dengan neraca arus dana dapat digambarkan dalam bagan 1 berikut ini.

BAGAN 1

Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional



Berdasarkan Bagan 1, dapat ditelusuri neraca berjalan yang menyajikan data mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor. Selisih pendapatan dan pengeluaran ini menghasilkan tabungan bruto, karena di dalamnya masih termasuk komponen penyusutan barang modal. Dalam neraca modal digambarkan bagaimana barang modal dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan. Selisih antara tabungan bruto yang berasal dari neraca pendapatan dan pengeluaran dengan jumlah pembentukan barang modal merupakan pinjaman neto. Nilainya bisa positif atau negatif. Selanjutnya pinjaman

neto tersebut dalam NAD dirinci lagi ke dalam berbagai jenis instrumen finansial dan sektor pelakunya.

2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan

Perusahaan biasanya membuat paling sedikit dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan rugi-laba dan neraca. Dalam laporan rugi-laba dicatat pendapatan dan pengeluaran berjalan selama periode tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. Sedangkan dari neraca diperoleh data mengenai harta, hutang dan modal perusahaan pada satu waktu tertentu, biasanya keadaan akhir tahun atau akhir triwulan. NAD disusun berdasarkan data neraca, tetapi arusnya dihitung sebagai perubahan posisi finansial selama periode tertentu.

Berdasarkan persamaan akuntansi berlaku hubungan yang menyatakan bahwa jumlah harta (sisi aktiva) sama dengan jumlah kewajiban (sisi pasiva) atau kalau ditulis dalam bentuk persamaan akuntansi menjadi

$$\mathbf{HARTA = KEWAJIBAN}$$

Sisi kewajiban biasanya terdiri dari dua bagian, Hutang dan Modal. Bagian pertama merupakan kewajiban terhadap pihak ketiga dan bagian yang terakhir merupakan kewajiban terhadap pemilik modal. Dengan demikian persamaan di atas dapat diubah menjadi

$$\mathbf{HARTA = HUTANG + MODAL}$$

Dalam terminologi NAD harta selalu diklasifikasikan menjadi harta riil dan harta finansial. Harta riil mencakup semua barang modal seperti gedung, bangunan, mesin dan peralatan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun. Untuk menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan, maka disisihkan sebagian dana untuk mengganti barang modal tersebut di masa datang, atau penyusutan barang modal. Angka ini dicatat dengan tanda negatif di sisi harta. Dengan demikian persamaannya menjadi

$$\mathbf{HARTA RIIL + HARTA FINANSIAL - PENYUSUTAN = HUTANG + MODAL}$$

atau

$$\mathbf{HARTA RIIL (HR) + HARTA FINANSIAL (HF) = HUTANG (U) + MODAL DAN PENYUSUTAN (MP)}$$

Dengan menambahkan subskrip t dan t-1 untuk menyatakan dua tahun neraca yang berurutan ke dalam persamaan di atas diperoleh dua persamaan berikut:

$$\mathbf{HR}_t + \mathbf{HF}_t = \mathbf{U}_t + \mathbf{MP}_t, \quad \text{.....(1)}$$

dan

$$\mathbf{HR}_{t-1} + \mathbf{HF}_{t-1} = \mathbf{U}_{t-1} + \mathbf{MP}_{t-1} \text{ (2)}$$

Jika persamaan (1) dikurangkan dengan persamaan (2) maka akan diperoleh besaran yang menunjukkan selisih dua level neraca atau arus yang terjadi pada tahun t dan diberi simbol

$$\Delta \mathbf{HR}_t + \Delta \mathbf{HF}_t = \Delta \mathbf{U}_t + \Delta \mathbf{MP}_t$$

Dengan mengganti \mathbf{MP}_t dengan \mathbf{TB}_t (tabungan bruto), persamaan di atas dapat disusun kembali menjadi

$$\Delta \mathbf{HF}_t - \Delta \mathbf{U}_t = \Delta \mathbf{TB}_t - \Delta \mathbf{HR}_t \text{ (3)}$$

Berdasarkan persamaan (3) dapat dikatakan bahwa jika perusahaan membelanjakan lebih banyak dananya untuk barang modal melebihi tabungan brutonya, maka perusahaan ini disebut sebagai peminjam (sektor defisit). Sebagai peminjam tidak berarti menghalanginya untuk membeli berbagai harta finansial atau membayar hutang. Kegiatan finansial sebenarnya merupakan kombinasi pembelian harta finansial dan pembayaran hutang untuk memenuhi tingkat pinjaman neto yang telah ditentukan. Persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi

$$\Delta \mathbf{TB}_t + \Delta \mathbf{U}_t = \Delta \mathbf{HR}_t + \Delta \mathbf{HF}_t \text{(4)}$$

Persamaan (4) memperlihatkan jumlah sumber dana baik yang berasal dari dana yang dihasilkan sendiri (tabungan bruto) maupun dana yang diperoleh dari luar (hutang) sama dengan jumlah penggunaan dana (penambahan harta riil dan harta finansial).

Persamaan (4) di atas dapat dipakai sebagai pendekatan untuk menyusun NAD masing-masing sektor, selama sektor bersangkutan mempunyai neraca. Karena dalam matriks NAD sektor pelaku ekonomi disajikan menurut kolom, maka identitas ini disebut "identitas kolom."

Seperti dijelaskan di atas bahwa jumlah sumber dana setiap sektor dalam NAD harus sama dengan jumlah penggunaan dananya. Karena NAD secara keseluruhan

merupakan suatu sistem yang tertutup, maka setiap transaksi finansial yang terjadi harus melibatkan dua pelaku, yaitu pembeli dan penjual. Dengan demikian jumlah pembelian untuk setiap instrumen finansial sama dengan jumlah penjualannya, atau dengan kata lain jumlah perubahan suatu harta sama dengan jumlah perubahan kewajiban untuk kategori finansial yang sama. Karena dalam matriks NAD kategori instrumen finansial disajikan menurut baris, maka identitas ini disebut "identitas baris."

2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat dalam penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap dalam pengertian bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya. Sementara konsisten berarti bahwa data keuangan yang disajikan harus mengikuti aturan tertentu. Misalnya, jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial untuk keseluruhan ekonomi harus sama besarnya. Begitu pula jumlah seluruh sumber dan penggunaan untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian NAD dapat digunakan sebagai dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

2.5.1 Pangkalan Data

NAD merupakan suatu pangkalan data (*data base*), yang menyediakan catatan-catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini dapat dibuat analisis deskriptif mengenai kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

2.5.2 Alat Analisis

NAD banyak dipakai oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Para pengamat ekonomi makro yang tertarik untuk menganalisis kaitan antara sektor finansial dan riil dapat menggunakan informasi tabungan dan investasi riil.

Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan sektor tertentu, misalnya sektor swasta non finansial, dapat menggunakan data deret berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari hutang-hutang terhadap modal saham, dan dari pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman jangka panjang. Apalagi jika data tersedia tidak hanya dalam bentuk arus tetapi juga dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Sektor rumah tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi. Jumlah perubahan harta dan kewajiban lancar seperti deposito dan kredit

konsumen dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah tangga.

2.5.3 *Penerapan Teori Portfolio*

Berdasarkan teori portfolio, pelaku ekonomi baik sebagai individu maupun perusahaan melakukan investasinya ke berbagai jenis instrumen finansial sesuai dengan hubungan antara hasil dan risiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika biaya transaksi masing-masing jenis portfolio diabaikan, maka para pelaku ekonomi akan merubah perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio keuntungan masing-masing portfolio. Dalam konteks keseimbangan umum, perubahan relatif dari penawaran suatu aset hanya akan diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga meningkat atau harganya lebih rendah.

Dalam model portfolio yang lengkap, biaya transaksi juga diperhitungkan sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis. Teori portfolio ini dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.5.4 *Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga*

Pengamat ekonomi yang tertarik untuk meramalkan tingkat suku bunga dapat memanfaatkan arus finansial sebagai alatnya. Prosedur sederhana yang dapat dilakukan adalah memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat pertumbuhan portfolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut seperti bank dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran terhadap satu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan penawaran hingga mencapai titik keseimbangan umum. Melalui proses iterasi dan penyesuaian untuk mencapai titik keseimbangan tersebut akan dapat diperkirakan tingkat suku bunga dan arus finansial yang terjadi.

2.5.5 *Penerapan untuk Perencanaan dan Proyeksi*

Sistem data NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus finansial, tabungan, dan investasi sektoral sebagai masukan bagi perencanaan sektoral dan nasional. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan variabel-variabel tersebut adalah menggunakan rasio tetap masing-masing sektor. Prosedur sederhana ini harus dimodifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini dilakukan karena dua hal yaitu : pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup

besar dari tahun ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima tahunan. Kedua, hendaknya dibuat secara iteratif dan disesuaikan dengan memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD baik secara sektoral maupun keseluruhan. Kadang-kadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan pula beberapa informasi tidak langsung.

Dalam konteks menyusun perencanaan, dapat dimulai dengan memperkirakan investasi riil untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan memperkirakan besarnya tabungan yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD. Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-variabel terkait lainnya.

2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD

Masalah utama yang biasanya dihadapi dalam penyusunan NAD adalah keterbatasan data yang tersedia. Untuk itu beberapa alternatif pendekatan dan penggunaan metode sampling tidak dapat dihindarkan. Selain kelemahan sumber data, terdapat beberapa keterbatasan NAD lainnya yang berkaitan dengan pendekatan yang digunakan. Misalnya pendekatan dengan menggunakan neraca sebagai sumber data, membawa implikasi terhadap pengukuran arus finansial, konsolidasi neraca, dan arus sebenarnya (*true flows*). Berikut ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai keterbatasan NAD berkaitan dengan penyusunannya.

2.6.1 Pengukuran Arus Finansial

Paling tidak terdapat dua kelemahan jika arus finansial disusun berdasarkan neraca akhir tahun. Pertama, NAD hanya mencatat perubahan dari pos-pos neraca untuk periode satu tahun. Padahal selama periode ini banyak terjadi perubahan yang cukup berarti, terutama untuk harta lancar seperti kas dan deposito. Kedua, pengertian sumber atau penggunaan dana tidak sama dengan sumber atau penggunaan kas. Penurunan dalam kas dapat berarti penurunan kas sebenarnya atau juga penurunan dana. Akan tetapi penurunan dana (misalnya penurunan piutang dagang), belum tentu berarti penurunan kas.

2.6.2 Konsolidasi dan Gabungan Neraca

Agar dapat menyusun neraca finansial untuk sektor secara keseluruhan, neraca-neraca individu yang merupakan anggota sektor tersebut harus dikelompokkan. Pengelompokan ini dapat dilakukan dengan cara konsolidasi atau gabungan. Jika

dilakukan konsolidasi dari masing-masing neraca dalam sektor tertentu, maka terjadi penghapusan beberapa pos yang saling menghilangkan, tetapi masih tercatat baik sebagai harta maupun sebagai kewajiban.

Untuk menyusun NAD suatu sektor berdasarkan metode konsolidasi harus tersedia secara rinci data mengenai dari dan untuk siapa harta dan kewajiban sektor tersebut. Tetapi dalam praktek data semacam ini sangat jarang diperoleh, terkecuali untuk sektor luar negeri. Oleh karena itu NAD umumnya disusun dengan metode gabungan.

2.6.3 "Arus Sebenarnya" Lawan "Perubahan Level dalam Neraca"

Secara umum, arus keuangan dihitung dari perbedaan dua neraca akhir tahun yang berurutan. Angka ini biasanya sama dengan transaksi yang sebenarnya (*true flows*) selama periode tersebut. Walaupun begitu, ada beberapa pos neraca yang transaksinya tidak menggambarkan nilai sebenarnya, yaitu transaksi yang diakibatkan karena: (1) *keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs*, (2) *capital gains dan losses*, (3) *perubahan klasifikasi sektor* dan (4) *perubahan dalam prosedur akuntansi atau penyusunan laporan keuangan*.

(1) Keuntungan atau Kerugian Akibat Perubahan Kurs

Nilai ekuivalen rupiah terhadap harta atau kewajiban dalam mata uang asing dapat berubah atau lebih tinggi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari perubahan kurs yang terjadi. Dengan demikian, perubahan dalam level (yang dinyatakan dalam rupiah) dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam penggunaan kurs.

Idealnya, nilai "*true flow*" dalam rupiah seharusnya dihitung dari data setiap transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing baik untuk harta maupun kewajiban, dengan menggunakan nilai tukar yang sebenarnya bagi transaksi tersebut. Akan tetapi, data yang sifatnya transaksi individu jumlahnya sangat besar dan datanya sulit diperoleh. Dalam NAD, arus mata uang asing dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut. Pos-pos neraca yang menggunakan mata uang asing tetapi dilaporkan dalam ekuivalen rupiah (menggunakan kurs pada akhir periode) harus dikonversikan kembali ke dalam mata uang asing menggunakan kurs yang sama. Demikian pula untuk periode sebelumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang sesuai. Dari sini dapat dihitung arus finansial dalam mata uang asing. Langkah berikutnya adalah mencari kurs yang sesuai untuk

mendapatkan arus pos neraca tersebut dalam nilai rupiah. Kurs yang baik adalah menggunakan rata-rata kurs bulanan yang ditimbang dengan jumlah nilai transaksi masing-masing bulan. Jika prosedur semacam ini dilakukan, hasilnya akan mendekati arus sebenarnya.

(2) *Capital Gains and Losses* serta Revaluasi

Perusahaan atau pemerintah dapat saja menyesuaikan nilai hartanya seperti: tanah, gedung dan peralatan, serta penyertaan dalam bentuk saham di perusahaan lain sesuai dengan harga pasar. Setiap kenaikan/penurunan nilai harta akibat penyesuaian harga harus diikuti dengan kenaikan/penurunan modal. Kenaikan/penurunan modal ini dapat disamakan dengan laba/rugi yang diakibatkan *capital gains/losses* yang tercermin dalam laporan rugi/laba. Meskipun begitu, sistem neraca nasional tidak memperlakukan *capital gains/losses* sebagai pendapatan, karena data ini tidak mengukur nilai produksi sebenarnya. Karena data yang tersedia untuk penyusunan NAD sebagian besar diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, maka harus dilakukan penilaian kembali, apakah menaikkan atau menurunkan harta atau penambahan/pengurangan tabungan dianggap sebagai arus dalam NAD. Kasus ini merupakan salah satu ilustrasi perbedaan antara nilai arus sebenarnya dengan perbedaan dua level neraca.

(3) Perubahan Klasifikasi Sektor

Jika perusahaan atau pelaku ekonomi lainnya melakukan perubahan terhadap kepemilikan, anggaran dasar atau bidang usahanya kemungkinan akan terjadi perubahan klasifikasi perusahaan atau pelaku ekonomi tersebut ke dalam sektor NAD.

Perubahan klasifikasi perusahaan ini dapat menyebabkan penurunan level neraca suatu sektor, tetapi sebaliknya akan menaikkan level sektor NAD yang lain. Penurunan dan kenaikan tidak berpengaruh pada nilai arus sebenarnya, karena kenyataannya tidak ada arus dana yang berhubungan dengan perubahan klasifikasi itu sendiri. Walaupun begitu, laporan sumber dan penggunaan dana untuk perusahaan tersebut tetap dicatat dalam NAD berdasarkan klasifikasi baru.

(4) Perubahan dalam Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan

Banyak kasus menunjukkan bahwa perubahan prosedur akuntansi yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan perubahan beberapa pos neraca, yang pada akhirnya merubah level neraca keseluruhan. Misalnya, penilaian pada akhir tahun akan berbeda bila menggunakan sistem "*last in first out*" (LIFO) atau "*first in first out*" (FIFO). Perubahan ini seharusnya tidak berpengaruh pada perhitungan sebenarnya, tetapi tetap tercakup pada NAD karena mendasarkan pada data yang ada.

Perubahan sistem pelaporan juga dapat mengganggu sistem penyusunan NAD. Misalnya, sebelumnya diperoleh laporan keuangan terpisah antara induk dan cabang dari suatu perusahaan yang sama. Tetapi karena sistem pelaporan perusahaan tersebut yang sekarang hanya dapat memberikan neraca konsolidasi, sehingga seolah-olah terjadi penurunan level neracanya, karena transaksi antara induk dan cabang tidak diperhitungkan.

(5) Perkiraan Berdasarkan Sampel

Karena keterbatasan data yang dapat dikumpulkan, NAD untuk beberapa sektor seperti perusahaan non finansial, hanya didasarkan pada sampel sejumlah neraca perusahaan. Di samping itu jumlah sampel yang digunakan sebagai dasar estimasi mungkin pula berubah-ubah dari tahun ke tahun. Akibatnya perubahan level neraca gabungan sangat tergantung dari jumlah sampel yang tersedia, dan pada gilirannya dapat menghasilkan arus yang keliru dalam NAD tanpa mengetahui seberapa besar tingkat kesalahannya. Masalah ini dapat diatasi dengan cara menghitung arus dana masing-masing tahun berdasarkan jumlah sampel tertentu yang konsisten, atau dengan memperlihatkan adanya penambahan atau pengurangan sampel untuk masing-masing individu.

BAB III

KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA

3.1 Kerangka NAD Indonesia

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa NAD adalah suatu sistem pencatatan statistik finansial yang menggambarkan transaksi pinjam-meminjam antar berbagai sektor di dalam suatu perekonomian. Berdasarkan hal itu paling tidak ada dua hal yang harus dijelaskan lebih lanjut, yaitu melalui instrumen finansial apa proses pinjam-meminjam itu dilakukan dan sektor-sektor perekonomian mana saja yang menjadi pelakunya.

Untuk menggambarkan arus finansial antar sektor melalui instrumen finansial tertentu, lazimnya digunakan matriks yang barisnya menggambarkan instrumen finansial dan kolomnya menunjukkan sektor (pelaku ekonomi). Bagaimana menentukan pembagian sektor dan instrumen finansial yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia akan dijelaskan secara lebih rinci, berikut ini.

3.1.1 Pembagian Sektor

Dalam penyusunan statistik, khususnya untuk keperluan analisis tertentu lazim dilakukan penggolongan unit-unit analisis ke dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Penggolongan ini sangat berguna untuk melihat secara lebih tajam ciri khas kelompok dan perbandingan antar kelompok.

Dalam statistik produksi misalnya, unit-unit analisis dikelompokkan menurut kegiatan ekonominya, seperti sektor pertanian, industri dan sebagainya.⁵ Berbeda dengan itu, NAD membagi perekonomian menurut kelompok institusi.⁶ Alasan pembagian tersebut adalah transaksi finansial dan keputusan investasi yang dilakukan dalam suatu sistem perekonomian lebih ditentukan oleh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, pemerintah, dan sebagainya.

Salah satu tujuan penyusunan NAD adalah untuk mengetahui perilaku pinjam meminjam berbagai pelaku ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen finansial.

⁵ Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) lazim dipakai untuk keperluan penyusunan statistik produksi. KLUI merupakan hasil modifikasi dari *International Standard Industrial Classification* (ISIC).

⁶ Dalam publikasi ini istilah sektor dan institusi digunakan untuk maksud yang sama.

Untuk menunjang maksud tersebut, perekonomian harus dibagi menjadi sektor-sektor tertentu, sehingga lebih mudah dianalisis. Unit-unit ekonomi yang mempunyai motivasi serupa terhadap keputusan finansial dikelompokkan ke dalam satu sektor. Dengan demikian, paling sedikit perekonomian harus dibagi ke dalam lima sektor, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, dan luar negeri; karena kelima sektor tersebut mempunyai perilaku yang sangat berbeda. Pemerintah misalnya, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan seringkali melakukan investasi dalam jumlah besar. Lembaga keuangan khususnya bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada investor. Sedangkan motivasi perusahaan adalah mencari keuntungan dari investasi yang ditanam. Dalam prakteknya, sektor-sektor tersebut (kecuali luar negeri) perlu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam publikasi ini, sektor-sektor di atas (kecuali luar negeri), dikelompokkan menurut sektor keuangan dan bukan keuangan. Dengan demikian dalam analisis Neraca Arus Dana (NAD), sektor-sektor tersebut dibagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor keuangan, bukan keuangan dan luar negeri. Sektor keuangan adalah sektor-sektor yang tidak menghasilkan barang dan berfungsi sebagai penghubung atau perantara (*intermediaries institution*) antara sektor yang surplus dengan sektor yang membutuhkan dana atau sektor defisit. Sedangkan sektor luar negeri merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem perekonomian terbuka, sehingga terjadi transaksi antara residen dengan nonresiden.

Dalam sektor keuangan, paling tidak sektor bank dan bukan bank atau seringkali disebut sebagai lembaga keuangan lainnya, harus ada. Hal itu perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa hanya sektor bank saja yang dapat menciptakan uang baik uang kartal maupun uang giral, sedangkan sektor bukan bank tidak diizinkan melakukannya (*nonintermediaries institution*). Dengan pembagian semacam ini, selanjutnya dapat ditelusuri arus finansial dari lembaga pencipta uang (uang kartal maupun uang giral) ke sektor-sektor lainnya.

Selain itu dapat pula diketahui sektor mana yang mempunyai kelebihan dana (surplus) dan sebaliknya (defisit). Dalam publikasi ini sektor keuangan dirinci ke dalam sektor Otoritas Moneter, sektor Bank dan lembaga keuangan lainnya. Otoritas Moneter dibentuk sebagai sektor tersendiri karena mempunyai fungsi khusus yaitu menciptakan

uang kartal. Lembaga ini diwakili oleh Bank Indonesia. Sektor Bank terdiri dari bank umum atau BPUG, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perbankan syariah. Khusus bank umum atau Bank Pencita Uang Giral (BPUG) secara spesifik dapat dibedakan menjadi Bank Swasta Nasional (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank campuran, dan bank asing. Karena keterbatasan data yang tersedia, maka data yang dicakup untuk sektor bank ini hanya meliputi bank umum atau BPUG saja. Sedangkan untuk BPR dan perbankan syariah datanya masih belum lengkap.

Walaupun sistem pendataan statistik keuangan untuk sektor keuangan bukan bank tidak sebaik yang dimiliki sektor perbankan, tetapi dalam NAD tetap diusahakan membagi sektor ini secara rinci. Cukup banyak sektor yang termasuk dalam kelompok sektor non bank atau lembaga keuangan lainnya yaitu perusahaan pembiayaan, modal ventura, asuransi, pegadaian dan dana pensiun.

Berdasarkan pengalaman negara maju dan juga perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, sektor asuransi memiliki volume usaha yang semakin besar. Sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, peranan sektor ini juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu pembentukan sektor asuransi seharusnya dibuat cukup rinci dalam Namun karena keterbatasan data yang tersedia, maka sektor ini masih bergabung dalam sektor keuangan bukan bank. Berdasarkan UU. No.2 tahun 1992, ada tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha penunjang asuransi dan program asuransi sosial. Jenis usaha asuransi dibedakan menjadi tiga yaitu usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa dan usaha reasuransi. Usaha penunjang asuransi meliputi usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi. Sedangkan program asuransi sosial meliputi program asuransi sosial yang hanya boleh diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT. Jasa Raharja, PT. Taspen, PT. JAMSOSTEK, dan Perum ASABRI.

Lembaga keuangan bukan bank lainnya terdiri dari perusahaan pembiayaan, modal ventura, pegadaian dan dana pensiun. Termasuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan adalah jenis pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit. Walaupun peranannya tidak sebesar sektor bank atau asuransi, tetapi keberadaannya cukup berarti, terutama dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Suatu kekhasan di dalam sistem finansial Indonesia adalah

adanya sektor pegadaian yang secara teknis operasinya masih sangat terkait dengan sektor pemerintah. Di negara-negara lain juga terdapat sektor pegadaian tetapi diselenggarakan oleh swasta. Lain halnya dengan sektor keuangan, sektor bukan keuangan adalah sektor-sektor yang bergerak di sektor riil, yaitu sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam perekonomian Indonesia ada lima sokoguru yang menggerakkan roda perekonomian, yakni sektor pemerintah, perusahaan pemerintah termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BULOG, perusahaan swasta, koperasi dan rumah tangga. Kelima komponen ini juga dimunculkan secara tersendiri dalam NAD.

Sektor terakhir sebagai pelengkap sistem NAD adalah sektor luar negeri. Sektor ini secara eksplisit dapat menggambarkan karakteristik hutang-piutang penduduk Indonesia dengan luar negeri.

Berdasarkan latar belakang pembagian sektor seperti diuraikan di atas, seharusnya terdapat 30 sektor yang dicakup dalam NAD Indonesia. Dari 30 sektor tersebut, 20 sektor diantaranya merupakan sektor keuangan, dan hanya 9 sektor adalah sektor bukan keuangan serta satu sektor luar negeri. Tetapi karena keterbatasan data, dalam publikasi ini hanya disajikan sektor-sektor agregat sebanyak 8 sektor, terdiri dari Otoritas moneter, Bank Umum (BPUG), lembaga keuangan lainnya (Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura Asuransi, Dana pensiun dan Pegadaian), Pemerintah, Perusahaan Pemerintah (BUMN, BUMD, dan BULOG), Bisnis (Perusahaan Swasta, dan Koperasi), Rumah Tangga dan Luar Negeri. Khusus untuk perusahaan modal ventura datanya masih belum mencukupi.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran umum kerangka sektor NAD Indonesia, berikut ini dibuat skematis pembagian sektornya.

SEKTOR KEUANGAN

★ *Otoritas Moneter*

★ *Bank*

- Bank umum atau Bank Pencipta Uang Giral (BPUG)
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Perbankan Syariah

★ *Lembaga Keuangan Lainnya*

- Perusahaan Pembiayaan (pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit)
- Peransuransian (usaha asuransi, usaha penunjang asuransi dan program asuransi sosial)
- Dana Pensiun
- Pegadaian

SEKTOR BUKAN KEUANGAN

★ *Rumah Tangga*★ *Pemerintah (Pusat dan Daerah)*★ *Perusahaan Pemerintah (BUMN, BUMD, dan BULOG)*★ *Bisnis (Perusahaan Swasta Nonfinansial dan Koperasi)*

SEKTOR LUAR NEGERI

Secara lengkap definisi masing-masing sektor di atas diberikan pada Lampiran 1, dalam publikasi ini.

3.1.2 *Pembagian Kategori Transaksi*

Baris-baris NAD pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian atas (*above the line*) dan bagian bawah (*below the the line*). Bagian atas berisi tabungan bruto dan perolehan harta non finansial yang dalam istilah lain disebut investasi riil atau pembentukan modal. Tabungan bruto dibagi menjadi dua yaitu penyusutan barang modal dan tabungan neto. Sedangkan perolehan harta non finansial berisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan stok, dan Pembelian Barang Modal Bekas dari LN dan Harta Tak Berwujud Neto (PBHTN). Semua rincian tersebut berasal dari sektor riil yang biasanya dituangkan dalam neraca modal nasional, dan merupakan jembatan menuju ke bagian bawah NAD atau juga bagian finansial.

Sebelum masuk ke bagian finansial untuk kepentingan pengecekan konsistensi, diperkenalkan beberapa baris pembantu. Pertama, pinjaman neto yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi bruto. Akan tetapi karena matriks NAD disajikan menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara tabungan dan investasi real. Jika angka baris ini positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana (sektor surplus), sebaliknya jika negatif disebut sektor yang kekurangan dana (sektor defisit). Matriks NAD dapat digunakan untuk menelusuri aliran dana dari sektor surplus ke sektor

defisit melalui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian bawah.

Sebenarnya angka pinjaman neto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah penggunaan finansial dengan sumber finansial. Logikanya, per definisi pinjaman neto adalah bagian investasi finansial. Begitu pula selisih jumlah penggunaan dan sumber juga akan merupakan investasi finansial, tetapi diperoleh dari mutasi/transaksi finansial. Apabila angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah penggunaannya. Sebaliknya jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan lebih besar dari sumber. Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan pada baris selisih statistik. Dengan demikian terdapat lima baris penunjang, yaitu pinjaman neto, selisih statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber finansial. Di bawah baris penunjang ini selanjutnya merupakan bagian NAD yang berisi berbagai instrumen finansial.

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia. Kalau pendekatan ini ditempuh maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen yang sejenis atau mempunyai sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Misalnya, cadangan asuransi dan dana pensiun dimunculkan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan sektor asuransi dan dana pensiun. Begitu pula transaksi kategori pajak yang hanya menggambarkan hubungan hutang dan piutang pajak antara sektor pemerintah dengan sektor-sektor wajib pajak.

Jika dasar penggolongan itu diikuti, maka secara garis besar kategori transaksi NAD Indonesia dapat dibagi menjadi (a) cadangan valuta asing pemerintah, (b) klaim dalam valuta asing lainnya, (c) uang dan simpanan, (d) surat berharga jangka pendek, (e) pinjaman, (f) modal (*equity*), (g) surat berharga jangka panjang dan (h) lainnya. Di bawah ini dijelaskan rincian masing-masing kategori transaksi dalam kelompok besar di atas.

Cadangan valuta asing pemerintah menggambarkan hubungan antara sektor otoritas moneter dengan sektor luar negeri. Kategori ini akan mencakup transaksi emas moneter, *Special Drawing Right* (SDR), posisi cadangan di IMF, cadangan valuta asing, dan lainnya. Dalam sistem keuangan Indonesia, di samping otoritas moneter, sektor lainnya dapat pula secara langsung melakukan hubungan dengan sektor luar negeri. Oleh

karena itu, untuk menampung transaksi yang demikian, dimunculkan kategori klaim dalam valuta asing lainnya.

Di bawah kategori uang dan simpanan, dirinci semua instrumen yang sebagian besar berkaitan dengan hutang bank terhadap sektor lainnya. Karena uang dan simpanan sektor lainnya pada sektor bank dapat berbentuk valuta asing dan rupiah, maka dimunculkan kategori uang dan simpanan dalam valuta asing dan rupiah secara terpisah. Masing-masing kategori ini dirinci lagi ke dalam uang kertas dan logam, giro, tabungan dan deposito berjangka. Di samping jenis tabungan tersebut, dimunculkan pula jenis tabungan lainnya, yang mencakup tabungan giro pos dan koperasi, berturut-turut untuk menampung simpanan yang dilakukan di Kantor Pos dan Koperasi.

Surat berharga jangka pendek umumnya diberikan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jenis instrumen ini sebenarnya merupakan satu alternatif lain dalam investasi finansial. Di lain pihak, otoritas moneter kadang-kadang menggunakan instrumen ini dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan kebijaksanaan moneternya. Selanjutnya pinjaman merupakan hutang pada bank dan institusi lain.

Pada prakteknya terdapat kecenderungan bahwa sektor keuangan non bank juga ikut mengambil alih sebagian peranan bank dalam pemberian pinjaman. Semua kredit atau pinjaman yang diberikan ini dapat berbentuk rupiah ataupun valuta asing. Oleh sebab itu dalam NAD, di bawah kategori ini dimunculkan pula instrumen kredit bank dalam rupiah, pinjaman institusi lain dalam rupiah, serta pinjaman dalam valuta asing. Karena sifat kredit yang diberikan ini mempunyai fungsi yang berlainan, maka kredit (yang berasal dari bank maupun institusi lainnya) dipecah menjadi kredit modal kerja, kredit investasi dan konsumsi. Sedangkan semua kredit yang diberikan dalam valuta asing baik oleh bank maupun institusi lainnya, dimasukkan dalam satu kategori pinjaman dalam valuta asing.

Setiap sektor dalam menjalankan kegiatannya tentu mempunyai modal atau *equity*. Untuk kegiatan yang sudah berjalan dan masih memungkinkan untuk melakukan penambahan modal, maka ada berbagai cara untuk mendapatkannya. Bisa dengan cara dipenuhi sendiri seperti perusahaan perorangan bekerja sama dengan orang atau dengan menjual saham (tanda ikut memiliki). Alternatif lainnya bisa dilakukan dengan cara melakukan penawaran sahamnya (*go public*) di pasar modal khususnya untuk perusahaan-

perusahaan kategori sedang dan besar yang memiliki prospek bagus. Bagi perusahaan (emiten), cara seperti itu merupakan cara memperoleh sumber dana di luar kredit perbankan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kelebihan dana, cara seperti itu merupakan suatu alternatif melakukan investasi di luar kebiasaan menyimpannya dalam bentuk simpanan di bank dan surat berharga jangka pendek. Untuk menangkap aktivitas tersebut, maka dalam NAD, kategori modal dirinci lagi jenisnya menjadi kategori transaksi modal saham dan penyertaan (swasta) dan penyertaan modal pemerintah, yang dalam beberapa perusahaan pemerintah seringkali berubah menjadi dana donasi bagi perusahaan yang menerimanya.

Surat berharga jangka panjang (obligasi) umumnya diterbitkan oleh sektor pemerintah, lembaga keuangan dan sektor lain yang memerlukan dana investasi jangka panjang. Bagian dari kategori ini untuk saat sekarang baru dapat dimunculkan obligasi pemerintah dan obligasi lainnya tanpa rincian lebih lanjut, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Saat ini obligasi pemerintah selain berorientasi ke pasar luar negeri juga telah menerbitkan obligasi untuk dalam negeri, seperti: Surat Utang Negara (SUN), dan Obligasi Negara Ritel (ORI).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kelompok kategori yang terakhir merupakan kategori khas untuk sektor-sektor tertentu. Seperti cadangan asuransi dan pensiun, untuk sektor asuransi dan dana pensiun, dan dana perwalian yang direncanakan untuk menampung investasi yang dilakukan masyarakat ke dalam "*trust company*". Nampaknya investasi ke perusahaan semacam ini masih belum berkembang di Indonesia. Kemudian untuk menampung hutang-hutang dagang yang sering terjadi di dunia usaha dimunculkan kategori kredit dagang. Kategori pajak dimaksudkan untuk menampung hutang-piutang pajak antara pemerintah dengan sektor lainnya. Kategori klaim antar bank dibuat khusus untuk transaksi yang terjadi antar bank, baik antara BPUG dan Bank Indonesia, maupun transaksi antar BPUG.

Selain kategori transaksi di atas, dibuat pula suatu kategori rupa-rupa yang menampung semua transaksi yang tidak tercakup dalam kategori yang telah disebut terdahulu. Definisi kategori transaksi diberikan secara lengkap di Lampiran 2. Namun demikian, berkaitan dengan data NAD yang disajikan dalam publikasi ini, hanya kategori transaksi yang penting dan strategis saja yang ditampilkan tersendiri, sedangkan untuk kategori transaksi lain hanya ditampilkan agregasinya.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia umumnya merupakan neraca akhir tahun (*Balance Sheet*) perusahaan. Sesuai dengan pembagian sektor dalam NAD, data ini sangat beragam baik tingkatan maupun sumbernya. Data untuk sektor perbankan sudah merupakan neraca konsolidasi yang dilengkapi dengan kode-kode transaksi NAD, sebaliknya sektor keuangan bukan bank dan sektor bukan keuangan sebagian besar masih merupakan neraca individu perusahaan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sektor rumah tangga dan luar negeri karena karakteristik data yang digunakan berbeda, tidak dapat diperoleh dari neraca akhir tahun.

Untuk lebih jelasnya, sumber data masing-masing sektor yang digunakan dalam penyusunan NAD diuraikan berikut ini.

3.2.1 Sektor Otoritas Moneter

Data untuk sektor ini bersumber dari Bank Indonesia yang merupakan hasil pengolahan khusus. Sumber data sektor ini berbentuk neraca yang sangat rinci sehingga memudahkan pemberian kode transaksi NAD. Selain itu, data tersebut dilengkapi pula dengan perkiraan alokasinya (*counterpart accounts*) ke sektor-sektor lain. Dengan demikian data itu sangat membantu konsistensi dan kelengkapan data di sektor bersangkutan.

3.2.2 Sektor Bank

Data untuk sektor ini juga bersumber dari Bank Indonesia dalam bentuk neraca konsolidasi, masing-masing untuk Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Campuran, dan Bank Asing. Seperti Neraca Otoritas Moneter, rincian dari neraca konsolidasi ini juga sangat memadai sehingga memungkinkan untuk membuat perkiraan alokasinya ke sektor-sektor lain.

3.2.3 Lembaga Keuangan Lainnya

Sumber data untuk sektor ini cukup luas dan beragam sesuai dengan banyaknya jenis kegiatan yang dicakup di dalamnya. Seperti data perusahaan pembiayaan diperoleh dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan survei khusus ke perusahaan-perusahaan bersangkutan. Data Dana Pensiun diperoleh dari Departemen Keuangan dan dari survei-survei khusus. Survei khusus yang dilakukan untuk mengumpulkan data perusahaan pembiayaan dan dana pensiun adalah Survei Khusus Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan (SKDPP). Data untuk sektor asuransi (yang meliputi tiga jenis usaha

peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha jasa penunjang asuransi, dan program asuransi sosial) diperoleh dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK), Departemen Keuangan berupa neraca konsolidasi untuk masing-masing jenis usaha asuransi. Sedangkan data untuk sektor Pegadaian diperoleh langsung dari PT (Pesero) Pegadaian.

3.2.4 Sektor Pemerintah

Sektor Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Berbeda dengan sektor-sektor sebelumnya, sektor ini tidak memiliki informasi keuangan dalam bentuk neraca. Penyusunan NAD untuk sektor ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi yang relevan dari Bank Indonesia dan Departemen Keuangan menjadi suatu bentuk "Neraca Pemerintah Pusat". Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, karena keterbatasan data hal yang serupa tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu sektor terakhir ini hanya mengandalkan data sektor-sektor lainnya, terutama yang bersumber dari Bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan pemerintah. Khusus mengenai tabungan dan pembentukan modal pemerintah, datanya diperoleh langsung dari hasil penyusunan statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.5 Perusahaan Pemerintah

Perusahaan pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BULOG. Perusahaan pemerintah di bidang keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank sudah termasuk dalam kelompok sektor keuangan sebelumnya. BULOG, walaupun sebenarnya bukan merupakan perusahaan pemerintah tetapi untuk kepentingan penyajian, digabungkan dalam kelompok ini.

Data untuk sektor BUMN diperoleh langsung dari Departemen Keuangan berupa neraca individu perusahaan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Namun demikian, data yang diperoleh belum mencakup seluruh BUMN yang ada, sehingga masih diperlukan penaksiran-penaksiran. Data untuk BUMD juga diperoleh dari Departemen Keuangan, dengan cakupan yang masih kurang memadai. Penaksiran untuk memperoleh cakupan yang lebih baik dilakukan secara tidak langsung melalui alokasi (*counterpart accounts*) sektor-sektor lain. Sementara itu, data untuk BULOG berupa neraca akhir tahun yang cukup rinci diperoleh langsung dari lembaga bersangkutan.

3.2.6 *Perusahaan Swasta*

Sektor ini mencakup perusahaan-perusahaan di luar BUMN, BUMD dan lembaga keuangan. Sistem pengolahan data untuk perusahaan swasta ini belum dikembangkan di Indonesia. Artinya belum ada satupun instansi atau lembaga yang mengumpulkan dan menyajikan data statistik keuangan sektor ini. Oleh karena itu, keberadaan sektor ini dalam NAD Indonesia masih memiliki kelemahan data yang cukup berarti.

Sumber data keuangan untuk sektor ini diperoleh dari Survei Khusus Perusahaan Swasta (SKPS) non finansial yang dilakukan oleh BPS, serta dari data laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go-public* yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data lainnya berasal dari Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan, yang mengumpulkan laporan keuangan dalam rangka pemungutan pajak. Namun demikian, karena cakupan sektor ini belum diketahui secara pasti, maka data dari perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat diperkirakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, beberapa informasi mengenai sektor ini diambil dari perkiraan-perkiraan lawan (*counterpart accounts*) yang tersedia di sektor lain (khususnya sektor bank), sedangkan data perusahaan tersebut hanya dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran struktur finansialnya.

3.2.7 *Koperasi*

Sektor koperasi terdiri dari koperasi pedesaan (KUD) dan koperasi perkotaan (non-KUD). Data untuk penyusunan NAD sektor ini diperoleh dari beberapa sumber. Untuk Induk Koperasi baik yang berkaitan dengan KUD maupun non-KUD diperoleh dari Departemen Koperasi. Data untuk KUD diperoleh dari hasil perkiraan Departemen Koperasi. Sedangkan data non-KUD diperoleh dari estimasi hasil survei khusus terhadap 1.500 koperasi.

Dalam publikasi NAD Indonesia, untuk memudahkan penyajian, sektor koperasi ini dikelompokkan dengan perusahaan swasta. Matriks NAD untuk sektor koperasi pada tahun 2006 datanya diharapkan berasal dari hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE 06). Tetapi sampai saat ini hasil pengolahan SE 06 belum dapat disajikan, sehingga matriks NAD untuk sektor perusahaan swasta untuk tahun 2006 belum mencakup sektor koperasi.

3.2.8 Rumah Tangga

Sektor rumah tangga merupakan sektor yang hampir tidak mungkin dapat disusun neraca akhir tahunnya, sebab dengan alasan ekonomi belum terlihat pentingnya rumah tangga memiliki suatu laporan keuangan. Pendekatan yang dipakai untuk memperoleh data keuangan rumah tangga adalah melakukan estimasi hasil Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR) yang dilakukan BPS dengan mengambil sampel kurang lebih sebanyak 10.000 rumah tangga.

Hasil pengolahan SKTIR ini hanya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh rasio tabungan terhadap pendapatan (*saving ratio*) dan struktur perubahan harta dan kewajiban finansial rumah tangga. Sedangkan arus masing-masing instrumen finansialnya seperti: uang, giro, deposito, kredit bank dan sebagainya tetap mempertimbangkan data alokasi (*counterpart accounts*) yang diberikan oleh sektor bank. Data tabungan dan pembentukan modal diperoleh dari hasil perhitungan angka-angka Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.9 Luar Negeri

Dalam penyusunan NAD Indonesia data untuk sektor luar negeri diperoleh dari beberapa sumber dengan cara tidak langsung (sebagai *counterpart accounts*). Data tersebut diturunkan dari hasil perhitungan NAD untuk sektor otoritas moneter, bank dan pemerintah. Selain itu, dipertimbangkan juga data yang berkaitan dengan transaksi luar negeri yang ada pada neraca pembayaran (*Balance of Payment*).

Tabungan sektor ini sama dengan surplus berjalan yang diperoleh dari Neraca Luar Negeri, Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.3 Metode Penyusunan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia adalah neraca perusahaan, terkecuali untuk sektor rumah tangga dan luar negeri. Neraca-neraca perusahaan tersebut dapat berupa: (a) neraca konsolidasi, seperti neraca perbankan yang disiapkan oleh Bank Indonesia dan neraca asuransi yang dikerjakan oleh Departemen Keuangan, dan (b) neraca individu perusahaan yang diterima langsung dari perusahaan bersangkutan ataupun sebagai data sekunder dari instansi terkait.

Prosedur penyusunan NAD Indonesia berdasarkan sumber data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 *Penyusunan Bagan Transaksi (Chart of Accounts) Sektoral*

Bagan transaksi adalah suatu media antara yang secara teknis digunakan untuk mentransformasikan neraca akhir tahun menjadi bentuk neraca lain yang menggunakan kategori transaksi NAD. Bagan transaksi ini dapat disusun berdasarkan neraca baik dalam bentuk konsolidasi maupun individual. Transformasi dari pos-pos neraca yang ada pada setiap neraca akhir tahun ke dalam kategori transaksi NAD dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap pos neraca bersangkutan. Bahkan sering dilakukan dengan membuat terlebih dahulu daftar konversi pos-pos neraca ke kategori transaksi NAD untuk setiap neraca. Secara teknis, langkah-langkah penyusunan bagan transaksi adalah sebagai berikut.

- i. Setiap pos neraca setelah diidentifikasi diberi kode kategori transaksi NAD yang sesuai. Pengkodean tersebut berpedoman pada klasifikasi kategori transaksi baku yang digunakan dalam NAD Indonesia. Neraca perusahaan dan neraca konsolidasi yang masing-masing pos neracanya sudah menggunakan kode transaksi NAD disebut Bagan Transaksi Perusahaan. Selanjutnya bagan transaksi ini dapat disederhanakan dengan menggabungkan nilai transaksi dari pos-pos neraca yang mempunyai kode kategori transaksi sama.
- ii. Bagan Transaksi Sektoral diperoleh dengan cara menggabungkan Bagan Transaksi Perusahaan, yaitu menjumlahkan nilai transaksi dari kategori NAD yang berkode sama. Selanjutnya, hasil penggabungan ini merupakan neraca yang siap dipakai untuk menyusun NAD.

3.3.2 *Penghitungan Arus Finansial*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, NAD menggambarkan arus finansial yang terjadi antar sektor ekonomi selama satu periode tertentu (satu tahun). Dalam praktek, arus finansial ini disusun dengan cara menghitung selisih nilai dari masing-masing kategori transaksi dari dua neraca (bagan transaksi) pada tahun yang berurutan. Oleh karena itu arus finansial untuk suatu tahun tertentu bisa negatif atau positif.

Dalam NAD, arus finansial dikelompokkan menjadi dua kolom, yaitu sumber dan penggunaan. Arus finansial sebagai sumber (*sources*) berasal dari semua kategori

transaksi yang ada di sisi pasiva bagan transaksi. Sebaliknya arus finansial sebagai penggunaan (*uses*) berasal dari semua kategori transaksi di sisi aktiva.

3.3.3 Rekonsiliasi NAD

NAD Indonesia disusun berdasarkan neraca finansial yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, konsistensi data dari berbagai sumber tersebut harus dijaga melalui suatu tahap yang disebut rekonsiliasi. Bank Indonesia di samping menyediakan data untuk Otoritas Moneter dan Bank Pencipta Uang Giral, mampu pula menunjukkan alokasinya (*counterpart accounts*) pada sektor-sektor terkait. Misalnya untuk arus uang dan rekening giro sebagai sumber di BPUG, dapat diketahui sektor apa saja pemiliknya dan berapa besarnya. Di lain pihak transaksi yang sama juga dapat diketahui dari sektor yang bersangkutan, tetapi nilainya belum tentu sama. Pada dasarnya rekonsiliasi NAD bertujuan untuk menciptakan kelayakan dan konsistensi isian NAD baik ditinjau dari sektor maupun dari jenis instrumen finansial yang digunakan. Apabila dilihat menurut sektor, selisih antara jumlah penggunaan finansial dan sumber finansial harus sama dengan pinjaman neto. Sedangkan dari segi kategori transaksi, jumlah sumber harus sama dengan jumlah penggunaan.

Secara operasional, rekonsiliasi NAD dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Isian kolom (sumber dan penggunaan) pada masing-masing sektor harus memenuhi persamaan yang berlaku untuk NAD.
 - Pinjaman Neto (0300) = Tabungan Bruto (0100) - Pembentukan Modal Tetap atau Perolehan Harta Nonfinansial (0200).
 - Investasi Finansial Neto (0500) = Jumlah Penggunaan Finansial (0600) - Jumlah Sumber Finansial (0700).
 - Selisih Statistik (0400) = Pinjaman Neto (0300) - Investasi Finansial Neto (0500). Tetapi karena dalam NAD Indonesia ada beberapa sektor yang datanya sangat lemah atau bahkan tidak tersedia sama sekali maka selisih statistik ditiadakan, sehingga Pinjaman Neto = Investasi Finansial Neto.
 - Jumlah Penggunaan Finansial (0600) merupakan jumlah seluruh penggunaan dana dari berbagai instrumen finansial di kolom penggunaan.
 - Jumlah Sumber Finansial (0700) merupakan jumlah seluruh sumber dana dari berbagai instrumen finansial di kolom sumber.

- ii. Konsistensi data dari berbagai sumber terutama pada tingkat makro juga harus dijaga. Secara nasional, data penyusutan barang modal, tabungan neto, pembentukan modal tetap dan perubahan stok yang diperoleh dari hasil perhitungan NAD sedikit berbeda dengan hasil perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu seluruh angka makro tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan angka-angka PDB. Dalam praktek, penyesuaian dilakukan dengan mengalokasikan perbedaan nilai dari kedua perhitungan di atas ke sektor-sektor yang tingkat ketelitian dan cakupan datanya masih lemah. Sebaliknya hasil perhitungan dari sektor-sektor yang tingkat ketelitiannya tinggi tetap dipertahankan.
- ii. Perilaku setiap jenis instrumen finansial di dalam NAD juga harus mendapat perhatian. Instrumen finansial seperti uang, giro, deposito, kredit dagang, dan kredit bank mempunyai karakteristik yang berbeda. Terdapat beberapa instrumen yang hanya dapat ditransaksikan oleh sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh giro (1022), di sisi sumber hanya boleh diisikan di sektor keuangan. Di dalam rekonsiliasi, seluruh data untuk kategori transaksi yang bersumber dari Bank Indonesia tidak mengalami penyesuaian. Sedangkan sektor-sektor yang terkena alokasi berdasarkan data Bank Indonesia tersebut, isian aslinya mungkin saja diubah untuk menjaga keseimbangan dan kelayakan masing-masing instrumen finansial.

3.3.4 Masalah dalam Proses Penyusunan

Seperti telah dijelaskan, data yang digunakan untuk penyusunan NAD diperoleh dari sumber yang sangat beragam. Data tersebut umumnya dalam bentuk neraca akhir tahun baik yang sudah dikonsolidasikan maupun yang masih berbentuk neraca individu perusahaan. Masalah utama yang dihadapi dalam proses penyusunan adalah pada saat mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode transaksi NAD. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kandungan dan makna dari setiap pos neraca tersebut. Begitu pula penggunaan istilah dan kekhususan dari setiap pos neraca yang dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses untuk mempelajari dan memahami setiap neraca individu ini cukup memakan waktu.

Masalah kedua adalah seringkali terjadi pos-pos dalam neraca ini kurang didukung oleh keterangan yang memadai, bahkan disajikan dalam bentuk kelompok besarnya saja

(tidak rinci). Kondisi ini sangat menyulitkan proses transformasi dari pos-pos neraca ke kode transaksi NAD serta dapat menyebabkan kekeliruan pemberian kode.

Masalah lainnya adalah belum dibangunnya sistem pengadaan data NAD yang baku dan konsisten pada instansi-instansi terkait, sehingga sering dibutuhkan pengolahan ulang yang bersifat khusus untuk kepentingan penyusunan NAD. Jika sistem ini dapat berjalan maka proses penyusunan dan penyajian NAD dapat lebih dipercepat.

<https://www.bps.go.id>

BAB IV

ANALISIS DESKRIPTIF NERACA ARUS DANA INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas perkembangan beberapa variabel penting yang diturunkan dari matriks Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2003-2008. Pembahasan akan difokuskan pada neraca pembiayaan modal masing-masing sektor serta tinjauan NAD pada periode 2003-2008. Pada bagian lain, diberikan analisis yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana untuk sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) tahun 2008 serta ulasan mengenai *Velocity of Money*.

4.1 Neraca Pembiayaan Sektoral

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaku ekonomi terdiri dari berbagai sektor/institusi yaitu bank, bukan bank, pemerintah, rumah tangga, perusahaan pemerintah, swasta dan luar negeri. Penyajian untuk setiap sektor dalam matriks NAD dibagi menjadi dua kolom yaitu sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial. Melalui neraca pembiayaan modal sektoral tersebut dapat dilihat berbagai sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh setiap sektor dalam perekonomian.

4.1.1 Tabungan Bruto menurut Sektor

Sejak kurun waktu 2003-2008, jumlah tabungan bruto memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 22,33 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2008, dengan nilai pertumbuhan sebesar 39,8 persen. Sektor yang memiliki tabungan bruto terbesar selama periode 2003-2008 adalah subsektor perusahaan dan yang terkecil adalah sektor luar negeri.

Selama periode 2003-2008 sektor bukan keuangan memiliki peranan yang dominan dalam pembentukan tabungan bruto dibandingkan dengan sektor keuangan maupun sektor luar negeri. Hal ini terlihat pada tabel 4.2, dimana nilai kontribusi sektor bukan keuangan terhadap pembentukan tabungan bruto rata-rata mencapai 94,43 persen.

Peranan sektor bukan keuangan dalam pembentukan tabungan bruto mencapai persentase tertinggi pada tahun 2005, yaitu sebesar 99,8 persen terhadap total tabungan

bruto. Sedangkan peranan sektor bukan keuangan terhadap pembentukan tabungan bruto yang terendah terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 85,02 persen dari total pembentukan tabungan bruto. Kondisi tersebut dikarenakan adanya krisis global yang juga mempengaruhi perekonomian Indonesia.

**TABEL 4.1. TABUNGAN BRUTO MENURUT SEKTOR
TAHUN 2003-2008 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007 ^{*)}	2008 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	492,28	505,62	737,22	832,94	953,74	1.166,72
1. Pemerintah	104,99	101,86	108,81	181,08	179,12	238,58
2. Perusahaan	278,14	265,16	436,64	471,60	533,27	454,22
2.1 Pemerintah	53,13	83,93	3,83	3,71	40,59	64,48
2.2 Swasta ⁺)	225,01	181,22	432,80	467,89	492,68	389,74
3. Rumah Tangga	109,15	138,61	191,77	180,26	241,34	473,92
B. KEUANGAN	93,56	74,05	73,45	53,68	28,64	91,07
4. Bank ⁺⁺⁾	92,58	70,59	62,65	44,87	9,26	68,77
5. Bukan Bank	0,98	3,46	10,80	8,82	19,39	22,29
C. LUAR NEGERI	-70,37	-27,38	-71,94	-38,46	2,78	119,46
6. Luar Negeri	-70,37	-27,38	-71,94	-38,46	2,78	119,46
TOTAL	515,47	552,29	738,73	848,17	985,16	1.377,25

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial dan koperasi

++) termasuk Bank Sentral

Peranan subsektor pemerintah dalam pembentukan tabungan bruto relatif berfluktuatif. Pada tahun 2003 peranannya mencapai 20,37 persen. Pada tahun 2004, peranan tersebut mengalami penurunan menjadi 18,44 persen, dan kembali menurun hingga mencapai 14,73 persen pada tahun 2005. Penurunan tersebut disebabkan karena besarnya tekanan peningkatan belanja negara sebagai dampak dari tingginya harga minyak dunia sejak tahun 2004 yang mengakibatkan kenaikan subsidi BBM. Disamping itu berbagai kejadian bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu tersebut juga meningkatkan pengeluaran pemerintah, terutama untuk merestrukturisasi daerah-daerah yang terkena bencana. Pada tahun 2006, peranan pemerintah dalam pembentukan tabungan bruto kembali meningkat menjadi 21,35 persen. Meskipun secara umum kondisi perekonomian di tahun 2006 relatif belum stabil pasca kenaikan BBM di tahun 2005 (yang mencapai rata-rata 126 persen), akan tetapi pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan tetapnya yang berasal dari penerimaan pajak maupun non pajak serta peningkatan hibah. Pada tahun 2007 dan 2008, tabungan bruto pemerintah mengalami

penurunan menjadi 18,18 persen dan 17,32 persen yang disebabkan oleh percepatan pembayaran utang ke IMF.

**TABEL 4.2. STRUKTUR TABUNGAN BRUTO MENURUT SEKTOR
TAHUN 2003-2008 (Persen)**

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007 ^{*)}	2008 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	95,50	91,55	99,80	98,21	96,81	85,02
1. Pemerintah	20,37	18,44	14,73	21,34	18,18	17,32
2. Perusahaan	53,96	48,01	59,11	55,62	54,13	33,28
2.1 Pemerintah	10,31	15,20	0,52	0,44	4,12	4,68
2.2 Swasta ⁺⁾	43,65	32,81	58,59	55,18	50,01	28,60
3. Rumah Tangga	21,17	25,10	25,96	21,25	24,50	34,41
B. KEUANGAN	18,15	13,41	9,94	6,33	2,91	6,31
4. Bank ⁺⁺⁾	17,96	12,78	8,48	5,29	0,94	4,99
5. Bukan Bank	0,19	0,63	1,46	1,04	1,97	1,31
C. LUAR NEGERI	-13,65	-4,96	-9,74	-4,53	0,28	8,67
6. Luar Negeri	-13,65	-4,96	-9,74	-4,53	0,28	8,67
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dan koperasi

++)Termasuk Bank Sentral

Peranan sektor bukan keuangan yang lain yaitu perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta terhadap pembentukan tabungan bruto selama periode 2003-2008 juga berfluktuasi. Subsektor perusahaan (swasta dan pemerintah) pada tahun 2003 memberikan andil sebesar 53,96 persen terhadap total pembentukan tabungan bruto. Masing-masing disumbangkan oleh perusahaan pemerintah sebesar 10,31 persen dan perusahaan swasta sebesar 43,65 persen. Pada tahun 2004 peranan subsektor perusahaan terhadap pembentukan total tabungan bruto mengalami penurunan, yaitu 48,01 persen. Dengan demikian peran perusahaan pemerintah naik menjadi 15,20 persen dan peranan perusahaan swasta turun menjadi 32,81 persen.

Peranan subsektor perusahaan terhadap pembentukan tabungan bruto kembali mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi di tahun 2005, yaitu sebesar 59,11 persen. Begitu pula dengan peranan perusahaan swasta yang juga meningkat sebesar 58,59 persen. Sedangkan peranan perusahaan pemerintah mengalami penurunan menjadi sebesar 0,52 persen.

Peranan tabungan bruto sektor rumah tangga pada periode tahun 2003-2008 mengalami kecenderungan stabil dengan kisaran 20-30 persen. Pada tahun 2003 peranan rumah tangga mencapai 21,17 persen dan meningkat menjadi 25,10 persen di tahun 2004.

Namun peranannya kembali menurun pada tahun 2005, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan BBM. Peranan tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2007 serta mencapai puncaknya pada tahun 2008 dimana kontribusi mencapai 34,41 persen.

Pada sektor keuangan (bank dan bukan bank) peranannya terhadap pembentukan tabungan bruto relatif kecil dibandingkan peranan sektor bukan keuangan. Pada tahun 2003, peranan sektor keuangan terhadap pembentukan tabungan bruto hanya sebesar 18,15 persen, dengan kontribusi subsektor bank sebesar 17,96 persen dan kontribusi subsektor bukan bank sebesar 0,19 persen. Peranan sektor keuangan terus mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 2,91 persen pada tahun 2007, seiring dengan penurunan peranan bank menjadi sebesar 0,94 persen pada tahun 2007. Penurunan peranan bank terhadap pembentukan tabungan bruto disebabkan adanya penurunan jumlah bank yang beroperasi. Sedangkan peranan sektor keuangan bukan bank cenderung relatif stabil.

Di sisi lain sektor luar negeri mengalami tabungan bruto yang negatif pada tahun 2007-2008. Selama kurun waktu 2003-2005, kontribusi sektor ini terhadap pembentukan tabungan bruto berkisar antara minus 13,65 persen hingga minus 4,53 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembayaran hutang Indonesia ke luar negeri masih lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diterima Indonesia dari luar negeri.

TABEL 4.3. STRUKTUR TABUNGAN BRUTO MENURUT SEKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2003-2008 (Persen)

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007 ^{*)}	2008 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	24,45	22,02	26,57	24,95	24,15	23,64
1. Pemerintah	5,21	4,44	3,92	5,42	4,54	4,82
2. Perusahaan	13,81	11,55	15,74	14,13	13,50	9,25
2.1 Pemerintah	2,64	3,66	0,14	0,11	1,03	1,30
2.2 Swasta ⁺⁾	11,17	7,89	15,60	14,02	12,47	7,95
3. Rumah Tangga	5,42	6,04	6,91	5,40	6,11	9,57
B. KEUANGAN	4,65	3,23	2,65	1,61	0,73	1,75
4. Bank ⁺⁺⁾	4,60	3,07	2,26	1,34	0,23	1,39
5. Bukan Bank	0,05	0,15	0,39	0,26	0,49	0,37
C. LUAR NEGERI	-3,49	-1,19	-2,59	-1,15	0,07	2,41
6. Luar Negeri	-3,49	-1,19	-2,59	-1,15	0,07	2,41
TOTAL	25,60	24,06	26,63	25,40	24,95	27,80
Produk Domestik Bruto/PDB (Miliar Rp)	2 013 675	2 295 826	2 774 281	3 339 217	3 949 321	4 954 028

*) angka sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dan koperasi

**) angka sangat sementara

++)Termasuk Bank Sentral

Tabel 4.3 memperlihatkan persentase dari struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor. Secara keseluruhan persentasenya cenderung berfluktuatif, dimana hanya mengalami peningkatan pada tahun 2005 dan 2008.

Persentase terbesar dari struktur tabungan bruto terhadap PDB pada periode 2003-2008 dilakukan oleh sektor bukan keuangan. Persentase struktur tabungan terhadap PDB pada subsektor pemerintah cukup berfluktuatif dalam periode tersebut. Persentase terkecil terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 3,92 persen, sedangkan persentase yang terbesar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 5,42 persen. Peningkatan pada tahun 2006 tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan negara serta didukung dengan perkembangan penerimaan non pajak yang juga meningkat.

Sementara persentase terbesar dilakukan oleh subsektor perusahaan (swasta dan pemerintah). Pada tahun 2004 persentasenya sebesar 11,55 persen, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 13,81 persen. Pada tahun 2005 persentasenya kembali meningkat menjadi 15,74 persen (tertinggi selama periode 2003-2008). Namun kemudian persentasenya kembali menurun. Pada tahun 2008, persentasenya hanya sebesar 9,25 persen, dimana perusahaan pemerintah persentasenya hanya sebesar 1,30 persen sedangkan perusahaan swasta sebesar 7,95 persen. Selama periode tersebut persentase dari struktur tabungan bruto terhadap PDB perusahaan swasta selalu lebih besar dibandingkan persentase dari perusahaan pemerintah.

Persentase dari struktur tabungan bruto terhadap PDB dari subsektor rumah tangga dalam kurun waktu 2003-2007 relatif stabil, yaitu berada pada kisaran 5,42 persen hingga 6,91 persen, tetapi pada tahun 2008 persentasenya mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 9,57 persen.

Persentase dari struktur tabungan bruto terhadap PDB sektor keuangan selama periode 2003-2008 berada pada kisaran 0,73 persen hingga 4,65 persen. Jika dilihat per sektor, maka subsektor bank selama periode tersebut persentasenya relatif lebih besar dibandingkan subsektor bukan bank. Pada tahun 2003 persentasenya 4,60 persen, dan ini merupakan persentase terbesar selama periode tersebut. Sementara pada periode yang sama, persentase dari subsektor bukan bank hanya sebesar 0,05 persen.

Struktur tabungan bruto sektor luar negeri terhadap PDB selama kurun waktu 2003-2006 selalu negatif, sedangkan selama tahun 2007-2008 mulai menunjukkan angka yang positif dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan nilai kontribusi sebesar 2,41 persen.

4.1.2 Investasi Non-Finansial Menurut Sektor

Pola perkembangan yang ditunjukkan oleh investasi non finansial secara nasional akan sama dengan pola perkembangan tabungan bruto. Hal itu sesuai dengan teori ekonomi makro yang menyatakan bahwa tabungan akan sama dengan investasi. Akan tetapi pola tersebut akan berbeda jika dilihat secara sektoral. Selama kurun waktu 2003-2008 investasi non finansial secara nasional memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 22,33 persen (lihat tabel 4.4).

**TABEL 4.4. INVESTASI NON FINANSIAL MENURUT SEKTOR
TAHUN 2003 -2008 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007 ^{*)}	2008 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	506,38	549,03	732,82	843,47	981,80	1.367,98
1. Pemerintah	82,56	76,44	90,21	113,72	123,89	181,31
2. Perusahaan	400,17	398,27	609,18	698,33	696,15	1.000,14
2.1 Pemerintah	82,65	147,62	70,46	78,01	75,51	114,54
2.2 Swasta ^{+))}	317,52	250,65	538,73	620,32	620,64	885,60
3. Rumah Tangga	23,64	74,32	33,43	31,42	161,77	186,53
B. KEUANGAN	9,10	3,27	5,91	4,70	3,36	9,27
4. Bank ⁺⁺⁾	8,02	2,95	4,87	3,13	3,16	6,33
5. Bukan Bank	1,08	0,32	1,04	1,57	0,20	2,94
C. LUAR NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	515,47	552,29	738,73	848,17	985,16	1.377,25

^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

^{+))} terdiri dari perusahaan swasta non finansial dan koperasi

⁺⁺⁾ termasuk Bank Sentral

Struktur investasi non finansial menurut sektor (bukan keuangan, keuangan, dan luar negeri) disajikan pada tabel 4.5. Berdasarkan tabel 4.5, selama periode 2003-2008 kegiatan investasi non finansial secara nasional didominasi oleh sektor bukan keuangan. Dari total investasi non finansial yang dilakukan oleh seluruh sektor, secara rata-rata sebesar 99,21 persen dilakukan oleh sektor bukan keuangan. Sisanya sebesar 0,79 persen dilakukan oleh sektor keuangan. Selama periode 2003-2008 pula kontribusi sektor bukan keuangan terhadap investasi non finansial secara umum mengalami peningkatan.

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu meningkat sebesar 39,33 persen. Namun, kontribusi sektor ini terhadap total investasi non finansial pada tahun 2008 mengalami penurunan dari 99,66 persen menjadi 99,33 persen. Penurunan itu diakibatkan oleh adanya penurunan kontribusi subsektor rumah tangga terhadap investasi non finansial.

**TABEL 4.5. STRUKTUR INVESTASI NON FINANSIAL MENURUT SEKTOR
TAHUN 2003- 2008 (persen)**

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007 ^{*)}	2008 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	98.24	99.41	99.20	99.45	99.66	99.33
1. Pemerintah	16.02	13.84	12.21	13.41	12.58	13.16
2. Perusahaan	77.63	72.11	82.46	82.33	70.66	72.62
2.1. Pemerintah	16.03	26.73	9.54	9.20	7.66	8.32
2.2. Swasta⁺⁾	61.60	45.38	72.93	73.14	63.00	64.30
3. Rumah Tangga	4.59	13.46	4.52	3.70	16.42	13.54
B. KEUANGAN	1.76	0.59	0.80	0.55	0.34	0.67
4. Bank⁺⁺⁾	1.56	0.53	0.66	0.37	0.32	0.46
5. Bukan Bank	0.21	0.06	0.14	0.18	0.02	0.21
C. LUAR NEGERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah investasi non finansial (Miliar Rp)	515.470	552.292	738.726	848.168	985.161	1.377.247

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dan koperasi

++)Termasuk Bank Sentral

Pada sektor bukan keuangan, perusahaan merupakan subsektor yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pemerintah dan rumah tangga. Secara rata-rata kontribusi perusahaan terhadap investasi non finansial nasional sebesar 76,3 persen, sedangkan kontribusi sektor lainnya hanya sebesar 13,54 persen (pemerintah), dan 9,37 persen (rumah tangga).

Pada subsektor perusahaan selama periode 2003-2008, perusahaan swasta memberikan kontribusi paling besar terhadap investasi non finansial nasional dibandingkan dengan perusahaan pemerintah bahkan dibandingkan dengan pemerintah dan rumah tangga. Subsektor perusahaan pada perusahaan pemerintah selama 2003-2008 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 17,11 persen meskipun sempat mengalami penurunan sebesar Rp66,875 triliun pada tahun 2004.

Kontribusi sektor keuangan terhadap investasi non finansial nasional tidak terlalu signifikan. Bahkan selama periode 2003-2008, rata-rata kontribusi sektor itu tidak mencapai 1 persen meskipun pada tahun 2003 kontribusinya sempat melebihi 1 persen.

Minimnya investasi non finansial yang dilakukan sektor keuangan dikarenakan investasi yang dilakukan oleh sektor ini sebagian besar adalah dalam bentuk investasi finansial seperti giro, deposito, surat berharga (saham dan obligasi) swasta, surat utang negara, dan sebagainya. Kontribusi subsektor bank secara rata-rata lebih besar daripada subsektor bukan bank. Namun secara rata-rata pertumbuhan investasi non finansial pada subsektor bukan bank lebih tinggi daripada subsektor bank. Hal itu disebabkan oleh adanya peningkatan investasi non finansial yang cukup signifikan pada subsektor bukan bank yang mencapai 1.377,13 persen pada tahun 2008. Sedangkan pada subsektor bank, pertumbuhan investasi non finansialnya selama periode 2003-2008 paling besar hanya 100,38 persen.

Investasi non finansial pada sektor luar negeri tidak dicatat dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan karena kegiatan investasi non finansial hanya mencakup kegiatan yang terjadi di dalam negeri.

TABEL 4.6. STRUKTUR INVESTASI NON FINANSIAL MENURUT SEKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2003 - 2008 (persen)

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007 ^{*)}	2008 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	25.15	23.91	26.41	25.26	24.86	27.61
1. Pemerintah	4.10	3.33	3.25	3.41	3.14	3.66
2. Perusahaan	19.87	17.35	21.96	20.91	17.63	20.19
2.1. Pemerintah	4.10	6.43	2.54	2.34	1.91	2.31
2.2. Swasta ⁺⁾	15.77	10.92	19.42	18.58	15.72	17.88
3. Rumah Tangga	1.17	3.24	1.20	0.94	4.10	3.77
B. KEUANGAN	0.45	0.14	0.21	0.14	0.09	0.19
4. Bank ⁺⁺⁾	0.40	0.13	0.18	0.09	0.08	0.13
5. Bukan Bank	0.05	0.01	0.04	0.05	0.01	0.06
C. LUAR NEGERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	25.60	24.06	26.63	25.40	24.95	27.80
Produk Domestik Bruto /PDB (Miliar Rp)	2.013.675	2.295.826	2.774.281	3.339.217	3.949.321	4.954028

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dan koperasi

++)Termasuk Bank Sentral

Pada tabel 4.6 terlihat bahwa persentase dari struktur investasi non finansial terhadap PDB selama periode tahun 2003-2008 berkisar antara 24,06 persen hingga 27,8 persen. Secara umum selama periode tersebut persentasenya cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 25,74 persen. Dalam kurun waktu 2003-2008, persentase dari struktur investasi non finansial terhadap PDB paling besar terjadi pada tahun 2008, persentase terendah terjadi pada tahun 2004. Jika dibandingkan dengan tahun 2003,

persentase tahun 2004 itu mengalami penurunan. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya pembentukan investasi fisik dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama periode 2003-2008, sektor bukan keuangan mempunyai persentase struktur investasi non finansial terhadap PDB yang paling dominan khususnya pada subsektor perusahaan yang didominasi oleh perusahaan swasta. Persentasenya mempunyai rata-rata sebesar 25,53 persen sedangkan persentasenya pada sektor keuangan rata-rata hanya sebesar 0,2 persen. Pada sektor bukan keuangan, subsektor yang mempunyai persentase yang paling besar adalah subsektor perusahaan. Persentasenya rata-rata sebesar 19,65 persen sedangkan pada pemerintah dan rumah tangga persentasenya hanya sebesar 3,48 persen dan 2,4 persen. Persentase dari struktur investasi non finansial terhadap PDB dari sektor perusahaan yang tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu mencapai 21,96 persen, dimana sebesar 19,42 persen disumbangkan oleh perusahaan swasta dan sisanya 2,54 persen dari perusahaan pemerintah.

Sementara itu, selama periode 2003-2008 persentase dari struktur investasi non finansial terhadap PDB dari sektor keuangan berkisar antara 0,09 persen hingga 0,45 persen. Subsektor bank mempunyai persentase yang besar dibandingkan subsektor bukan bank. Persentase subsektor bank mempunyai rata-rata sebesar 0,17 persen sedangkan pada subsektor bukan bank hanya sebesar 0,04 persen.

4.1.3 Struktur Pinjaman Neto menurut Sektor

Pinjaman neto menggambarkan besaran selisih (kesenjangan) antara tabungan bruto terhadap investasi non finansial (investasi fisik) atau kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*net lending*) maupun memperoleh hutang dari sektor lain (*net borrowing*) dalam membiayai investasi non finansial pada suatu sektor dalam NAD. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas perkembangan struktur pinjaman neto masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode 2003-2008

a. Sektor Keuangan

Struktur pinjaman neto terhadap PDB pada sektor keuangan selama 2003-2008 selalu positif. Pada tahun 2003, persentasenya relatif besar dibandingkan periode berikutnya yaitu sebesar 4,19 persen. Namun, setelah tahun 2003 persentasenya menurun cukup signifikan, seperti yang terjadi selama tahun 2004-2008 dimana persentasenya berkisar antara 0,64 persen hingga 3,08 persen. Persentase yang positif pada sektor ini

menunjukkan bahwa sektor ini masih tetap memiliki kelebihan (surplus) dana yang dapat menjadi potensi bagi penggerak dunia usaha di periode tersebut.

TABEL 4.7. STRUKTUR PINJAMAN NETO MENURUT SEKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2003-2008 (persen)

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007 ^{*)}	2008 ^{**)}
A. BUKAN KEUANGAN	-0,70	-1,89	0,16	-0,32	-0,71	-3,98
1 Pemerintah	1,11	1,11	0,67	2,02	1,40	1,16
2 Perusahaan	-6,06	-5,80	-6,22	-6,79	-4,12	-10,94
2.1 Pemerintah	-1,47	-2,77	-2,40	-2,23	-0,88	-1,01
2.2 Swasta ⁺⁾	-4,59	-3,02	-3,82	-4,56	-3,24	-9,92
3 Rumah Tangga	4,25	2,80	5,71	4,46	2,01	5,80
B. KEUANGAN	4,19	3,08	2,43	1,47	0,64	1,57
4 Bank ⁺⁺⁾	4,20	2,95	2,08	1,25	0,15	1,26
5 Bukan Bank	0,00	0,14	0,35	0,22	0,49	0,31
C. LUAR NEGERI	-3,49	-1,19	-2,59	-1,15	0,07	2,41
6 Luar Negeri	-3,49	-1,19	-2,59	-1,15	0,07	2,41
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produk Domestik Bruto /PDB (Miliar Rp.)	2.013.675	2.295.826	2.774.281	3.339.217	3.949.321	4.954.028

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dan koperasi

++)Termasuk Bank Sentral

b. Sektor Bukan Keuangan

Struktur pinjaman neto terhadap PDB pada sektor bukan keuangan persentasenya relatif berfluktuatif. Persentase sektor ini mengalami defisit di tahun 2003 dan tahun 2004 sebesar minus 0,70 persen dan minus 1,89 persen. Namun pada tahun 2005 persentasenya meningkat menjadi sebesar 0,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor riil pada tahun 2005 tidak begitu banyak melakukan ekspansi pada investasi fisik. Namun. Pada taun 2006 hingga 2008 persentase struktur pinjaman neto terhadap PDB sektor ini kembali negatif yaitu antara minus 0,32 persen hingga 3,98 persen.

c. Sektor Luar Negeri

Struktur pinjaman neto sektor luar negeri terhadap PDB selama periode 2003 hingga 2006 persentasenya selalu negatif. Hingga tahun 2006 persentase negatif yang dialami sektor ini relatif semakin mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini semakin mengurangi kegiatan investasi non finansialnya serta mengindikasikan telah terjadinya *capital inflow*. Namun selama tahun 2007-2008 sektor ini mengalami surplus atau *net lending* yaitu sebesar Rp2,78 triliun dan Rp119,46 triliun atau sebesar 0,07 persen dan 2,41 persen terhadap PDB.

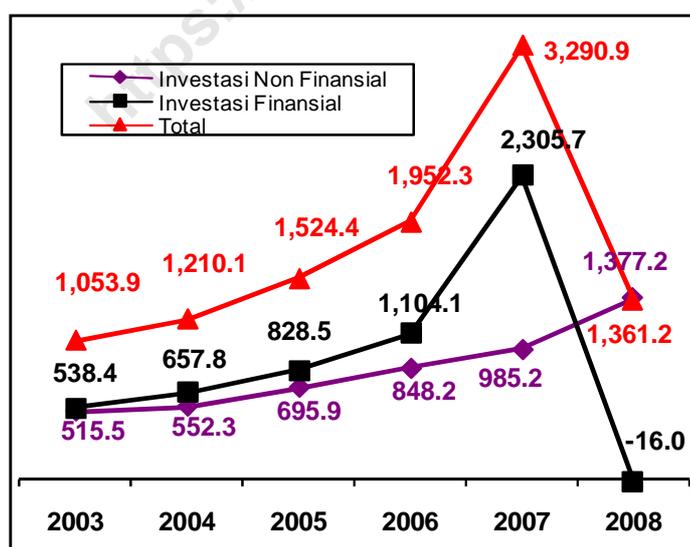
4.2 Tinjauan Ekonomi Indonesia berdasarkan NAD 2008

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2008 menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun pada akhir-akhir tahun mulai terpengaruh dampak dari krisis global yang menurunkan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun masih cukup tinggi yaitu di atas 6 persen, inflasi per triwulan sekitar 4 persen tetapi di triwulan IV mengalami deflasi minus 0,02 persen, nilai tukar rupiah yang relatif stabil pada kisaran dibawah Rp10.000 per US\$, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada di atas 2.000.

4.2.1. Investasi

Perkembangan investasi selama tahun 2003-2008 dapat dilihat pada gambar 4.1. Investasi yang dimaksud disini adalah investasi non finansial dan investasi finansial. Investasi non finansial digambarkan melalui terciptanya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan kenaikan (perubahan) inventori. Sedangkan investasi finansial digambarkan melalui kegiatan dari para pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi dipasar modal dan pasar uang melalui instrumen finansial.

Gambar 4.1. Perkembangan Investasi Tahun 2003 – 2008



Dari gambar 4.1.diatas dapat dilihat sejak tahun 2003-2008 investasi non finansial menunjukkan tren yang terus meningkat, meskipun peningkatannya terjadi secara gradual. Sedangkan investasi finansial mengalami lonjakan yang cukup tajam

di tahun 2007, tetapi pada tahun berikutnya investasi ini mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun sebelumnya.

Sedangkan kondisi investasi non finansial tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan penambahannya dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang selalu meningkat. Namun porsi dari investasi ini terhadap total investasi semakin lama semakin menurun. Pada tahun 2002 persinya mencapai 51,10 persen tetapi pada tahun 2007 persinya hanya mencapai 29,91 persen.

4.2.2. *Pinjaman Neto*

Sepanjang tahun 2008 subsektor bisnis/swasta non finansial terlihat sangat aktif dalam melakukan ekspansi bisnisnya dibandingkan perusahaan pemerintah (BUMN). Hal ini bisa dilihat dari kebutuhan investasi non finansialnya yang sangat besar yaitu sekitar Rp886 triliun sedangkan perusahaan pemerintah hanya Rp114 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan investasinya, kedua bisnis non finansial tersebut hanya memiliki dana internal dalam bentuk tabungan brutonya sebesar Rp692 triliun untuk bisnis swasta dan Rp64 triliun untuk perusahaan pemerintah sehingga kedua perusahaan tersebut membutuhkan tambahan dana atau *net borrowing* sebesar Rp294 triliun dan Rp50 triliun masing masing untuk perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah. Sedangkan sektor lain merupakan sektor yang mengalami kelebihan dana atau *net lending* dan siap digunakan untuk kegiatan investasi yang dilakukan oleh sektor bisnis atau perusahaan. Sektor luar negeri merupakan penyumbang terbesar atau sekitar Rp119 triliun untuk menutup kebutuhan investasi kedua perusahaan tersebut. Selain sektor luar negeri, sektor lainnya yang juga berperan dalam menyalurkan kelebihan likuiditasnya adalah rumah tangga dan lembaga keuangan baik bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank masing-masing sebesar Rp89 triliun dan Rp78 triliun, sedangkan pemerintah menyumbang sekitar Rp57 triliun.

4.2.3. *Perkembangan Beberapa Instrumen Finansial*

Selama tahun 2008 beberapa instrumen finansial mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini terkait dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dan pola pembiayaan berbagai investasi non finansial yang dilakukan oleh masing-masing sektor. Selama tahun 2008 terjadi peningkatan total instrumen finansial sebesar lebih dari Rp561 triliun. Peningkatan terbesar terjadi pada peningkatan jumlah kredit sebesar Rp765

triliun, uang dan simpanan sebesar Rp446 triliun dan kredit dagang sebesar Rp384 triliun. Sedangkan modal saham dan penyertaan, rekening antar bank dan rupa-rupa mengalami penurunan masing-masing sebesar minus Rp725 triliun, minus Rp115 triliun dan minus Rp310 triliun. Sementara itu, instrumen finansial lainnya mengalami peningkatan yang relatif kecil seperti klaim dalam valas lainnya, surat berharga jangka pendek dan menengah, serta surat berharga jangka panjang.

Peningkatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank-bank di luar negeri baik individu maupun secara konsorsium pada sebagian proyek-proyek di tanah air bisa dilihat dari peningkatan nilai kredit dari sektor tersebut sebesar Rp369 triliun yang sebagian besar dalam bentuk valas. Jumlah tersebut lebih besar dari yang dikeluarkan oleh bank-bank di dalam negeri yang mengalami peningkatan sebesar Rp318 triliun yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, serta lembaga keuangan lain seperti perusahaan pembiayaan sebesar Rp32 triliun yang umumnya berupa kredit konsumsi. Di sisi lain, rumah tangga juga menyalurkan kredit informal sebesar Rp15 triliun. Sebagian besar dari peningkatan jumlah kredit yang telah dikeluarkan di tahun 2008 diserap oleh sektor bisnis sebesar Rp358 triliun, rumah tangga sebesar Rp189 triliun dan pemerintah sebesar Rp142 triliun. Kredit modal kerja dan kredit konsumsi menempati porsi terbesar dari seluruh kredit yang telah dikeluarkan, sedangkan kredit investasi porsinya relatif kecil yaitu sekitar Rp79 triliun (Rp59 triliun dalam nominal rupiah dan Rp20 triliun dalam valas) atau sekitar 10 persen dari total kredit yang telah dikeluarkan yaitu sebesar Rp765 triliun. Minimnya kredit investasi akan berakibat pada kurang optimalnya peran kredit pada perekonomian karena kredit investasi mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar dibandingkan jenis kredit yang lain. Hal ini seiring dengan mulai melemahnya perekonomian domestik sebagai dampak dari lesunya perekonomian dunia akibat dari krisis global yang dampaknya mulai terasa semenjak semester kedua di tahun 2008.

Sebagai sektor surplus rumah tangga dan pemerintah masih mendominasi dalam peningkatan jumlah uang dan simpanan sepanjang tahun 2008. Hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan uang dan simpanan di kedua sektor tersebut masing-masing sebesar Rp181 triliun dan Rp115 triliun dari seluruh peningkatan jenis instrumen finansial ini sebesar Rp446 triliun. Rumah tangga sebagian besar menempatkan hartanya dalam bentuk deposito berjangka bernominal rupiah sedangkan pemerintah lebih cenderung menempatkan dananya dalam bentuk giro baik dalam mata uang rupiah maupun valas.

Sektor lainnya yang juga meningkatkan jumlah simpanannya adalah sektor perbankan dan sektor bisnis. Walaupun kedua sektor tersebut masih dibawah rumah tangga dan pemerintah, tapi peningkatannya relatif besar masing-masing sebesar Rp75 triliun untuk sektor perbankan dan Rp 78 triliun untuk sektor bisnis. Tidak seperti rumah tangga dan pemerintah yang lebih cenderung menempatkan dananya dalam mata uang rupiah, sektor perbankan dan bisnis lebih banyak menempatkan uang dan simpanannya dalam valas. Hal ini lebih dikarenakan pada akhir tahun 2008 beberapa mata uang asing mengalami apresiasi.

Instrumen lainnya yang juga mengalami peningkatan di tahun 2008 diantaranya surat-surat berharga baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang serta kredit dagang dan klaim dalam valas lainnya. Sektor bank merupakan institusi terbesar yang mengeluarkan instrumen surat-surat berharga jangka pendek, menengah dan klaim dalam valas lainnya. Hal ini disebabkan pada saat itu bisnis perbankan dalam situasi tertekan akibat dari pengaruh krisis global di akhir-akhir tahun 2008 sehingga bank mengurangi porsi instrumen finansial jangka panjangnya. Sektor bisnis dan luar negeri merupakan pengguna terbesar dari kedua instrumen finansial tersebut sebagai sumber dananya. Sementara itu untuk surat-surat berharga jangka panjang, peran sektor luar negeri terlihat lebih dominan dalam membelanjakan aset-asetnya di instrumen ini dibandingkan dengan sektor yang lain. Pengguna utama untuk instrumen surat berharga jangka panjang ini adalah sektor pemerintah dan bank sentral. Kedua sektor tersebut masing-masing mengalami peningkatan surat-surat berharga jangka panjang masing-masing sebesar Rp50 triliun dan Rp13 triliun.

4.3 Tinjauan NAD Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2008

Dengan pertimbangan bahwa peran intermediasi LKBB yang cukup strategis dan berpotensi dalam mempengaruhi terjadinya transaksi finansial secara keseluruhan, maka dalam tulisan ini akan dianalisis arus dana sektor LKBB khususnya yang terjadi selama tahun 2008.

Pada Tabel 15 (yang disajikan pada lampiran) ditunjukkan bahwa dalam tahun 2008, secara total LKBB mengalami *net lending* sebesar Rp15.668 miliar. Namun, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, *net lending* yang tercipta pada tahun 2008 ini turun 18,3 persen. Menurunnya *net lending* LKBB yang terjadi pada tahun 2008

tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penambahan tabungan bruto sebesar 4,0 persen menjadi sebesar Rp18.608 miliar. Meskipun pada saat yang sama investasi non finansial LKBB juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 1.378,9 persen menjadi sebesar Rp2.939 miliar. Penurunan penambahan tabungan bruto dan peningkatan investasi non finansial LKBB ini diduga karena terjadinya penurunan beberapa suku bunga perbankan. Di samping itu, sebagian investasi finansial LKBB yang sebelumnya lebih banyak berupa uang dan simpanan, secara perlahan mulai dialihkan dalam bentuk investasi nonfinansial seperti pembelian bangunan atau aset tak bergerak lainnya.

Jika diamati dari kinerja sektoralnya, *net lending* yang terjadi pada LKBB di tahun 2008 ini lebih banyak disebabkan oleh *net lending* yang terjadi pada sektor perusahaan dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan perusahaan pegadaian, masing-masing sebesar Rp7.982 miliar, Rp4.591 miliar, Rp2.658 miliar, dan Rp436 miliar. Pada tahun 2008, semua sektor tersebut mengalami penurunan *net lending*, kecuali sektor perusahaan pembiayaan dan pegadaian yang mengalami peningkatan *net lending* masing-masing sebesar 44,0 persen dan 29,6 persen. Sektor asuransi mengalami penurunan *net lending* tertinggi, sebesar 61,7 persen, diikuti perusahaan dana pensiun sebesar 8,5 persen. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian Indonesia yang tumbuh melambat sebagai imbas krisis global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008. Kondisi ini turut berdampak terhadap sektor-sektor LKBB sehingga tidak mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai bagian dari upaya ekspansi kegiatan ekonominya, di samping meningkatkan investasi riil, LKBB juga melakukan investasi finansial atau penggunaan dana. Instrumen finansial yang paling diminati sektor-sektor LKBB dalam berinvestasi pada tahun 2008 adalah berupa kredit uang (Rp32.385 miliar), surat berharga jangka panjang (Rp17.989 miliar), uang dan simpanan (Rp7.829 miliar), kredit dagang (Rp1.753 miliar), cadangan asuransi dan pensiun (Rp532 miliar), surat berharga jangka pendek dan menengah (Rp68 miliar), dan klaim dalam valas lainnya (Rp10 miliar). Namun, pada saat yang sama, LKBB juga mengalami penurunan penggunaan dana dari transaksi antar bank yang berupa pembelian SBI, yaitu sebesar Rp7.084 miliar. Penurunan tersebut berasal dari menurunnya penggunaan dana pada perusahaan pembiayaan sebesar Rp6.694 miliar. Penggunaan dana untuk modal saham & penyertaan juga mengalami penurunan sebesar

Rp2.242 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan penggunaan dana pada perusahaan asuransi sebesar Rp2.245 miliar. Dengan demikian, keseluruhan investasi finansial LKBB pada tahun 2008 mencapai Rp60.336 miliar atau turun 36,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan instrumen finansial yang paling diminati sektor-sektor LKBB dalam berinvestasi pada tahun 2008, maka instrumen berupa kredit uang paling banyak dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, atau sebesar 90,1 persen dari total penambahan kredit yang diinvestasi oleh LKBB. Pada tahun yang sama, sebesar 68,5 persen dari total penambahan surat berharga jangka panjang dan 88,4 persen dari total penambahan uang dan simpanan yang diinvestasi oleh LKBB dilakukan oleh perusahaan asuransi. Sementara itu, perusahaan dana pensiun merupakan pelaku utama investasi finansial berupa surat berharga jangka pendek dan menengah, atau sebesar 59,1 persen dari total penambahan surat berharga jangka pendek dan menengah yang diinvestasi oleh LKBB.

Bila diamati dari kinerja sektoralnya, investasi finansial LKBB pada tahun 2008 ini lebih banyak disebabkan oleh investasi finansial sektor perusahaan pembiayaan. Pada tahun 2008, di samping menambah investasi fisik senilai Rp1.004 miliar, perusahaan pembiayaan juga telah menambah harta finansialnya sebesar Rp36.843 miliar. Dari sejumlah investasi finansial tersebut, sebesar Rp29.171 miliar adalah berupa kredit uang, Rp1.222 miliar berupa uang dan simpanan, dan Rp13.178 berupa instrumen finansial rupa-rupa. Sementara itu, pada saat yang bersamaan LKBB juga menambah kewajiban finansialnya sebesar Rp32.252 miliar, dengan Rp28.341 miliar adalah berupa kredit (kredit perbankan senilai Rp4.637 miliar dan kredit dalam valas senilai Rp23.704 miliar) serta sebesar Rp2.936 miliar dari penerbitan modal saham & penyertaan di pasar modal dan pasar sekunder. Penambahan kewajiban finansial ini dilakukan untuk memperoleh dana tambahan (selain tabungan bruto perusahaan) dalam membiayai investasi fisik dan investasi finansial perusahaan pembiayaan yang pada tahun 2008 ini meningkat cukup tinggi masing-masing sebesar 29,3 persen dan 119,6 persen dibandingkan tahun 2007.

Dalam melakukan investasi fisik dan investasi finansialnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sektor-sektor LKBB menggunakan pendanaan internal dan eksternal. Selain dari tabungan yang senilai Rp18.608 miliar, sumber terbesar pembiayaan internal LKBB adalah dalam bentuk cadangan asuransi dan pensiun, modal

saham dan penyertaan, dan surat berharga jangka pendek, masing-masing sebesar Rp9.368 miliar, Rp3.118 miliar, dan Rp370 miliar. Sedangkan sumber terbesar pembiayaan eksternal LKBB adalah berupa kredit uang sebesar Rp32.200 miliar, dan kredit dagang sebesar Rp3.976 miliar. Jika dilihat dari aliran dana sektoralnya, tampak bahwa meningkatnya aliran dana eksternal ke LKBB ini merupakan refleksi dari meningkatnya sumber dana eksternal ke semua sektor LKBB. Pada tahun 2008, sumber dana eksternal berupa kredit uang ke perusahaan pembiayaan, perusahaan pegadaian, perusahaan asuransi, dan dana pensiun bertambah masing-masing sebesar Rp28.341, Rp2.880 miliar, Rp977 miliar, dan Rp2 miliar.

Sepanjang tahun 2008, sumber dana internal LKBB dalam bentuk surat berharga jangka panjang justru mengalami penurunan sebesar Rp1.641 miliar, yang disebabkan menurunnya surat berharga jangka panjang ke perusahaan pembiayaan, perusahaan pegadaian, dan perusahaan dana pensiun, masing-masing sebesar Rp1.463 miliar, Rp137 miliar, dan Rp41 miliar. Sementara itu, pada saat yang sama, LKBB juga mengalami penurunan sumber dana berupa klaim dalam valas lainnya sebesar Rp191 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan oleh menurunnya klaim dalam valas lainnya ke perusahaan pembiayaan yang memberikan sumbangan sebesar 99,9 persen atas sumber dana tersebut bagi LKBB.

Dengan penambahan aset finansial sebesar Rp60.336 miliar dan penambahan kewajiban finansial sebesar Rp44.668 miliar, maka investasi finansial neto yang dilakukan oleh sektor-sektor LKBB pada tahun 2008 adalah sebesar Rp15.668 miliar. Investasi finansial neto tersebut besarnya sama dengan pinjaman neto yang merupakan tagihan pada sektor-sektor lain selain LKBB.

Asuransi

Selain melakukan investasi fisik senilai Rp1.873 miliar pada tahun 2008, sektor perusahaan asuransi juga melakukan investasi finansial yang cukup besar setelah sektor perusahaan pembiayaan. Selama periode tersebut, perusahaan asuransi telah menambah aset finansialnya berupa surat berharga jangka panjang sebesar Rp12.321 miliar, serta uang dan simpanan sebesar Rp6.921 miliar. Namun, pada saat bersamaan, perusahaan asuransi juga mengalami penurunan (divestasi) yang cukup besar atas aset finansialnya yaitu berupa modal saham & penyertaan sebesar Rp2.245 miliar. Dengan demikian,

secara keseluruhan investasi finansial yang dilakukan perusahaan asuransi pada tahun 2008 adalah sebesar Rp12.914 miliar atau turun 76,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk membiayai investasi fisik dan investasi finansialnya, perusahaan asuransi (yang tabungan brutonya turun 26,3 persen) memperoleh dana dari peningkatan cadangan asuransi berupa pembayaran premi asuransi dari perusahaan dan rumah tangga sebesar Rp10.237 miliar atau 69,2 persen dari total pembiayaannya. Namun, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besarnya peningkatan dana premi asuransi ini turun 69,8 persen.

Dana Pensiun

Perusahaan dana pensiun pada tahun 2008 telah melakukan investasi finansial sebesar Rp7.212 miliar. Instrumen finansial yang menjadi pilihan utama investasi adalah surat berharga jangka panjang yaitu 79,3 persen dari keseluruhan investasi finansialnya atau senilai Rp5.717 miliar. Sementara itu, cadangan dana pensiun yang merupakan sumber utama kedua pembiayaan internal investasi perusahaan tersebut (setelah tabungan brutonya) mengalami penurunan sebesar Rp868 miliar. Kondisi perekonomian Indonesia yang tumbuh melambat sebagai imbas krisis global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008, disinyalir menjadi penyebab menurunnya perolehan dana iuran peserta dan iuran pemberi kerja perusahaan peserta dana pensiun, baik yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pegadaian

Perusahaan pegadaian pada tahun 2008 memperoleh dana dari kegiatan usahanya berupa tabungan bruto sebesar Rp499 miliar. Sebagian dari tabungan tersebut, atau senilai Rp63 miliar digunakan untuk investasi fisik, sisanya sebesar Rp436 miliar dipinjamkan kepada sektor lainnya yang tercermin pada kewajiban di sektor-sektor tersebut. Pada saat yang bersamaan, perusahaan pegadaian juga melakukan penambahan aset finansialnya. Instrumen finansial yang menjadi pilihan utama investasi adalah kredit uang, yaitu sebesar 95,7 persen dari keseluruhan investasi finansialnya atau senilai Rp3.221 miliar. Dalam melakukan investasi tersebut, perusahaan memperoleh sumber dana berupa kredit perbankan senilai Rp2.880 miliar atau sebesar 84 persen dari total kewajiban finansialnya sebesar Rp2.931 miliar.

Perusahaan Pembiayaan

Seiring dengan perkembangan suku bunga perbankan yang menurun, stabilitas makroekonomi yang masih membaik meskipun kondisi eksternal yang kurang kondusif akibat adanya krisis global pada pertengahan tahun 2008, serta suku bunga pinjaman luar negeri yang lebih rendah, perusahaan pembiayaan masih memiliki kegairahan dalam melakukan kegiatannya. Dampak terbesar yang dirasakan oleh perusahaan pembiayaan adalah meningkatnya tabungan bruto, investasi fisik, investasi finansial, serta penambahan sumber dananya masing-masing sebesar 41,1 persen, 29,3 persen, 119,6 persen, dan 137,4 persen. Perusahaan pembiayaan sebagai institusi intermediasi tidak memiliki akses sumber dana yang spesifik seperti halnya LKBB lain. Dengan demikian, untuk mendukung kegiatannya, perusahaan pembiayaan sangat tergantung pada aliran dana eksternal terutama kredit perbankan. Bila dilihat dari struktur sumber pendanaannya, sumber dana utama perusahaan pembiayaan berasal dari pinjaman bank (87,9 persen), baik yang berasal bank dalam negeri (14,4 persen) maupun pinjaman dari bank di luar negeri (73,5 persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2007, besarnya tambahan pinjaman bank dalam negeri tahun 2008 meningkat 102,7 persen, sedangkan tambahan pinjaman bank luar negeri meningkat 279,9 persen.

4.4 *Velocity of Money*

Jumlah uang beredar merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan kebijakan moneter. Kebijakan ini ditujukan untuk mencapai stabilisasi harga dan pengendalian suku bunga dengan melakukan penambahan atau pengurangan uang beredar. Pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas tentang perkembangan agregat moneter dan gambaran *velocity of money* (V) selama periode 2003-2008.

Perkembangan uang beredar ($M2$) dalam periode 2003-2008 tercermin pada tabel 4.8 yang juga menggambarkan hubungan antara $M1$, $M2$ dengan PDB. Apabila diperhatikan perkembangan $M1$ dalam periode 2003-2008, secara rata-rata meningkat sebesar 15,97 persen. Jumlah $M1$ pada tahun 2008 mencapai Rp456.787 miliar atau meningkat sebesar 1,50 persen dibandingkan keadaan tahun 2007. Sedangkan perkembangan uang kuasi secara rata-rata dalam periode 2003-2008 mencapai 13,07 persen, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 20,04 persen. Jumlah uang beredar ($M2$) pada tahun 2008 mencapai Rp1.892.559 miliar,

dimana 75,86 persen atau Rp1.435.772 miliar diantaranya adalah uang kuasi dan 24,14 persen atau Rp456.787 miliar adalah M1. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah uang beredar secara rata-rata dalam periode 2003-2008 mencapai 13,61 persen dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 19,30 persen. Peningkatan yang tinggi di tahun 2007 ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan M1 sebesar 29,69 persen, sedangkan uang kuasi – simpanan tetap dan tabungan di bank-bank umum yang meningkat sebesar 15,81 persen.

**TABEL 4.8. UANG BEREDAR DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
TAHUN 2003-2008**

Tahun	Uang Beredar (Miliar Rp) ¹⁾			PDB ²⁾ (Miliar Rp)	Velocity (PDB/M1)	Rasio (%)	
	M1	Uang Kuasi	M2			M1/PDB	M2/PDB
2003	213.784	728.787	942.571	2.036.352	9,53	10,50	46,29
2004	245.946	785.261	1.031.207	2.295.826	9,33	10,71	44,92
2005	271.140	929.343	1.200.483	2.774.281	10,23	9,77	43,27
2006	347.013	1.032.865	1.379.878	3.339.217	9,62	10,39	41,32
2007	450.055	1.196.119	1.646.174	3.949.321	8,78	11,40	41,68
2008	456.787	1.435.772	1.892.559	4.954.029	10,85	9,22	38,20

Sumber: 1) Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, Bank Indonesia

2) Pendapatan Nasional Indonesia, BPS

Untuk mengukur pertumbuhan finansial dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, indikator yang biasa digunakan adalah rasio M1 terhadap PDB dan rasio M2 terhadap PDB. Sedangkan indikator untuk melihat bagaimana *velocity of income* (V) yang menggambarkan perputaran uang beredar adalah rasio PDB/M1. Jika V rendah mempunyai makna perputaran uang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika V tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat tidak berlama-lama untuk menggunakan uang tersebut dalam transaksi.

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat bahwa hubungan yang ada antara M1 terhadap PDB selama periode 2003-2008 relatif tidak berubah, hal ini ditunjukkan oleh rasio M1 terhadap PDB berkisar antara 9 persen hingga 11 persen atau secara rata-rata 10,33 persen. Hal ini berarti peran M1 dalam proses penciptaan PDB pada tiap tahunnya secara rata-rata adalah sebesar 10,33 persen.

Gambaran rasio M2 terhadap PDB dalam periode 2003-2008 terlihat agak berfluktuasi yaitu berkisar antara 38,20 persen sampai dengan 47,44 persen. Rasio M2 terhadap PDB selama periode 2003-2008 yang cenderung menurun merupakan dampak makin menurunnya tingkat suku bunga perbankan, walaupun pada tahun 2007 meningkat dari 41,32 persen menjadi 41,68 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor perbankan telah terjadi kelebihan likuiditas, sehingga sektor ini cenderung menahan masuknya uang kuasi yang berupa tabungan berjangka dan tabungan penduduk lainnya. Puncak dari keadaan ini dapat dilihat pada tahun 2007, dimana rasio M2 terhadap PDB mencapai 41,68 persen.

<https://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://www.kps.go.id>

BAB V KESIMPULAN

1. Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data finansial yang menggambarkan penggunaan tabungan bruto di masing-masing sektor baik untuk membiayai investasi real maupun investasi finansial. Sektor yang tabungannya lebih kecil dari kebutuhan investasi real (sektor defisit) akan melakukan pinjaman neto, yang dalam kerangka NAD dapat diterjemahkan sebagai selisih antara jumlah perubahan harta dan kewajiban finansial. NAD disajikan dalam bentuk matriks, barisnya menunjukkan kategori transaksi finansial dan kolomnya menunjukkan pembagian sektor ekonomi. Setiap sektor mempunyai dua kolom, kolom penggunaan untuk mencatat semua perubahan (arus) harta finansial, sedangkan kolom sumber mencatat perubahan kewajiban finansial. NAD berguna sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan perumusan kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan moneter. NAD juga dipakai untuk melengkapi penyusunan Sistem Neraca Nasional dan mengevaluasi sistem pengumpulan data keuangan yang selama ini terus dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik dan instansi-instansi terkait lainnya. NAD merupakan sistem data tertutup, karena di dalamnya melibatkan pula sektor luar negeri. Sebagai suatu sistem tertutup berlaku bahwa setiap perubahan harta di suatu sektor akan diikuti perubahan kewajiban dalam jumlah yang sama di sektor yang lain. Dengan demikian, untuk masing-masing kategori transaksi berlaku identitas baris yang menunjukkan bahwa jumlah penggunaan dana (kenaikan harta) sama besarnya dengan jumlah sumber dana (kenaikan kewajiban finansial) untuk ekonomi secara keseluruhan. Untuk masing-masing sektor juga berlaku identitas kolom yang menunjukkan bahwa jumlah perubahan harta akan sama dengan perubahan kewajiban.
2. Sebagai suatu sistem data, NAD tentunya mempunyai beberapa masalah dan keterbatasan. Secara teoritis, karena NAD disusun dari dua neraca berurutan maka gejolak arus finansial seperti uang kas dan deposito yang mempunyai fluktuasi cukup tinggi dalam waktu yang pendek, tidak mungkin dapat diantisipasi perubahannya dalam skala tahunan. Di samping itu, NAD belum mampu untuk

- menyusun arus finansial yang memakai konsep *true flows* karena faktor-faktor seperti perubahan kurs, *capital gains/losses* dan revaluasi aset belum dapat dideteksi secara baik dari neraca perusahaan.
3. Kondisi data yang dipakai untuk NAD 2002-2007 masih sangat bervariasi. Pada tingkat yang baik, misalnya sektor perbankan, datanya sudah merupakan neraca akhir tahun yang dikonsolidasi, tetapi data untuk sektor lain masih merupakan neraca individu perusahaan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sebaliknya pada tingkat yang kurang baik, sejumlah sektor hanya mengandalkan data sekunder yang ada, bahkan ada sektor-sektor yang datanya tidak tersedia sama sekali sehingga diperlukan survei-survei khusus dan penggunaan metode alternatif. Oleh karena itu, sistem pengadaan dan pengolahan data pada masing-masing unit penyedia data masih perlu dikembangkan. Paling tidak untuk kebutuhan data NAD, misalnya dapat diintegrasikan dengan sistem pengadaan data di masing-masing sektor. Di samping itu, bantuan dan peran serta dari berbagai sumber data baik instansi pemerintah, dunia swasta maupun masyarakat masih terus diharapkan guna memperbaiki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penyusunan NAD.
 4. Untuk dapat memantau perkembangan ekonomi yang terjadi khususnya perubahan pada struktur sektor finansial, maka NAD Indonesia akan terus disesuaikan dan disempurnakan dengan tetap memperhatikan keterbandingannya dengan NAD sebelumnya. Pembagian sektor dalam NAD harus tetap dapat mengantisipasi munculnya jenis-jenis lembaga keuangan yang baru, sebaliknya menghilangkan sektor-sektor yang kurang penting di masa mendatang. Demikian juga penentuan kategori transaksi, harus selalu disesuaikan dengan instrumen-instrumen finansial baru yang mungkin muncul di kemudian hari. Dengan demikian diharapkan NAD Indonesia akan selalu representatif dan peka terhadap perkembangan dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi.
 5. Selama periode 2003-2008, komposisi tabungan bruto *sektor bukan keuangan* terhadap total tabungan berkisar antara 85,02 persen sampai dengan 99,80 persen, atau rata-rata sebesar 96,37 persen. Sedangkan komposisi tabungan bruto sektor keuangan dan luar negeri pada periode yang sama secara rata-rata masing-masing sebesar 10,15 persen dan minus 6,52 persen.

6. Sumbangan investasi nonfinansial sektor bukan keuangan secara rata-rata selama periode 2003-2008 sebesar 99,21 persen, dan sisanya sebesar 0,79 persen merupakan rata-rata kontribusi investasi finansial sektor keuangan. Dari rata-rata sumbangan sektor bukan keuangan yang sebesar 98,75 persen tersebut, sekitar 76,30 persen di antaranya merupakan kontribusi perusahaan pemerintah dan swasta, dan sisanya merupakan kontribusi investasi pemerintah dan rumah tangga.
7. Secara umum ada dua sumber pembiayaan pembangunan. Pertama, berasal dari dalam negeri dan kedua berasal dari luar negeri. Keadaan pembiayaan pembangunan tersebut dapat dijelaskan melalui struktur pinjaman neto terhadap produk domestik bruto. Besarnya struktur pinjaman neto yang berasal dari dalam negeri terhadap produk domestik bruto selama periode 2003-2008 untuk sektor rumah tangga rata-rata 4,17 persen, sedangkan yang berasal dari sektor keuangan rata-ratanya mencapai 2,23 persen. Kekurangan dana dalam negeri tersebut diperoleh dari pinjaman luar negeri dengan rata-rata minus 0,99 persen.
8. Transaksi finansial dengan menggunakan berbagai macam instrumen serta dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebesar sebesar Rp561 triliun. Instrumen finansial uang dan simpanan yang tercipta pada tahun 2008 adalah sebesar Rp446 triliun, terdiri dari uang dan simpanan dalam rupiah sebesar Rp250 triliun dan uang dan simpanan dalam valas sebesar Rp182 triliun. Penyimpanan dana terbesar dalam bentuk uang dan simpanan adalah sektor rumah tangga, yaitu sebesar Rp181 triliun.
9. Selama tahun 2008 semua sektor mengalami penambahan tabungan bruto yang positif. Sebagian besar (42,98 persen) dari seluruh tabungan bruto merupakan tabungan bruto milik sektor bisnis. Jumlah tabungan sebesar itu telah digunakan seluruhnya untuk keperluan investasi non finansial. Sektor bisnis dan perusahaan pemerintah merupakan sektor yang melakukan investasi finansial melebihi tabungan brutonya. Pada tahun 2008 *net borrowing* yang terjadi pada sektor bisnis sebesar Rp294 triliun, sedangkan pada sektor perusahaan pemerintah hanya sebesar Rp50 triliun. Sehingga kekurangannya ditutupi dari investasi finansial yang dimiliki.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 1

Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia

<https://www.bps.go.id>

DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD) INDONESIA

I. SEKTOR KEUANGAN (*FINANCIAL SECTOR*)

1.1 Bank Sentral (*Central Bank*)

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi sbb: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan (4) sebagai pemegang kas pemerintah.

Di Indonesia fungsi-fungsi bank sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain memiliki sejumlah fungsi, BI juga memiliki sejumlah kewajiban antara lain kewajiban atas uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang berada di luar BI dan Kas Negara, serta simpanan giro BPUG dan sektor swasta pada BI. Kewajiban-kewajiban tersebut seringkali disebut sebagai uang primer.

Oleh karena kewenangan Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh BI, maka dalam Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia, neraca bank sentral hanya terdiri dari neraca BI.

1.2 Perbankan (*Banks*)

Sektor ini mencakup Bank Umum atau Bank Pencipta Uang Giral (BPUG), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perbankan Syariah.

1.2.1 Bank Pencipta Uang Giral (*Deposit Money Banks*)

Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) adalah bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. BPUG terdiri dari Bank Pesero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing. Secara umum, kegiatan utama bank-bank tersebut (kecuali bank non devisa) adalah menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan. Selain itu bank-bank tersebut juga memberikan atau menyalurkan kredit baik untuk modal kerja maupun untuk investasi, dan melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

1.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Banks*)

Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit untuk skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang kecil terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga wilayah kerja BPR umumnya lebih bersifat lokal tingkat desa. Dilihat dari jenisnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari BPR-BKD dan BPR-Non BKD.

1.2.3 Perbankan Syariah (*Sharia Banks*)

Dimasukkannya konsep perbankan syariah ini sesuai dengan amanat dan semangat UU No.7 tahun 1992 yang telah meletakkan dasar bagi terwujudnya perbankan sistem ganda yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (syariah) dan bank yang beroperasi secara konvensional. Kemudian di dalam UU perbankan yang baru yaitu UU. No.10 tahun 1998 kembali menindaklanjuti dan secara transparan telah menyebutkan tentang latar belakang diperkenalkannya sistem perbankan syariah dalam struktur perbankan di Indonesia. Menurut UU tersebut kegiatan perbankan syariah terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

UU No. 10 tahun 1998 tersebut juga menjelaskan tiga cara dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu (a) pendirian bank baru, (b) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, dan (c) pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) pada bank umum konvensional.

1.3 Lembaga Keuangan Lainnya (*Other Financial Institutions*)

Sektor ini mencakup semua lembaga keuangan selain bank yang terdiri dari perusahaan pembiayaan, modal ventura, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan penunjang asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan pasar modal.

1.3.1 Perusahaan Pembiayaan (*Finance Companies*)

Perusahaan pembiayaan adalah jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Cakupan kegiatan perusahaan pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*), pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan kartu kredit (*credit card*). Perusahaan pembiayaan secara umum dimaksudkan untuk memberikan penyaluran dana kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan, dan tidak dibenarkan menarik dana secara langsung dari pihak ketiga (*non depositories institution*) sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. Oleh karena itu, sebagian besar sumber dana perusahaan pembiayaan berasal dari kredit perbankan baik bank dalam negeri maupun bank asing.

1.3.1.1 Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kegiatan perusahaan pembiayaan jenis sewa guna usaha ini adalah memberikan pembiayaan (*lessor*) kepada para penyewa guna usaha (*lease*) untuk penyediaan barang-barang modal baik secara "*finance lease*" maupun "*operating lease*" dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

1.3.1.2 Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak piutang adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang bisa dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Kegiatan usaha anjak piutang adalah membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* maupun *promissory notes* atas dasar tingkat diskonto tertentu dari si penjual baik *with recourse* maupun *without recourse*. Anjak piutang jenis *with recourse* berarti tanggung jawab penagihan piutang selanjutnya akan beralih kepada pihak yang melakukan anjak piutang.

1.3.1.2 Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Pembiayaan konsumen adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah terutama untuk pengadaan barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

1.3.1.3 Pembiayaan Kartu Kredit (*Credit Card*)

Pembiayaan kartu kredit adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah untuk kepentingan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit. Biasanya pihak bank disebut sebagai *issuer*, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau pemegang kartu kreditnya disebut sebagai *card holder*. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah terdaftar sebagai penerima kartu kredit (*merchant*).

1.3.2 Modal Ventura (*Venture Capital*)

Modal ventura adalah kegiatan usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha (PPU) dalam jangka waktu tertentu umumnya selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang

kembali. Selain memberikan bantuan modal kepada PPU, perusahaan modal ventura juga seringkali memberikan bimbingan manajemen kepada PPU. Bentuk usaha modal ventura ini umumnya dikembangkan oleh pihak swasta besar dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan kecil.

1.3.3 Usaha Perasuransian (*Insurance Business*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasal 3, usaha perasuransian dibedakan menjadi dua yaitu (a) usaha asuransi, dan (b) usaha penunjang usaha asuransi.

1.3.3.1 Usaha Asuransi (*Insurance Business*)

Usaha asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.

1.3.3.1.1 Usaha Asuransi Kerugian (*Loss Insurance Business*)

Usaha asuransi kerugian adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

1.3.3.1.2 Usaha Asuransi Jiwa (*Life Insurance Business*)

Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

1.3.3.1.3 Usaha Reasuransi (*Reinsurance Business*)

Usaha reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

1.3.3.2 Usaha Jasa Penunjang Usaha Asuransi (*Insurance Supporting Business*)

Usaha jasa penunjang asuransi terdiri dari (i) usaha pialang asuransi, (ii) usaha pialang reasuransi, (iii) usaha penilai kerugian asuransi, (iv) usaha kosultan aktuaria, dan (v) usaha agen asuransi.

1.3.3.2.1 Usaha Pialang Asuransi (*Insurance Brokerage Business*)

Usaha pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

1.3.3.2.2 Usaha Pialang Reasuransi (*Reinsurance Brokerage Business*)

Usaha pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

1.3.3.2.3 Usaha Penilai Kerugian (*Loss Adjuster Business*)

Usaha penilai kerugian adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan.

1.3.3.2.4 Usaha Konsultan Aktuaria (*Actuarial Consultan Business*)

Usaha konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.

1.3.3.2.5 Usaha Agen Asuransi (*Insurance Agency Business*)

Usaha agen asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan di bidang pemasaran asuransi untuk / atas nama penanggung.

1.3.3.3 Program Asuransi Sosial (*Social Insurance Program*)

Sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 1992 tidak dikenal lagi perusahaan asuransi sosial seperti sebelumnya. Undang-undang itu mengatur program asuransi sosial yaitu sebagai suatu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa program asuransi sosial yang ada diantaranya adalah :

- Program asuransi sosial bidang asuransi kerugian, yaitu asuransi wajib kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh BUMN PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Program asuransi sosial bidang asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti.
- Program asuransi sosial yang mengelola Tabungan Hari Tua (THT) dan asuransi kesehatan bagi anggota ABRI dan para karyawan sipil ABRI diselenggarakan oleh (Perum) ASABRI.
- Program asuransi sosial yang mengelola THT dan asuransi kematian bagi pegawai negeri sipil, diselenggarakan oleh PT (persero) Taspen.

- Program asuransi sosial yang mengelola THT, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, diselenggarakan oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK).

1.3.4 Pegadaian (*Pawnshops*)

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang tugasnya membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan nilai barang jaminan yang diserahkan oleh pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

1.3.5 Dana Pensiun (*Pension Fund*)

Sesuai dengan UU No.11 tahun 1992 tentang perusahaan Dana Pensiun, perusahaan ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial karyawan perusahaan, melalui pemberian santunan hari tua/uang pensiun. Umumnya dana yang terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja selain digunakan untuk membayar tunjangan hari tua/pensiun karyawan, juga diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, saham, maupun disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito.

Terdapat tiga pilihan bentuk program pensiun yaitu (i) Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK), (ii) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan (iii) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Sedangkan berdasarkan bentuk badan hukumnya, Dana Pensiun dibedakan menjadi dua yaitu (i) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan (ii) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

1.3.5.1. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)

Pada program pensiun jenis ini, karyawan biasanya tidak perlu ikut membayar iuran, sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja membayar iuran dalam batas persentase tertentu dari keuntungannya dalam tahun tertentu. Dalam hal risiko, kegagalan pengolahan berada pada pihak peserta.

1.3.5.2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada program pensiun jenis ini, kewajiban membayar iuran ditanggung oleh pihak pemberi kerja dan peserta yang telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam keadaan bagaimanapun pihak perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus tetap membayar iuran kepada pihak dana

pensiun sesuai yang telah disepakati. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan risiko berada pada pihak peserta.

1.3.5.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pada jenis program ini manfaat pasti telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program ini besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja berubah-ubah sesuai dengan hasil perhitungan aktuarial dan hasil pengelolaan dananya. Sedangkan bagi peserta, besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh peserta besarnya tetap. Dalam hal risiko kegagalan pengelolaan berada pada pihak pemberi kerja. Sebaliknya jika pengelolaan dana pensiun berhasil maka akan mengurangi beban iuran pihak pemberi kerjanya.

1.4 Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar modal adalah sarana yang dapat mempertemukan kepentingan pihak investor dengan pihak emiten. Dalam hal ini, pasar modal menjadi sarana alternatif bagi pihak perusahaan yang menginginkan sumber dana diluar kredit perbankan. Pihak perusahaan yang melakukan penawaran saham (emiten) dapat memperoleh sumber dana melalui penawaran perdana di pasar primer atau *Initial Public Opinion* (IPO). Selain terjadi transaksi jual beli saham, di pasar modal juga dilakukan transaksi jual beli obligasi. Sarana untuk melangsungkan transaksi pasar modal di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti halnya pada kegiatan peransuransian, pada kegiatan di pasar modal juga memunculkan kegiatan usaha derivatif seperti broker pasar modal, *underwriter*, *adjuster* dan penjamin emisi.

II. SEKTOR BUKAN KEUANGAN (*NONFINACIAL SECTORS*)

Secara umum sektor-sektor yang dicakup di sini merupakan institusi yang memanfaatkan dana dari sektor keuangan untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor-sektor ini tidak mempunyai wewenang dalam pengumpulan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat. Sektor bukan keuangan terdiri dari sektor pemerintah, perusahaan pemerintah, perusahaan swasta (bisnis) dan rumah tangga.

2.1 Pemerintah (*Government*)

Pengertian sektor pemerintah adalah sektor yang semata-mata melakukan kegiatan administrasi pemerintah dan melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharap balas jasa. Termasuk dalam kegiatan pemerintah juga meliputi kegiatan lembaga-lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah, tidak termasuk Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN dan BUMD). Dalam penyusunan NAD Indonesia, kedua sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Perusahaan Pemerintah. Sektor pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu (i) pemerintah pusat dan (ii) pemerintah daerah.

2.1.1 Pemerintah Pusat (*Central Government*)

Mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: departemen-departemen, lembaga non departemen, lembaga tinggi negara dan lembaga pemerintah lain, serta semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat peraturan-peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat, menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi dan jasa pelayanan sosial lainnya secara cuma-cuma (di bawah tingkat harga normalnya).

2.1.2 Pemerintah Daerah (*Local Government*)

Mencakup semua unit kegiatan pemerintah yang berada di tingkat propinsi, kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonom).

2.2 Perusahaan Pemerintah (*Government Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Termasuk juga di sini Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai "badan pemerintah" yang memiliki peran dan fungsi khusus untuk mengatur kebutuhan logistik nasional.

2.2.1 Badan Usaha Milik Negara (*State Enterprises*)

Mencakup badan usaha milik pemerintah pusat yang bentuk badan hukumnya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dan tatacara pembinaan dan pengawasannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969, bentuk badan hukum perusahaan milik negara dibedakan menjadi: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). Pertamina yang badan hukumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971 tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, masih ada BUMN yang disebut, PN atau PT (murni) yang berdiri sebelum lahirnya UU No. 9 tersebut, dan bentuk badan hukumnya diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

BUMN yang dicakup di sini hanya yang bergerak di bidang non finansial, dan jenis usahanya lebih berorientasi pada usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, seperti: usaha pengangkutan, pos dan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. BUMN-BUMN yang bergerak di bidang finansial seperti perbankan, sudah dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor bank. Pada umumnya kegiatan utama BUMN non finansial membutuhkan modal (investasi) yang berskala besar.

2.2.2 Badan Usaha Milik Daerah (*Local Government Enterprises*)

Sektor ini mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah. Jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

2.2.3 Badan Urusan Logistik (*National Food Authority*)

Merupakan lembaga pemerintah non departemen yang dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 11 Tahun 1969. Tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menghimpun, menyalurkan, menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat berupa beras, jagung, terigu/gandum, gula pasir, kacang kedelai dan sebagainya. BULOG tidak digolongkan sebagai bagian dari kegiatan BUMN karena bentuk, sifat dan tujuannya berbeda. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai usahanya tidak berasal dari anggaran belanja negara, tetapi berasal dari pinjaman bank-bank dalam negeri (BI, BBD, BRI), pihak lain dan kekayaan/tabungan yang berasal dari usahanya.

2.3 Bisnis (*Business Enterprises*)

Sektor ini mencakup koperasi dan perusahaan swasta non finansial.

2.3.1 Koperasi (*Cooperative*)

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 jo.UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam sektor ini, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu koperasi perkotaan (non-KUD) dan koperasi pedesaan (KUD). Pembagian ini umumnya didasarkan pada wilayah kerjanya.

Koperasi yang berbentuk bank (seperti BUKOPIN) dan asuransi (Koperasi Asuransi Indonesia) berturut-turut masuk ke sektor bank umum dan asuransi. Untuk meningkatkan efisiensi, maka koperasi primer dapat membentuk berbagai jenis koperasi sekunder. Jenis koperasi sekunder dapat berupa pusat (daerah tingkat II), gabungan (propinsi), dan induk (nasional).

2.3.1.1 Koperasi Perkotaan (*Non rural Cooperative*)

Koperasi non-KUD umumnya adalah koperasi yang menghimpun anggota dan warga masyarakat nonpedesaan berdasarkan fungsi atau peran tertentu serta pembagian kerja atau profesi dalam masyarakat. Koperasi tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- (i) Koperasi fungsional seperti pegawai negeri, ABRI, karyawan, dan lainnya.
- (ii) Golongan menurut bidang usaha seperti jasa, produksi, industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (iii) koperasi serba usaha dan simpan-pinjam.

2.3.1.2 Koperasi Pedesaan (*Rural Cooperative*)

Koperasi pedesaan (KUD) adalah jenis koperasi yang berkedudukan di desa dan yang menghimpun warga desa untuk menjalankan berbagai fungsi usaha, terutama di sektor pertanian, seperti koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi perikanan/nelayan, koperasi peternak, koperasi pengrajin dan simpan-pinjam.

2.3.2 Perusahaan Swasta Non finansial (*Private Nonfinancial Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan nonfinansial yang berbadan hukum milik masyarakat. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang dan jasa dengan tujuan

mencari untung. Usaha ini bisa dimiliki oleh perorangan, kelompok, gabungan perusahaan, usaha keluarga, dan sebagainya dengan maksud untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk badan hukumnya bisa berupa perseroan terbatas (PT), Firma (Fa), CV dan NV. Dalam kelompok ini tidak termasuk usaha rumah tangga, karena usaha rumah tangga dimasukkan sebagai bagian dari sektor rumah tangga.

2.4 Rumah Tangga (*Households*)

Mencakup kegiatan rumah tangga biasa, badan-badan nirlaba dan usaha rumah tangga. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu bangunan dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-harinya secara bersama. Badan yang tidak mencari laba mencakup badan-badan swasta yang menghasilkan jasa pelayanan rumah sakit, sekolah, yayasan, tempat peribadatan dan sebagainya. Usaha rumah tangga adalah kegiatan ekonomi tidak berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh rumah tangga, dan risiko usahanya ditanggung seorang atau lebih anggota rumah tangga⁸ dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, misalnya, usaha pertanian, industri/kerajinan dan sebagainya.

III. SEKTOR LUAR NEGERI (*Rest of the World*)

Mencakup kegiatan antara penduduk Indonesia (residen) baik individu maupun institusi dan bukan penduduk (non residen/luar negeri). Transaksi yang terjadi antara residen dengan non residen ini dicatat di dalam neraca pembayaran (*balance of payments*).

⁸ Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang bersifat tetap maupun yang sementara (dalam batas waktu tertentu).

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 2

**Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus
Dana (NAD) Indonesia**

<https://www.kemendagri.go.id>

DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI NERACA ARUS DANA INDONESIA

0100 Tabungan Bruto

Tabungan bruto merupakan jumlah dari penyusutan barang modal tetap dan tabungan neto.

0110 Penyusutan Barang Modal

Penyusutan barang modal (PBM) merupakan biaya penyusutan barang modal tetap (pabrik, mesin dan peralatan) karena aus/rusak dalam proses produksi yang dibebankan pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan pengeluaran dana. Selain itu, penyusutan barang modal juga meliputi perkiraan penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan barang modal tetap milik perusahaan.

0120 Tabungan Neto

Tabungan neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan barang modal. Penerimaan meliputi pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan gaji, serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup penerimaan transfer berjalan seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor usaha, bantuan luar negeri dan pajak yang diterima pemerintah, dan pensiun yang diterima oleh sektor rumah tangga. Pengeluaran mencakup pengeluaran barang dan jasa yang dibayarkan kepada sektor lain, serta pembayaran dividen dan transfer seperti pembayaran pajak. Pengeluaran untuk barang modal tetap dan persediaan dikategorikan sebagai pengeluaran modal.

0200 Perolehan Harta Non finansial

Merupakan penjumlahan dari pembentukan modal tetap bruto, kenaikan stok dan pembelian harta tak berwujud neto.

0210 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Yang dimaksud dengan pembentukan modal tetap bruto adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan, dan bandara, serta mesin peralatan.

Pengeluaran barang modal dan bangunan untuk keperluan militer tidak tercakup di sini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

0220 Perubahan Inventori

Perubahan Inventori adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Termasuk juga persediaan di bidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian. Perubahan persediaan emas yang dikuasai oleh Bank Sentral merupakan bagian dari kategori transaksi cadangan valuta asing pemerintah (0800).

0300 Pinjaman Neto = 0100 - 0200

Pinjaman neto merupakan selisih antara tabungan bruto dengan perolehan harta non finansial.

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500

Selisih statistik adalah selisih antara pinjaman neto (sisi transaksi riil, bagian atas NAD) dan investasi finansial neto (sisi finansial NAD). Penyebab utama adanya selisih statistik di beberapa sektor, adalah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansialnya.

Jika dalam persamaan akuntansi total aset sama dengan kewajiban plus kekayaan neto, maka pinjaman neto harus sama dengan investasi finansial neto. Tetapi karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang menimbulkan selisih tersebut.

0500 Investasi Finansial Neto = 0600 - 0700

Investasi Finansial Neto merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (kenaikan harta finansial neto) dengan jumlah sumber finansial (kenaikan kewajiban finansial neto).

0600 Jumlah Penggunaan Finansial

Jumlah Penggunaan Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi aktiva. Kenaikan dari penggunaan finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0700 Jumlah Sumber Finansial

Jumlah Sumber Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikkan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0800 Cadangan Valuta Asing Pemerintah

Cadangan valuta asing (valas) pemerintah terdiri dari emas moneter, *special drawing rights*, posisi cadangan di IMF, deposito, dan surat berharga dalam valuta asing yang dimiliki oleh Otoritas Moneter. Cadangan valas pemerintah adalah aktiva Otoritas Moneter dan merupakan kewajiban sektor luar negeri. Dalam penghitungan pendapatan nasional, emas moneter (dalam bentuk fisik) diperlakukan sebagai hutang luar negeri.

0810 Emas Moneter

Kategori ini mencakup emas yang dimiliki atau disimpan oleh Bank Indonesia. Emas moneter mencakup juga emas yang disimpan pada lembaga keuangan luar negeri. Lawan dari aktiva finansial ini merupakan pasiva di sektor luar negeri.

0820 *Special Drawing Rights* (SDR)

SDR merupakan aktiva cadangan yang diciptakan oleh Dana Moneter Internasional (*IMF*) sebagai pelengkap emas dan mata uang cadangan.

0830 Posisi Cadangan di IMF

Merupakan klaim negara kepada IMF.

0840 Cadangan Valuta Asing

Kategori ini mencakup mata uang asing yang dikuasai dan disimpan oleh Bank Indonesia, giro dan deposito berjangka di bank-bank luar negeri, wesel ekspor yang didiskontokan lagi oleh bank-bank devisa di Indonesia, investasi dalam surat-surat berharga luar negeri dan klaim atas pemerintah pusat.

0850 Lainnya

Kategori ini mencakup seluruh klaim luar negeri Bank Indonesia yang tidak termasuk dalam kategori 0810 sampai dengan 0840.

0900 Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya

Kategori ini mencakup semua jenis klaim valas yang tidak termasuk dalam kategori transaksi, seperti cadangan valas pemerintah, deposito dalam valas, pinjaman dalam valas, tagihan jangka pendek dan jangka panjang dalam valas, serta obligasi.

1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)

Uang dan simpanan terdiri dari seluruh jenis mata uang yang dipegang oleh penduduk, deposito dan giro di bank dan giro pos baik dalam rupiah maupun valas, serta deposito dan simpanan lainnya yang dimiliki penduduk pada bank asing di luar negeri. Yang termasuk dalam kategori ini adalah uang kartal dan uang logam yang beredar, giro, tabungan, deposito berjangka dan tabungan giro pos.

1010 Uang Dan Simpanan Dalam Valuta Asing

Kategori ini mencakup semua jenis mata uang asing yang dipegang oleh penduduk dan tabungan dalam valas yang disimpan di Bank Indonesia, bank-bank pencipta uang giral (BPUG), dan bank asing yang dinilai dalam rupiah.

1011 Uang

Kategori ini mencakup semua jenis uang kertas dan uang logam dalam valas.

1012 Giro

Kategori ini merupakan simpanan dalam mata uang asing di bank yang dapat ditarik dengan menggunakan cek.

1013 Tabungan

Kategori ini merupakan tabungan dalam mata uang asing yang dapat ditarik dengan menunjukkan buku tabungan.

1014 Deposito Berjangka

Kategori ini merupakan deposito dalam valas yang dapat ditarik jika telah disimpan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan persetujuan antara penabung dan bank saat perjanjian dibuat.

1019 Tabungan Lainnya

Kategori ini mencakup semua tabungan dalam valas yang tidak termasuk dalam kategori 1011 sampai dengan 1014.

1020 Uang Dan Simpanan dalam Rupiah

Kategori ini mencakup semua jenis mata uang rupiah yang dipegang oleh penduduk dan simpanan pada Bank Indonesia, BPUG dan bank asing, Kantor Pos dan Giro dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.

1021 Uang Kertas dan Logam

Kategori ini mencakup uang kertas dan logam yang dipegang oleh masyarakat termasuk Kas Negara dan BPUG. Uang adalah bukti hutang Otoritas Moneter kepada masyarakat umum.

1022 Giro

Kategori ini merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek. Giro antar bank tidak termasuk dalam kategori ini, tetapi masuk kategori klaim antar bank (2000).

1023 Tabungan

Tabungan merupakan tabungan yang dapat ditarik dengan menggunakan bukti buku tabungannya.

1024 Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah jenis tabungan yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan depositor pada saat pembukuan tabungan.

1030 Tabungan Giro Pos Dan Koperasi

Tabungan giro pos merupakan hutang Kantor Pos dan Giro berupa tabungan dan giro. Sedangkan tabungan koperasi merupakan tabungan wajib dan sukarela.

1100 Surat Berharga Jangka Pendek

Kategori ini mencakup surat tanda hutang jangka pendek yang dapat diperjual belikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Surat berharga ini dapat dikeluarkan

oleh perusahaan swasta atau sektor pemerintah baik dalam nilai rupiah maupun mata uang asing lainnya.

1200 Kredit (Jumlah)

Kategori ini menunjukkan jumlah pinjaman bank dan pinjaman dari institusi lainnya baik dalam rupiah maupun valas. Pinjaman merupakan hasil persetujuan antara peminjam dengan si pemberi pinjaman. Pinjaman adalah suatu instrumen finansial yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar uang. Ciri terakhir inilah yang membedakan pinjaman dengan surat berharga jangka pendek.

1210 Kredit Bank Dalam Rupiah

Kategori ini mencakup pinjaman (kredit) dan cerukan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, BPUG, dan bank lain di Indonesia. Kredit bank dalam kategori ini biasanya digunakan untuk tujuan bisnis. Kredit bank untuk individu (bukan bisnis) digolongkan pada kredit konsumsi; termasuk di dalamnya kredit pemilikan barang tak bergerak. Kategori ini hanya mencakup pinjaman bank dalam rupiah, sedangkan pinjaman bank dalam valas dimasukkan dalam kategori pinjaman dalam valas (1230).

1211 Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.

1212 Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka panjang atau menengah yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

1213 Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang-barang tahan lama lainnya untuk keperluan konsumsi. Dalam kategori ini juga termasuk hutang hipotek atau persetujuan penjualan yang dijamin oleh harta berwujud seperti tanah dan bangunan tempat tinggal.

1220 Kredit Institusi Lain Dalam Rupiah

Kategori ini dimaksudkan untuk menampung semua jenis pinjaman dalam rupiah yang diberikan oleh berbagai institusi selain bank. Kredit oleh lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan non finansial (pemerintah dan swasta) termasuk di sini.

1221 Kredit Modal Kerja

Lihat definisi 1211.

1222 Kredit Investasi

Lihat definisi 1212.

1223 Kredit Konsumsi

Kategori ini mencakup pinjaman dalam rupiah dari perusahaan asuransi jiwa, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya.

1230 Kredit Dalam Valuta Asing

Kategori ini mencakup semua jenis pinjaman dalam valuta asing dari semua sektor ekonomi baik di dalam maupun luar negeri.

1300 Modal Saham Dan Penyertaan

Kategori ini mencakup segala jenis saham baik yang diperjualbelikan maupun tidak. Dalam kategori ini termasuk juga penyertaan modal pemerintah dan penyertaan sektor-sektor lainnya. Dalam NAD yang dicatat adalah saham baru yang diterbitkan, pembelian kembali saham serta jual-beli saham yang beredar berdasarkan harga pasar.

1400 Surat Berharga Jangka Panjang (jumlah)

Kategori ini mencakup hutang jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Kategori ini merupakan jumlah obligasi pemerintah dan surat berharga jangka panjang lainnya baik dalam nilai rupiah maupun valas. Berbeda dengan hutang, obligasi adalah surat berharga yang dapat dipindahtangankan, tidak seperti hutang. Hutang obligasi tidak selalu dijamin oleh harta riilnya.

1410 Surat Berharga Pemerintah (Jumlah)

Kategori ini mencakup semua surat berharga jangka panjang pemerintah yang dijual di dalam maupun luar negeri. Kategori ini meliputi surat berharga jangka panjang dalam nilai rupiah dan valas. Obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN dimasukkan dalam kategori surat berharga jangka panjang lainnya (1420).

1420 Surat Berharga Lainnya

Kategori ini mencakup surat berharga jangka panjang dalam pengertian luas, yang dikeluarkan oleh selain pemerintah. Jenis surat berharga ini dapat dikeluarkan oleh sektor dalam negeri maupun luar negeri. Surat berharga hipotek termasuk di sini, tetapi bukan untuk kredit kepemilikan rumah. Surat berharga ini dapat juga diterbitkan oleh yayasan, perusahaan swasta dan BUMN.

1500 Cadangan Asuransi Dan Pensiun

Kategori ini mencakup cadangan asuransi jiwa, asuransi non jiwa, asuransi sosial dan dana pensiun. Bagi asuransi jiwa dan dana pensiun, transaksi ini merupakan hutang perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis dan hutang perusahaan dana pensiun kepada anggotanya. Bagi asuransi non jiwa transaksi ini mencakup cadangan perusahaan asuransi non jiwa yang digunakan untuk membiayai klaim yang belum dibayar atau klaim di masa yang akan datang. Cadangan teknis pada asuransi non jiwa pada dasarnya adalah harta perorangan, perusahaan dan pemerintah di semua sektor, yang tidak dapat dicatat sebagai harta pada pembukuan pemegang polis.

1800 Kredit Dagang

Kategori ini mencakup mencakup kredit jangka pendek yang terjadi dalam bisnis, berupa hutang-piutang antar penyuplai dan pembeli barang dan jasa. Kredit ini berlangsung sejak barang dan jasa diserahkan sampai dengan pembayaran diterima. Kredit dagang bukan merupakan instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan seperti instrumen pasar uang, maupun dinegosiasikan seperti hutang bank. Kredit dagang antara perusahaan afiliasi termasuk dalam kategori ini. Karena arus finansial dari perusahaan dalam negeri tidak dicatat atas dasar nilai yang dikonsolidasikan, maka kredit dagang dalam NAD merupakan arus intra-sektor.

2000 Rekening Antar Bank

Rekening antar bank adalah semua jenis klaim yang terjadi antara bank yang satu dengan bank lainnya. Tidak termasuk rekening antar kantor, antar cabang dan kantor pusat, atau antar cabang dari bank yang sama. Rekening antar kantor dinetokan (sisi pasiva dikurangi dengan aktivasinya) dan dimasukkan dalam kategori rupa-rupa (9000).

9000 Rupa-rupa

Kategori ini mencakup berbagai transaksi lainnya yang tidak termasuk di dalam semua kategori yang disebutkan di atas.

<https://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://www.bps.go.id>

Daftar Pustaka

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, W.I. *National Income and Economic Accounting*, Prentise Hall Inc., Englewood, New Jersey, 1969.
- Bank Indonesia, *Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank-Bank*, Jakarta, 1986.
- , *Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia berbagai seri*.
- , *Neraca Singkat Bank Indonesia, berbagai seri*, tidak dipublikasikan.
- Biro Pusat Statistik, *Studi Neraca Arus Indonesia 1980*, Jakarta, 1987.
- , *Neraca Arus Dana Indonesia Triwulanan 1993-1997:1*, Jakarta, 1997.
- , *Pendapatan Nasional Indonesia Triwulanan 1988 - 1990*, Jakarta, 1991.
- Board of Governors of the Federal Reserve System, Guide to the Flow of Funds Accounts, Washington, D.C, 2000.
- Central Bank of the Philippines, *The Flow of Funds of the Philippines 1980 - 1983*, Manila, 1985.
- , *Flow of Funds Manual of Accounts*, Manila, 1983.
- Copeland, M.A., *A study of Money Flows in the United States*, New York, 1952.
- Dawson, J.C., *Furthering the Development of Flow of Funds Analysis for Indonesia*, Final Report of a Mission Funded By USAID, Jakarta, 1991.
- Dawson, J.C. (Editor), *Flow-of-Funds Analysis for Practitioners*, New York, 1996
- Geehan, Randy, *An Analysis of the Indonesia Flow of Funds*, Occational Paper for the Seminar, Jakarta, Mei, 1990.
- Geehan, Saldua, and Blances, *The Indonesian Flow of Funds: Manual of Operation*, Consultan Report, Jakarta, 1990.

Powelson, J.P., *National Income and Flow of Funds Analysis*, Mc.Graw Hillbook Company Inc., New York, 1960.

United Nations, *A system of National Accounts, Studies in Method*, Series F No.2, New York, 1968.

—————, *Provisional International Guidelines on the National and Sectoral Balance Sheet and Reconciliation Accounts of the System of National Accounts*, Statistical Paper, Series M No. 60, New York, 1977.

—————, *Handbook of National Accounting, Public Sector*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

—————, *Handbook of National Accounting, Public Sector*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2 Cetakan ke-4, Jakarta, 1975

<https://www.bps.go.id>

Tabel-Tabel

<https://www.kbps.go.id>

TABEL 1. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 1. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
U	S	U	S	U	S	U	S	U	S		
0100	Tabungan Bruto		16,437		76,144		978		109,148		104,992
0200	Investasi Nonfinansial	189		7,830		1,076		23,642		82,562	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	16,248		68,314		(98)		85,506		22,430	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0		(0)		0		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	16,248		68,314		(98)		85,506		22,430	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(19,164)		103,017		45,745		162,648		(144,977)	
0700	Jumlah Sumber Finansial		(35,411)		34,703		45,843		77,142		(167,407)
0800	Cadangan Valas Pemerintah	24,878	6,141								
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	160	5,805	1,973	(14,066)	(639)	57	138	12	3,178	13
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)		3,005	(9,435)	57,421	8,797		61,472		(7,799)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas		(4,172)	(9,946)	(9,110)	(284)		(299)		(3,800)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		7,177	512	66,531	9,081		61,771		(3,999)	
1021	Uang Kertas dan Logam		14,328	472		(484)		13,546			
1022	Giro		(7,141)		25,352	3,133		6,669		(2,557)	
1023	Tabungan		(10)	1	50,658	2,730		48,850		359	
1024	Deposito Berjangka			39	(9,478)	3,701		(7,294)		(1,802)	
1025	Simpanan Rupiah lainnya										
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi										
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			(2,186)	(2,225)	883	700	245		(417)	(1,350)
1200	Kredit (Jumlah)	(513)	(822)	72,651	(3,012)	(206)	2,216	1,399	2,099	(2,863)	(81)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(511)		70,942			990		(15)		44
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				(1,275)	368	(382)	1,399		(1,642)	
1230	Kredit dalam Valas	(1)	(822)	1,709	(1,737)	(574)	1,608		2,114	(1,221)	(125)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	527	(0)	848	(224,075)	3,632	5,789	151,729		(185,576)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(33,082)	(73,957)	(31,494)	4,093	14,087	2,648	21,747		(84,974)	(57,572)
1410	Surat Berharga Pemerintah	(33,082)	(60,466)	(34,778)						(60,466)	(57,572)
1420	Surat Berharga Lainnya		(13,491)	3,284	4,093	14,087	2,648	21,747		(24,508)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					6,230	31,476	19,552			
1800	Kredit Dagang					6,988	810	2,900	5,347		
2000	Rekening Antar Bank	(1,646)	36,477	33,351	(1,207)						
9000	Rupa-rupa	(9,488)	(12,062)	37,308	217,775	5,973	2,147	(96,534)	69,684	133,474	(108,417)
	TOTAL	(18,974)	(18,974)	110,847	110,847	46,821	46,821	186,290	186,290	(62,415)	(62,415)

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

INDONESIA, 2003 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2003 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	53,127		225,011		(70,366)		515,470	GROSS SAVING	0100
82,651		317,520				515,471		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(29,524)		(92,509)		(70,366)		(0)		NET LENDING/BORROWING	0300
0						(0)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(29,525)		(92,509)		(70,366)				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
99,626		331,978		(40,489)		538,384		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	129,151		424,487		29,877		538,384	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
				6,141	24,878	31,019	31,019	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
3	(398)	(13,512)	(6,959)	(9,010)	(2,172)	(17,709)	(17,708)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
14,955	15	(10,252)		(7,203)	(9,906)	50,535	50,536	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
5,320		(6,170)		(8,049)	(9,946)	(23,228)	(23,228)	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
9,634		(4,097)		846	41	73,748	73,749	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
293		501				14,328	14,328	CURRENCY AND COIN	1021
2,020		8,648		297		18,211	18,210	DEMAND DEPOSITS	1022
		(2,013)		720		50,648	50,648	SAVING DEPOSITS	1023
7,322		(11,233)		(171)	41	(9,438)	(9,438)	TIME DEPOSITS	1024
								OTHER RUPIAH DEPOSITS	
	15	15				15	15	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(2,710)	(108)	14,177	12,406	(2,178)	(1,610)	7,813	7,813	SHORT TERM SECURITIES	1100
539	(431)	(8,377)	61,343	(874)	445	61,757	61,757	CREDIT	1200
	(115)		68,794		733	70,431	70,431	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
628	181	(2,446)		216		(1,477)	(1,476)	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
(89)	(497)	(5,931)	(7,451)	(1,090)	(288)	(7,197)	(7,198)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	142,461	189,006	241,253	5,224	(39)	165,390	165,390	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(577)	5,899	10,426	30,044	14,906	(115)	(88,961)	(88,961)	LONG TERM SECURITIES	1400
		6,136		4,151		(118,039)	(118,039)	GOVERNMENT BONDS	1410
(577)	5,899	4,290	30,044	10,755	(115)	29,078	29,078	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	996	6,690				32,472	32,472	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
1,645	17,288	18,580	6,668			30,113	30,113	TRADE CREDITS	1800
						31,705	31,705	INTERBANK CLAIMS	2000
85,771	(36,571)	125,240	80,180	(47,495)	18,395	234,249	234,249	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
182,278	182,278	649,498	649,498	(40,489)	(40,489)	1,053,855	1,053,855	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

TABEL 2. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 2. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		20,486		50,105		3,460		138,612		101,857
0200	Investasi Nonfinansial	(196)		3,147		316		74,321		76,437	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	20,681		46,958		3,145		64,291		25,420	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		0				(0)		0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	20,681		46,958		3,145		64,291		25,420	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	51,254		52,435		45,745		123,493		48,284	
0700	Jumlah Sumber Finansial		30,572		5,477		42,600		59,202		22,864
0800	Cadangan Valas Pemerintah	27,891									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	149		(23,294)	13,632	(3)	(93)		19	1,659	72
	1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)	2,283	(19,066)	(9,739)	67,809	2,544		95,156		(21,112)	
	1010 Uang & Simpanan dalam Valas	2,283	(17,974)	(9,210)	(817)			(6,122)		(12,154)	
	1020 Uang & Simpanan dalam Rupiah		(1,092)	(529)	68,626	2,544		101,278		(8,958)	
	1021 Uang Kertas dan Logam		14,161	(534)		116		40,081			
	1022 Giro		(15,217)	(0)	17,560	114		4,318		(7,583)	
	1023 Tabungan		(36)		53,590	73		54,341		(23)	
	1024 Deposito Berjangka			(42)	(2,444)	2,241		2,538		(1,657)	
	1025 Simpanan Rupiah lainnya			47	(80)					304	
	1030 Tabungan Giro Pos dan Koperasi										
	1100 Surat Berharga Jangka Pendek			5,642	5,880	(373)	(132)	298		(3,352)	(419)
	1200 Kredit (Jumlah)	7,192	1,251	116,409	3,737	694	21,752	8,193	78,696	67	50,490
	1210 Kredit Bank dalam Rupiah	7,189		96,934			6,899		67,063		(1,491)
	1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp				1,477	686	3,572	8,193	11,364	831	
	1230 Kredit dalam Valas	2	1,251	19,475	2,260	8	11,281		269	(764)	51,981
	1300 Modal Saham dan Penyertaan	(4)	441	283	(31,856)	4,475	5,857	52,251		(37,041)	
	1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	7,267	5,780	(36,326)	1,977	31,564	4,954	(381)		5,586	(25,356)
	1410 Surat Berharga Pemerintah	7,267	34,140	(34,663)		22,989				34,140	(25,356)
	1420 Surat Berharga Lainnya		(28,360)	(1,662)	1,977	8,575	4,954	(381)		(28,554)	
	1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun					156	17,425	10,271			
	1800 Kredit Dagang					17,844	1,346	9,372	5,829		
	2000 Rekening Antar Bank	(4,362)	32,747	33,723	(3,386)						
	9000 Rupa-rupa	10,839	9,419	(34,265)	(52,315)	6,502	(8,509)	(51,666)	(25,342)	102,477	(1,923)
	TOTAL	51,058	51,058	55,582	55,582	46,061	46,061	197,814	197,814	124,721	124,721

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

INDONESIA, 2004 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2004 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	83,933		181,223		(27,383)		552,292	GROSS SAVING	0100
147,622		250,645				552,292		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(63,689)		(69,423)		(27,383)		0		NET LENDING/BORROWING	0300
(0)		(0)		(0)		(0)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(63,689)		(69,422)		(27,383)		1		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
(22,835)		255,579		103,862		657,816		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	40,854		325,001		131,244		657,816	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					27,891	27,891	27,891	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		1,824	(702)	12,864	(19,728)	(6,800)	(6,800)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
16,617	15	(33,102)		(2,276)	1,614	50,373	50,372	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
5,467		554		2,000	1,610	(17,181)	(17,181)	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
11,150		(33,671)		(4,275)	4	67,539	67,539	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
502		(26,004)				14,161	14,161	CURRENCY AND COIN	1021
2,327		6,705		(3,538)	(0)	2,343	2,343	DEMAND DEPOSITS	1022
		83		(921)		53,554	53,554	SAVING DEPOSITS	1023
8,322		(13,456)		(432)	(42)	(2,486)	(2,486)	TIME DEPOSITS	1024
		(999)		615	47	(33)	(33)	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
	15	15				15	15	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(3,145)	881	3,950	5,829	8,978	(41)	11,998	11,998	SHORT TERM SECURITIES	1100
732	1,169	3,827	111,125	127,535	(3,581)	264,648	264,648	CREDIT	1200
	(125)		32,609		(832)	104,124	104,124	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
732	201	6,147		26		16,614	16,614	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	1,093	(2,320)	78,516	127,510	(2,749)	143,911	143,911	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	20,781	162,830	222,581	36,705	1,695	219,500	219,499	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(623)		(17,338)	17,414	14,558	(461)	4,308	4,308	LONG TERM SECURITIES	1400
		(34,914)		13,965		8,783	8,783	GOVERNMENT BONDS	1410
(623)		17,576	17,414	593	(461)	(4,476)	(4,475)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	1,084	8,082				18,509	18,509	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
1,645	24,800	12,789	11,390	1,714		43,365	43,365	TRADE CREDITS	1800
						29,361	29,361	INTERBANK CLAIMS	2000
(38,061)	(7,876)	112,717	(42,636)	(96,219)	123,855	12,324	12,324	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
124,787	124,787	506,224	506,224	103,862	103,861	1,210,108	1,210,108	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

TABEL 3. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 3. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
U	S	U	S	U	S	U	S	U	S		
0100	Tabungan Bruto		17,138		45,511		10,801		191,768		108,813
0200	Investasi Nonfinansial	556		4,314		1,036		33,425		90,213	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	16,582		41,197		9,764		158,343		18,600	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0		0		0		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	16,582		41,197		9,764		158,343		18,600	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	30,845		196,786		53,834		257,427		55,067	
0700	Jumlah Sumber Finansial		14,262		155,589		44,070		99,084		36,467
0800	Cadangan Valas Pemerintah	4,090									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(997)		691	(438)	(13)	53		63	97	(69)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(1,220)	19,329	50,122	170,954	6,826		120,784		32,275	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(1,220)	3,206	46,980	54,810	1,210		19,859		3,443	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		16,123	3,142	116,144	5,616		75,125		28,832	
1021	Uang Kertas dan Logam		17,975	3,003		749		5,989		749	
1022	Giro		(1,895)	(0)	22,950	(672)		(684)		22,395	
1023	Tabungan		43		(13,892)	227		(15,265)		388	
1024	Deposito Berjangka				107,041	5,295		85,059		4,623	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			139	45	16		26		678	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi							25,800			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			5,116	(211)	422	418	178		(8)	
1200	Kredit (Jumlah)	(13,715)	(4,491)	144,974	5,148	1,672	15,127	68	85,828	(689)	(31,712)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(13,716)		134,594			4,992		86,840		(12,734)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				2,929	1,753	1,549	68	(835)	(385)	
1230	Kredit dalam Valas	2	(4,491)	10,380	2,219	(80)	8,586		(176)	(304)	(18,977)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(0)	(79)	(65)	3,806	3,633	1,132	50,211		(7,934)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	20,322	7,139	(1,107)	790	17,760	3,900	13,200		7,213	13,598
1410	Surat Berharga Pemerintah	20,322	8,582	(806)		11,043		(1,850)		8,582	13,598
1420	Surat Berharga Lainnya		(1,443)	(301)	790	6,717	3,900	15,050		(1,369)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					1,383	17,329	16,106			
1800	Kredit Dagang					13,493	8,854	6,477	10,197		
2000	Rekening Antar Bank	(722)	11,536	4,839	3,658	4,149	(24)	4,237			
9000	Rupa-rupa	23,086	(19,172)	(7,784)	(28,119)	4,509	(2,720)	46,167	2,995	24,113	54,649
	TOTAL	31,400	31,400	201,100	201,100	54,871	54,871	290,852	290,852	145,280	145,280

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

INDONESIA, 2005 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2005 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	3,833		432,804		(71,942)		738,726	GROSS SAVING	0100
70,456		538,726				738,726		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(66,623)		(105,922)		(71,942)		(0)		NET LENDING/BORROWING	0300
(0)						0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(66,623)		(105,922)		(71,942)		(1)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
73,375		146,802		14,409		828,545		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	139,998		252,724		86,351		828,545	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					4,090	4,090	4,090	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		10,188	16,386	14,861	8,831	24,827	24,827	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
15,646		41,914	25,800	3,679	53,941	270,025	270,025	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
8,586		30,144		2,817	53,802	111,818	111,818	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
7,060		11,770		862	139	132,407	132,407	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1,497		5,989				17,975	17,975	CURRENCY AND COIN	1021
(741)		(918)		1,676		21,055	21,055	DEMAND DEPOSITS	1022
(139)		838		102		(13,849)	(13,849)	SAVING DEPOSITS	1023
6,558		5,757		(251)		107,041	107,041	TIME DEPOSITS	1024
(115)		103		(664)	139	184	184	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
			25,800			25,800	25,800	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
1,255	(5)	2,142	11,010	8,438	6,330	17,543	17,543	SHORT TERM SECURITIES	1100
27	3,916	(109)	32,643	(24,494)	1,275	107,734	107,734	CREDIT	1200
	2,637		38,845		299	120,878	120,878	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
27	58	(1,209)	(732)	2,716		2,969	2,969	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	1,221	1,100	(5,470)	(27,210)	975	(16,114)	(16,114)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
19,221	44,239	56,234	113,259	41,236	179	162,536	162,536	STOCK AND PARTICIPATION	1300
1,715	3,637	(15,258)	46,558	33,701	1,924	77,546	77,546	LONG TERM SECURITIES	1400
(192)		(35,265)		20,345		22,180	22,180	GOVERNMENT BONDS	1410
1,907	3,637	20,007	46,558	13,355	1,924	55,366	55,366	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	590	430				17,919	17,919	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
7,782	21,183	12,483	1,392	1,392		41,627	41,627	TRADE CREDITS	1800
		(4,201)	24	6,892		15,195	15,195	INTERBANK CLAIMS	2000
27,729	66,438	42,979	5,652	(71,295)	9,781	89,504	89,505	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
143,831	143,831	685,528	685,528	14,409	14,409	1,567,271	1,567,271	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

TABEL 4. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 4. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	
0100	Tabungan Bruto		17,256		27,613		8,815		180,262		181,082
0200	Investasi Nonfinansial	243		2,891		1,567		31,417		113,721	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	17,013		24,722		7,249		148,845		67,361	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500			0							
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	17,013		24,722		7,249		148,845		67,361	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	126,964		229,329		30,887		237,046		98,784	
0700	Jumlah Sumber Finansial		109,951		204,607		23,638		88,201		31,423
0800	Cadangan Valas Pemerintah	29,423									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(729)		(6,295)	(5,711)	(25)	98		(70)	(184)	64
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	13,228	(76,335)	(14,690)	161,175	12,470		84,189		2,425	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	13,228	(8,458)	(21,812)	(4,746)	(730)		(5,526)		(11,033)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		(67,876)	7,122	165,921	13,200		80,522		13,458	
1021	Uang Kertas dan Logam		33,703	7,031		1,334		10,669		1,334	
1022	Giro		(101,324)	(1)	57,241	1,016		9,362		1,419	
1023	Tabungan		(256)		52,904	372		43,461		1,508	
1024	Deposito Berjangka				55,261	10,522		17,021		8,931	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			92	515	(43)		9		266	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi							9,193			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			2,127	6,282	35	(409)	126			(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(156)	(5,834)	99,969	(608)	(123)	6,636	(57)	65,197	506	(67,241)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(154)		75,599			5,441		64,781		898
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				(2,550)	(123)	1,321	(57)	(1,547)	321	
1230	Kredit dalam Valas	(2)	(5,834)	24,370	1,942		(126)	(0)	1,963	185	(68,139)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	44	(117)	(106)	8,694	(136)	3,643	34,824	(200)	5,680	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	11,810	13,626	(9,721)	1,828	4,689	(8)	1		15,917	32,284
1410	Surat Berharga Pemerintah	11,810	14,349	(11,505)		3,567				14,349	32,284
1420	Surat Berharga Lainnya		(724)	1,784	1,828	1,122	(8)	1		1,568	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					4,363	20,976	16,813			
1800	Kredit Dagang					29,784	(5,904)	19,259	21,787		
2000	Rekening Antar Bank	167	142,713	156,564	22,045	7,672	13	51			
9000	Rupa-rupa	73,178	35,898	1,481	10,902	(27,841)	(1,406)	81,839	1,487	74,440	66,316
	TOTAL	127,207	127,207	232,220	232,220	32,454	32,454	268,463	268,463	212,505	212,505

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

INDONESIA, 2006 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2006 (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		B I S N I S		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	3,708		467,893		(38,460)		848,168	GROSS SAVING	0100
78,006		620,324				848,168		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(74,298)		(152,431)		(38,460)				NET LENDING/BORROWING	0300
								STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(74,298)		(152,431)		(38,460)				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
12,952		323,518		44,642		1,104,121		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	87,250		475,949		83,101		1,104,121	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					29,423	29,423	29,423	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
		(51,331)	(58,753)	(23,089)	(17,280)	(81,653)	(81,653)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
11,642		53,085	9,193	(76,257)	(7,943)	86,091	86,091	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
5,683		(1,514)		466	(8,034)	(21,238)	(21,238)	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
5,959		54,599		(76,724)	91	98,136	98,136	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
2,667		10,669				33,703	33,703	CURRENCY AND COIN	1021
155		20,647		(76,682)	(1)	(44,083)	(44,083)	DEMAND DEPOSITS	1022
1,148		5,643		517		52,648	52,648	SAVING DEPOSITS	1023
2,012		17,327		(551)		55,261	55,261	TIME DEPOSITS	1024
(24)		314		(7)	92	607	607	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1030
			9,193			9,193	9,193	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
49	(275)	(3,110)	(1,205)	2,205	(2,962)	1,431	1,431	SHORT TERM SECURITIES	1100
(59)	10,564	1,441	(94,598)	(185,876)	1,531	(84,355)	(84,353)	CREDIT	1200
	2,876		943		506	75,445	75,445	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(59)	(30)	456	256	(3,091)		(2,553)	(2,550)	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	7,718	985	(95,797)	(182,786)	1,026	(157,248)	(157,248)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
7,670	65,774	464,912	519,376	79,044	(5,240)	591,932	591,932	STOCK AND PARTICIPATION	1300
583	40	11,946	16,275	25,991	(2,827)	61,217	61,217	LONG TERM SECURITIES	1400
(472)		17,638		11,246		46,633	46,633	GOVERNMENT BONDS	1410
1,055	40	(5,691)	16,275	14,745	(2,827)	14,584	14,584	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	600	400				21,576	21,576	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
5,762	8,077	58,352	59,344	2,331	32,183	115,488	115,488	TRADE CREDITS	1800
		(2,978)		3,297		164,772	164,772	INTERBANK CLAIMS	2000
(12,694)	2,469	(209,201)	26,316	216,997	56,215	198,200	198,197	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
90,958	90,958	943,842	943,842	44,642	44,642	1,952,289	1,952,289	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

TABEL 5. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 5. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	
0100	Tabungan Bruto		(15,432)		24,690		19,386		241,342		179,123
0200	Investasi Nonfinansial	283		2,876		199		161,772		123,886	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(15,715)		21,814		19,187		79,571		55,238	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0						0			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(15,715)		21,814		19,187		79,571		55,238	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	194,331		298,047		95,082		484,081		(818)	
0700	Jumlah Sumber Finansial		210,046		276,233		75,895		404,510		(56,056)
0800	Cadangan Valas Pemerintah	157,378									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	121		3,162	637	0	149		108		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(4,543)	43,289	(9,249)	232,504	4,766		126,026		(8,408)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(4,543)	(4,626)	(20,110)	35,276	2,475		3,844		(4,788)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		47,914	10,861	197,229	2,291		122,182		(3,620)	
1021	Uang Kertas dan Logam		42,213	9,900		1,616		12,925		1,616	
1022	Giro		5,698		59,407	2,694		8,679		(7,211)	
1023	Tabungan		3		102,057	(393)		104,291		(773)	
1024	Deposito Berjangka				33,079	(1,625)		(3,892)		2,288	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			960	2,686	(1)		179		461	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi										
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			1,751	9,861	221	(111)	(571)		14	(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(11,518)	(62)	209,819	5,767	17,110	9,658	15,011	96,985	38	20,824
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(11,519)		155,013		14,398	3,389		97,727	371	(6,784)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				1,527	2,629	(15)	15,012		(299)	
1230	Kredit dalam Valas	1	(62)	54,806	4,239	83	6,283	(1)	(742)	(34)	27,607
1300	Modal Saham dan Penyertaan		288	(255)	9,746	38,813	5,255	44,806		(169)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(7,860)	5,061	3,289	3,076	23,739	3,966	10,930		5,020	59,251
1410	Surat Berharga Pemerintah	(7,860)		(464)		13,904					59,251
1420	Surat Berharga Lainnya		5,061	3,753	3,076	9,835	3,966	10,930		5,020	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					389	47,426	5,747			
1800	Kredit Dagang					1,533	(2)	43,033	45,846		
2000	Rekening Antar Bank	(1,642)	87,668	80,719	4,409	1,192	30	158			
9000	Rupa-rupa	62,395	73,803	8,811	10,234	7,318	9,523	238,941	261,572	2,687	(136,130)
	TOTAL	194,614	194,614	300,924	300,924	95,281	95,281	645,852	645,852	123,068	123,068

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

INDONESIA, 2007*) (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2007*) (IN BILLION RUPIAHS)

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS		REST OF THE WORLD		TOTAL			
GOVT ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES							
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	40,594		492,675		2,782		985,161	GROSS SAVING	0100
75,508		620,638				985,161		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(34,914)		(127,963)		2,782				NET LENDING/BORROWING	0300
		0						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(34,914)		(127,963)		2,782				NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
106,512		903,455		230,651		2,311,341		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	141,426		1,031,418		227,869		2,311,341	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					157,378	157,378	157,378	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	0	12,732	16,578	17,315	15,858	33,330	33,330	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
27,513		116,379		6,572	(16,737)	259,056	259,056	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
2,235		30,914		2,924	(17,698)	12,953	12,953	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
25,278		85,464		3,648	960	246,103	246,103	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
3,231		12,925				42,213	42,213	CURRENCY AND COIN	1021
17,849		40,174		2,921		65,105	65,105	DEMAND DEPOSITS	1022
(349)		(91)		(625)		102,060	102,060	SAVING DEPOSITS	1023
4,074		31,117		1,117		33,079	33,079	TIME DEPOSITS	1024
473		1,340		235	960	3,646	3,646	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
								POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
271	632	2,116	14,410	17,320	(3,670)	21,123	21,123	SHORT TERM SECURITIES	1100
187	12,140	1,793	279,188	193,139	1,079	425,579	425,579	CREDIT	1200
	(488)	148	64,822		(256)	158,411	158,411	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
187	1,396	634	16,848	1,594		19,757	19,757	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	11,232	1,010	197,518	191,544	1,335	247,410	247,410	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	101,356	542,966	641,936	132,278	(142)	758,438	758,438	STOCK AND PARTICIPATION	1300
2,887	1,960	5,913	5,539	32,180	(2,755)	76,098	76,098	LONG TERM SECURITIES	1400
		15,004		38,666		59,251	59,251	GOVERNMENT BONDS	1410
2,887	1,960	(9,091)	5,539	(6,485)	(2,755)	16,847	16,847	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	2,688	43,979				50,114	50,114	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
2,830	11,518	82,352	63,083	3,208	12,512	132,956	132,956	TRADE CREDITS	1800
		1,769		9,912		92,107	92,107	INTERBANK CLAIMS	2000
72,824	11,131	93,457	10,683	(181,273)	64,346	305,162	305,162	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
182,020	182,020	1,524,093	1,524,093	230,651	230,651	3,296,502	3,296,502	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

TABEL 6. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 6. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KEUANGAN/			
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH	
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GOVERNMENT	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
U	S	U	S	U	S	U	S	U	S		
0100	Tabungan Bruto		18,624		50,149		18,608		275,449		238,584
0200	Investasi Nonfinansial	176		6,154		2,939		186,531		181,308	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	18,448		43,995		15,668		88,918		57,276	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500					0				(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	18,448		43,995		15,668		88,918		57,276	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(104,120)		331,247		60,336		220,488		127,633	
0700	Jumlah Sumber Finansial		(122,568)		287,252		44,668		131,569		70,357
0800	Cadangan Valas Pemerintah	44,180									
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	234		16,651	3,841	10	(191)		130		
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(16,229)	120,450	74,645	267,600	7,829		181,491		115,100	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(16,229)	54,377	57,950	83,132	(1,039)		28,574		54,422	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		66,074	16,694	184,468	8,868		139,751		60,678	
1021	Uang Kertas dan Logam		43,605	16,825		1,339		10,712		1,339	
1022	Giro		22,480		(2,941)	35		(3,852)		45,226	
1023	Tabungan		(12)		43,161	(63)		42,268		88	
1024	Deposito Berjangka				138,247	7,538		90,518		8,755	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(131)	6,001	18		104		5,270	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi							13,166			
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			9,334	(9,276)	68	370	(341)		(4)	0
1200	Kredit (Jumlah)	47	713	317,593	13,379	32,385	32,200	14,916	189,139	(100)	142,218
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	42		273,911			29,218	8,479	154,845	(320)	506
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp				(82)	2,834		14,916	34,192	204	
1230	Kredit dalam Valas	4	713	43,682	13,461	332	23,721		102	17	141,712
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(0)	522	1,056	(11,727)	(2,242)	3,118	10,727		(3,559)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	2,471	12,990	(12,493)	(222)	17,989	(1,641)	(36)		12,985	50,225
1410	Surat Berharga Pemerintah	2,471		(12,242)		17,830					50,225
1420	Surat Berharga Lainnya		12,990	(250)	(222)	158	(1,641)	(36)		12,985	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun					532	9,368	10,469			
1800	Kredit Dagang					1,753	3,976	(24,065)	(4,017)		
2000	Rekening Antar Bank	2,234	(124,323)	(88,564)	9,194	(7,084)	26	(154)			
9000	Rupa-rupa	(137,056)	(132,920)	13,024	14,463	9,097	(2,558)	27,480	(53,683)	3,210	(122,086)
	TOTAL	(103,944)	(103,944)	337,401	337,401	63,275	63,275	407,019	407,019	308,941	308,941

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

**) Angka sangat sementara

INDONESIA, 2008 **)(Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2008*) (IN BILLION RUPIAHS)**

NON FINANCIAL SECTORS				LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
P	S	P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S	U	S		
	64,475		591,896		119,463		1,377,247	GROSS SAVING	0100
114,542		885,597				1,377,247		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(50,067)		(293,701)		119,463		0		NET LENDING/BORROWING	0300
						0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(50,067)		(293,701)		119,463		(0)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
31,120		(354,105)		248,115		560,714		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	81,187		(60,404)		128,652		560,714	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
					44,180	44,180	44,180	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
	212	(15,280)	13,439	7,752	(8,063)	9,367	9,367	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(7,650)		78,439	13,166	12,383	44,792	446,007	446,007	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(3,631)		45,909		16,475	44,922	182,431	182,431	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(4,019)		32,530		(4,091)	(131)	250,411	250,411	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
2,678		10,712				43,605	43,605	CURRENCY AND COIN	1021
(16,536)		(871)		(4,462)		19,539	19,539	DEMAND DEPOSITS	1022
(397)		735		516		43,149	43,149	SAVING DEPOSITS	1023
10,576		20,916		(57)		138,247	138,247	TIME DEPOSITS	1024
(340)		1,038		(89)	(131)	5,870	5,870	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
			13,166			13,166	13,166	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(79)	(1,026)	954	12,505	2	7,361	9,934	9,934	SHORT TERM SECURITIES	1100
935	11,766	30,034	358,150	369,071	17,316	764,881	764,881	CREDIT	1200
	12,442	(92)	126,265		222	302,760	302,760	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
935	2,462	14,186	(3,307)	191		33,265	33,265	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	(3,139)	15,941	235,192	368,880	17,094	428,856	428,856	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
	24,679	(672,431)	(782,512)	(58,283)	41,189	(724,731)	(724,731)	STOCK AND PARTICIPATION	1300
7,325	(268)	(58,892)	(25,259)	69,203	2,727	38,551	38,551	LONG TERM SECURITIES	1400
		(21,520)		63,686		50,225	50,225	GOVERNMENT BONDS	1410
7,325	(268)	(37,372)	(25,259)	5,517	2,727	(11,674)	(11,674)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	3,899	2,266				13,267	13,267	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
4	18	397,244	380,077	9,169	4,050	384,104	384,104	TRADE CREDITS	1800
		(2,001)		(19,534)		(115,102)	(115,102)	INTERBANK CLAIMS	2000
30,586	41,909	(114,437)	(29,971)	(141,648)	(24,899)	(309,744)	(309,744)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
145,662	145,662	531,492	531,492	248,115	248,115	1,937,960	1,937,960	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

**) Very Preliminary Figures

TABEL 7. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 7. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2003		2004		2005	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		16,437		20,486		17,138
0200	Investasi Nonfinansial	189		(196)		556	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	16,248		20,681		16,582	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		(0)		0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	16,248		20,681		16,582	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(19,164)		51,254		30,845	
0700	Jumlah Sumber Finansial		(35,411)		30,572		14,262
0800	Cadangan Valas Pemerintah	24,878	6,141	27,891		4,090	
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	160	5,805	149		(997)	
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)		3,005	2,283	(19,066)	(1,220)	19,329
1010	Uang & Simpanan dalam Valas		(4,172)	2,283	(17,974)	(1,220)	3,206
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		7,177		(1,092)		16,123
1021	Uang Kertas dan Logam		14,328		14,161		17,975
1022	Giro		(7,141)		(15,217)		(1,895)
1023	Tabungan		(10)		(36)		43
1024	Deposito Berjangka						
1025	Simpanan Rupiah lainnya						
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek						
1200	Kredit (Jumlah)	(513)	(822)	7,192	1,251	(13,715)	(4,491)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(511)		7,189		(13,716)	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp						
1230	Kredit dalam Valas	(1)	(822)	2	1,251	2	(4,491)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	527	(0)	(4)	441	(0)	(79)
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(33,082)	(73,957)	7,267	5,780	20,322	7,139
1410	Surat Berharga Pemerintah	(33,082)	(60,466)	7,267	34,140	20,322	8,582
1420	Surat Berharga Lainnya		(13,491)		(28,360)		(1,443)
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	(1,646)	36,477	(4,362)	32,747	(722)	11,536
9000	Rupa-rupa	(9,488)	(12,062)	10,839	9,419	23,086	(19,172)
	JUMLAH	(18,974)	(18,974)	51,058	51,058	31,400	31,400

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR BANK SENTRAL, 2003-2008 (MILIAR RUPIAH)
FOR CENTRAL BANK SECTOR, 2003-2008 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2006		2007 ^{*)}		2008 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	17,256		(15,432)		18,624	GROSS SAVING	0100
243		283		176		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
17,013		(15,715)		18,448		NET LENDING/BORROWING	0300
		0				STATISTICAL DISCREPANCY	0400
17,013		(15,715)		18,448		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
126,964		194,331		(104,120)		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	109,951		210,046		(122,568)	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
29,423		157,378		44,180		OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
(729)		121		234		OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
13,228	(76,335)	(4,543)	43,289	(16,229)	120,450	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
13,228	(8,458)	(4,543)	(4,626)	(16,229)	54,377	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
	(67,876)		47,914		66,074	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
	33,703		42,213		43,605	CURRENCY AND COIN	1021
	(101,324)		5,698		22,480	DEMAND DEPOSITS	1022
	(256)		3		(12)	SAVING DEPOSITS	1023
						TIME DEPOSITS	1024
						OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
						SHORT TERM SECURITIES	1100
(156)	(5,834)	(11,518)	(62)	47	713	CREDIT	1200
(154)		(11,519)		42		BANK LOANS IN RUPIAH	1210
						OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
(2)	(5,834)	1	(62)	4	713	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
44	(117)		288	(0)	522	STOCK AND PARTICIPATION	1300
11,810	13,626	(7,860)	5,061	2,471	12,990	LONG TERM SECURITIES	1400
11,810	14,349	(7,860)		2,471		GOVERNMENT BONDS	1410
	(724)		5,061		12,990	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
167	142,713	(1,642)	87,668	2,234	(124,323)	INTERBANK CLAIMS	2000
73,178	35,898	62,395	73,803	(137,056)	(132,920)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
127,207	127,207	194,614	194,614	(103,944)	(103,944)	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

TABEL 8. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 8. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2003		2004		2005	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		76,144		50,105		45,511
0200	Investasi Nonfinansial	7,830		3,147		4,314	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	68,314		46,958		41,197	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		0		0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	68,314		46,958		41,197	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	103,017		52,435		196,786	
0700	Jumlah Sumber Finansial		34,703		5,477		155,589
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	1,973	(14,066)	(23,294)	13,632	691	(438)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(9,435)	57,421	(9,739)	67,809	50,122	170,954
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(9,946)	(9,110)	(9,210)	(817)	46,980	54,810
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	512	66,531	(529)	68,626	3,142	116,144
1021	Uang Kertas dan Logam	472		(534)		3,003	
1022	Giro		25,352	(0)	17,560	(0)	22,950
1023	Tabungan	1	50,658		53,590		(13,892)
1024	Deposito Berjangka	39	(9,478)	(42)	(2,444)		107,041
1025	Simpanan Rupiah lainnya			47	(80)	139	45
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(2,186)	(2,225)	5,642	5,880	5,116	(211)
1200	Kredit (Jumlah)	72,651	(3,012)	116,409	3,737	144,974	5,148
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	70,942		96,934		134,594	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp		(1,275)		1,477		2,929
1230	Kredit dalam Valas	1,709	(1,737)	19,475	2,260	10,380	2,219
1300	Modal Saham dan Penyertaan	848	(224,075)	283	(31,856)	(65)	3,806
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(31,494)	4,093	(36,326)	1,977	(1,107)	790
1410	Surat Berharga Pemerintah	(34,778)		(34,663)		(806)	
1420	Surat Berharga Lainnya	3,284	4,093	(1,662)	1,977	(301)	790
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	33,351	(1,207)	33,723	(3,386)	4,839	3,658
9000	Rupa-rupa	37,308	217,775	(34,265)	(52,315)	(7,784)	(28,119)
	JUMLAH	110,847	110,847	55,582	55,582	201,100	201,100

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR PERBANKAN, 2003-2008 (MILIAR RUPIAH)
FOR BANKING SECTOR, 2003-2008 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2006		2007 ^{*)}		2008 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	27,613		24,690		50,149	GROSS SAVING	0100
2,891		2,876		6,154		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
24,722		21,814		43,995		NET LENDING/BORROWING	0300
0						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
24,722		21,814		43,995		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
229,329		298,047		331,247		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	204,607		276,233		287,252	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
(6,295)	(5,711)	3,162	637	16,651	3,841	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(14,690)	161,175	(9,249)	232,504	74,645	267,600	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(21,812)	(4,746)	(20,110)	35,276	57,950	83,132	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
7,122	165,921	10,861	197,229	16,694	184,468	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
7,031		9,900		16,825		CURRENCY AND COIN	1021
(1)	57,241		59,407		(2,941)	DEMAND DEPOSITS	1022
	52,904		102,057		43,161	SAVING DEPOSITS	1023
	55,261		33,079		138,247	TIME DEPOSITS	1024
92	515	960	2,686	(131)	6,001	OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
2,127	6,282	1,751	9,861	9,334	(9,276)	SHORT TERM SECURITIES	1100
99,969	(608)	209,819	5,767	317,593	13,379	CREDIT	1200
75,599		155,013		273,911		BANK LOANS IN RUPIAH	1210
	(2,550)		1,527		(82)	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
24,370	1,942	54,806	4,239	43,682	13,461	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
(106)	8,694	(255)	9,746	1,056	(11,727)	STOCK AND PARTICIPATION	1300
(9,721)	1,828	3,289	3,076	(12,493)	(222)	LONG TERM SECURITIES	1400
(11,505)		(464)		(12,242)		GOVERNMENT BONDS	1410
1,784	1,828	3,753	3,076	(250)	(222)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
156,564	22,045	80,719	4,409	(88,564)	9,194	INTERBANK CLAIMS	2000
1,481	10,902	8,811	10,234	13,024	14,463	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
232,220	232,220	300,924	300,924	337,401	337,401	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 9. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 9. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2003		2004		2005	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		978		3,460		10,801
0200	Investasi Nonfinansial	1,076		316		1,036	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(98)		3,145		9,764	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)				0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(98)		3,145		9,764	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	45,745		45,745		53,834	
0700	Jumlah Sumber Finansial		45,843		42,600		44,070
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(639)	57	(3)	(93)	(13)	53
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	8,797		2,544		6,826	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(284)				1,210	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	9,081		2,544		5,616	
1021	Uang Kertas dan Logam	(484)		116		749	
1022	Giro	3,133		114		(672)	
1023	Tabungan	2,730		73		227	
1024	Deposito Berjangka	3,701		2,241		5,295	
1025	Simpanan Rupiah lainnya					16	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	883	700	(373)	(132)	422	418
1200	Kredit (Jumlah)	(206)	2,216	694	21,752	1,672	15,127
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		990		6,899		4,992
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	368	(382)	686	3,572	1,753	1,549
1230	Kredit dalam Valas	(574)	1,608	8	11,281	(80)	8,586
1300	Modal Saham dan Penyertaan	3,632	5,789	4,475	5,857	3,633	1,132
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	14,087	2,648	31,564	4,954	17,760	3,900
1410	Surat Berharga Pemerintah			22,989		11,043	
1420	Surat Berharga Lainnya	14,087	2,648	8,575	4,954	6,717	3,900
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	6,230	31,476	156	17,425	1,383	17,329
1800	Kredit Dagang	6,988	810	17,844	1,346	13,493	8,854
2000	Rekening Antar Bank					4,149	(24)
9000	Rupa-rupa	5,973	2,147	6,502	(8,509)	4,509	(2,720)
	JUMLAH	46,821	46,821	46,061	46,061	54,871	54,871

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, 2003-2008 (MILIAR RUPIAH)
FOR NON BANK FINANCIAL SECTORS, 2003-2008 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2006		2007 ^{*)}		2008 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	8,815		19,386		18,608	GROSS SAVING	0100
1,567		199		2,939		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
7,249		19,187		15,668		NET LENDING/BORROWING	0300
				0		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
7,249		19,187		15,668		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
30,887		95,082		60,336		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	23,638		75,895		44,668	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
(25)	98	0	149	10	(191)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
12,470		4,766		7,829		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(730)		2,475		(1,039)		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
13,200		2,291		8,868		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1,334		1,616		1,339		CURRENCY AND COIN	1021
1,016		2,694		35		DEMAND DEPOSITS	1022
372		(393)		(63)		SAVING DEPOSITS	1023
10,522		(1,625)		7,538		TIME DEPOSITS	1024
(43)		(1)		18		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
35	(409)	221	(111)	68	370	SHORT TERM SECURITIES	1100
(123)	6,636	17,110	9,658	32,385	32,200	CREDIT	1200
	5,441	14,398	3,389	29,218	8,479	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(123)	1,321	2,629	(15)	2,834		OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	(126)	83	6,283	332	23,721	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
(136)	3,643	38,813	5,255	(2,242)	3,118	STOCK AND PARTICIPATION	1300
4,689	(8)	23,739	3,966	17,989	(1,641)	LONG TERM SECURITIES	1400
3,567		13,904		17,830		GOVERNMENT BONDS	1410
1,122	(8)	9,835	3,966	158	(1,641)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
4,363	20,976	389	47,426	532	9,368	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
29,784	(5,904)	1,533	(2)	1,753	3,976	TRADE CREDITS	1800
7,672	13	1,192	30	(7,084)	26	INTERBANK CLAIMS	2000
(27,841)	(1,406)	7,318	9,523	9,097	(2,558)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
32,454	32,454	95,281	95,281	63,275	63,275	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 10. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 10. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2003		2004		2005	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		109,148		138,612		191,768
0200	Investasi Nonfinansial	23,642		74,321		33,425	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	85,506		64,291		158,343	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		(0)		0	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	85,506		64,291		158,343	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	162,648		123,493		257,427	
0700	Jumlah Sumber Finansial		77,142		59,202		99,084
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	138	12		19		63
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	61,472		95,156		120,784	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(299)		(6,122)		19,859	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	61,771		101,278		75,125	
1021	Uang Kertas dan Logam	13,546		40,081		5,989	
1022	Giro	6,669		4,318		(684)	
1023	Tabungan	48,850		54,341		(15,265)	
1024	Deposito Berjangka	(7,294)		2,538		85,059	
1025	Simpanan Rupiah lainnya					26	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi					25,800	
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	245		298		178	
1200	Kredit (Jumlah)	1,399	2,099	8,193	78,696	68	85,828
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		(15)		67,063		86,840
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	1,399		8,193	11,364	68	(835)
1230	Kredit dalam Valas		2,114		269		(176)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	151,729		52,251		50,211	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	21,747		(381)		13,200	
1410	Surat Berharga Pemerintah					(1,850)	
1420	Surat Berharga Lainnya	21,747		(381)		15,050	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	19,552		10,271		16,106	
1800	Kredit Dagang	2,900	5,347	9,372	5,829	6,477	10,197
2000	Rekening Antar Bank					4,237	
9000	Rupa-rupa	(96,534)	69,684	(51,666)	(25,342)	46,167	2,995
	JUMLAH	186,290	186,290	197,814	197,814	290,852	290,852

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR RUMAH TANGGA, 2003-2008 (MILIAR RUPIAH)
FOR HOUSEHOLD SECTOR, 2003-2008 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2006		2007 ^{*)}		2008 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	180,262		241,342		275,449	GROSS SAVING	0100
31,417		161,772		186,531		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
148,845		79,571		88,918		NET LENDING/BORROWING	0300
		0				STATISTICAL DISCREPANCY	0400
148,845		79,571		88,918		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
237,046		484,081		220,488		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	88,201		404,510		131,569	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
	(70)		108		130	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
						OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
84,189		126,026		181,491		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(5,526)		3,844		28,574		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSIT:	1010
80,522		122,182		139,751		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
10,669		12,925		10,712		CURRENCY AND COIN	1021
9,362		8,679		(3,852)		DEMAND DEPOSITS	1022
43,461		104,291		42,268		SAVING DEPOSITS	1023
17,021		(3,892)		90,518		TIME DEPOSITS	1024
9		179		104		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
9,193				13,166		POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
126		(571)		(341)		SHORT TERM SECURITIES	1100
(57)	65,197	15,011	96,985	14,916	189,139	CREDIT	1200
	64,781		97,727		154,845	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(57)	(1,547)	15,012		14,916	34,192	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
(0)	1,963	(1)	(742)		102	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
34,824	(200)	44,806		10,727		STOCK AND PARTICIPATION	1300
1		10,930		(36)		LONG TERM SECURITIES	1400
						GOVERNMENT BONDS	1410
1		10,930		(36)		OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
16,813		5,747		10,469		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
19,259	21,787	43,033	45,846	(24,065)	(4,017)	TRADE CREDITS	1800
51		158		(154)		INTERBANK CLAIMS	2000
81,839	1,487	238,941	261,572	27,480	(53,683)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
268,463	268,463	645,852	645,852	407,019	407,019	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 11. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 11. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2003		2004		2005	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		104,992		101,857		108,813
0200	Investasi Nonfinansial	82,562		76,437		90,213	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	22,430		25,420		18,600	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	(0)		0		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	22,430		25,420		18,600	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(144,977)		48,284		55,067	
0700	Jumlah Sumber Finansial		(167,407)		22,864		36,467
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	3,178	13	1,659	72	97	(69)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(7,799)		(21,112)		32,275	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(3,800)		(12,154)		3,443	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	(3,999)		(8,958)		28,832	
1021	Uang Kertas dan Logam					749	
1022	Giro	(2,557)		(7,583)		22,395	
1023	Tabungan	359		(23)		388	
1024	Deposito Berjangka	(1,802)		(1,657)		4,623	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			304		678	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(417)	(1,350)	(3,352)	(419)	(8)	
1200	Kredit (Jumlah)	(2,863)	(81)	67	50,490	(689)	(31,712)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		44		(1,491)		(12,734)
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(1,642)		831		(385)	
1230	Kredit dalam Valas	(1,221)	(125)	(764)	51,981	(304)	(18,977)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(185,576)		(37,041)		(7,934)	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(84,974)	(57,572)	5,586	(25,356)	7,213	13,598
1410	Surat Berharga Pemerintah	(60,466)	(57,572)	34,140	(25,356)	8,582	13,598
1420	Surat Berharga Lainnya	(24,508)		(28,554)		(1,369)	
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	133,474	(108,417)	102,477	(1,923)	24,113	54,649
	JUMLAH	(62,415)	(62,415)	124,721	124,721	145,280	145,280

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR PEMERINTAH, 2003-2008 (MILIAR RUPIAH)
FOR GENERAL GOVERNMENT SECTOR, 2003-2008 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2006		2007 ^{*)}		2008 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	181,082		179,123		238,584	GROSS SAVING	0100
113,721		123,886		181,308		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
67,361		55,238		57,276		NET LENDING/BORROWING	0300
				(0)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
67,361		55,238		57,276		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
98,784		(818)		127,633		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	31,423		(56,056)		70,357	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
(184)	64					OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
2,425		(8,408)		115,100		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(11,033)		(4,788)		54,422		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
13,458		(3,620)		60,678		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
1,334		1,616		1,339		CURRENCY AND COIN	1021
1,419		(7,211)		45,226		DEMAND DEPOSITS	1022
1,508		(773)		88		SAVING DEPOSITS	1023
8,931		2,288		8,755		TIME DEPOSITS	1024
266		461		5,270		OTHER RUPIAH DEPOSITS	1030
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
	(0)	14	(0)	(4)	0	SHORT TERM SECURITIES	1100
506	(67,241)	38	20,824	(100)	142,218	CREDIT	1200
	898	371	(6,784)	(320)	506	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
321		(299)		204		OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
185	(68,139)	(34)	27,607	17	141,712	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
5,680		(169)		(3,559)		STOCK AND PARTICIPATION	1300
15,917	32,284	5,020	59,251	12,985	50,225	LONG TERM SECURITIES	1400
14,349	32,284		59,251		50,225	GOVERNMENT BONDS	1410
1,568		5,020		12,985		OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
						TRADE CREDITS	1800
						INTERBANK CLAIMS	2000
74,440	66,316	2,687	(136,130)	3,210	(122,086)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
212,505	212,505	123,068	123,068	308,941	308,941	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 12. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 12. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2003		2004		2005	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		53,127		83,933		3,833
0200	Investasi Nonfinansial	82,651		147,622		70,456	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(29,524)		(63,689)		(66,623)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0		(0)		(0)	
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(29,525)		(63,689)		(66,623)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	99,626		(22,835)		73,375	
0700	Jumlah Sumber Finansial		129,151		40,854		139,998
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	3	(398)				
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	14,955	15	16,617	15	15,646	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	5,320		5,467		8,586	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	9,634		11,150		7,060	
1021	Uang Kertas dan Logam	293		502		1,497	
1022	Giro	2,020		2,327		(741)	
1023	Tabungan					(139)	
1024	Deposito Berjangka	7,322		8,322		6,558	
1025	Simpanan Rupiah lainnya					(115)	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi		15		15		
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(2,710)	(108)	(3,145)	881	1,255	(5)
1200	Kredit (Jumlah)	539	(431)	732	1,169	27	3,916
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		(115)		(125)		2,637
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	628	181	732	201	27	58
1230	Kredit dalam Valas	(89)	(497)		1,093		1,221
1300	Modal Saham dan Penyertaan		142,461		20,781	19,221	44,239
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	(577)	5,899	(623)		1,715	3,637
1410	Surat Berharga Pemerintah					(192)	
1420	Surat Berharga Lainnya	(577)	5,899	(623)		1,907	3,637
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		996		1,084		590
1800	Kredit Dagang	1,645	17,288	1,645	24,800	7,782	21,183
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	85,771	(36,571)	(38,061)	(7,876)	27,729	66,438
	JUMLAH	182,278	182,278	124,787	124,787	143,831	143,831

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR PERUSAHAAN PEMERINTAH, 2003-2008 (MILIAR RUPIAH)
FOR GOVERNMENT ENTERPRISES SECTOR, 2003-2008 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2006		2007 ^{*)}		2008 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	3,708		40,594		64,475	GROSS SAVING	0100
78,006		75,508		114,542		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(74,298)		(34,914)		(50,067)		NET LENDING/BORROWING	0300
(74,298)		(34,914)		(50,067)		STATISTICAL DISCREPANCY	0400
						NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
12,952		106,512		31,120		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	87,250		141,426		81,187	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
			0		212	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
11,642		27,513		(7,650)		CURRENCY AND DEPOSITS	1000
5,683		2,235		(3,631)		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
5,959		25,278		(4,019)		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
2,667		3,231		2,678		CURRENCY AND COIN	1021
155		17,849		(16,536)		DEMAND DEPOSITS	1022
1,148		(349)		(397)		SAVING DEPOSITS	1023
2,012		4,074		10,576		TIME DEPOSITS	1024
(24)		473		(340)		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
49	(275)	271	632	(79)	(1,026)	SHORT TERM SECURITIES	1100
(59)	10,564	187	12,140	935	11,766	CREDIT	1200
	2,876		(488)		12,442	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(59)	(30)	187	1,396	935	2,462	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
	7,718		11,232		(3,139)	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
7,670	65,774		101,356		24,679	STOCK AND PARTICIPATION	1300
583	40	2,887	1,960	7,325	(268)	LONG TERM SECURITIES	1400
(472)						GOVERNMENT BONDS	1410
1,055	40	2,887	1,960	7,325	(268)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
	600		2,688		3,899	LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
5,762	8,077	2,830	11,518	4	18	TRADE CREDITS	1800
						INTERBANK CLAIMS	2000
(12,694)	2,469	72,824	11,131	30,586	41,909	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
90,958	90,958	182,020	182,020	145,662	145,662	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

TABEL 13. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 13. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2003		2004		2005	
		P U	S	P U	S	P U	S
0100	Tabungan Bruto		225,011		181,223		432,804
0200	Investasi Nonfinansial	317,520		250,645		538,726	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(92,509)		(69,423)		(105,922)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500			(0)			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(92,509)		(69,422)		(105,922)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	331,978		255,579		146,802	
0700	Jumlah Sumber Finansial		424,487		325,001		252,724
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(13,512)	(6,959)	1,824	(702)	10,188	16,386
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(10,252)		(33,102)		41,914	25,800
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(6,170)		554		30,144	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	(4,097)		(33,671)		11,770	
1021	Uang Kertas dan Logam	501		(26,004)		5,989	
1022	Giro	8,648		6,705		(918)	
1023	Tabungan	(2,013)		83		838	
1024	Deposito Berjangka	(11,233)		(13,456)		5,757	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(999)		103	
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi	15		15			25,800
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	14,177	12,406	3,950	5,829	2,142	11,010
1200	Kredit (Jumlah)	(8,377)	60,895	3,827	111,125	(109)	32,643
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		68,346		32,609		38,845
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(2,446)		6,147		(1,209)	(732)
1230	Kredit dalam Valas	(5,931)	(7,451)	(2,320)	78,516	1,100	(5,470)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	189,006	241,253	162,830	222,581	56,234	113,259
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	10,426	30,044	(17,338)	17,414	(15,258)	46,558
1410	Surat Berharga Pemerintah	6,136		(34,914)		(35,265)	
1420	Surat Berharga Lainnya	4,290	30,044	17,576	17,414	20,007	46,558
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun	6,690		8,082		430	
1800	Kredit Dagang	18,580	6,668	12,789	11,390	12,483	1,392
2000	Rekening Antar Bank					(4,201)	24
9000	Rupa-rupa	125,240	80,180	112,717	(42,636)	42,979	5,652
	JUMLAH	649,498	649,498	506,224	506,224	685,528	685,528

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR BISNIS, 2003-2008 (MILIAR RUPIAH)
FOR PRIVATE ENTERPRISES SECTOR, 2003-2008 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2006		2007 ^{*)}		2008 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	467,893		492,675		591,896	GROSS SAVING	0100
620,324		620,638		885,597		NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(152,431)		(127,963)		(293,701)		NET LENDING/BORROWING	0300
		0				STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(152,431)		(127,963)		(293,701)		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
323,518		903,455		(354,105)		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	475,949		1,031,418		(60,404)	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
						OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
(51,331)	(58,753)	12,732	16,578	(15,280)	13,439	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
53,085	9,193	116,379		78,439	13,166	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
(1,514)		30,914		45,909		FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSIT	1010
54,599		85,464		32,530		RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
10,669		12,925		10,712		CURRENCY AND COIN	1021
20,647		40,174		(871)		DEMAND DEPOSITS	1022
5,643		(91)		735		SAVING DEPOSITS	1023
17,327		31,117		20,916		TIME DEPOSITS	1024
314		1,340		1,038		OTHER RUPIAH DEPOSITS	
	9,193				13,166	POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
(3,110)	(1,205)	2,116	14,410	954	12,505	SHORT TERM SECURITIES	1100
1,441	(94,598)	1,793	279,188	30,034	358,150	CREDIT	1200
	943	148	64,822	(92)	126,265	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
456	256	634	16,848	14,186	(3,307)	OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
985	(95,797)	1,010	197,518	15,941	235,192	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
464,912	519,376	542,966	641,936	(672,431)	(782,512)	STOCK AND PARTICIPATION	1300
11,946	16,275	5,913	5,539	(58,892)	(25,259)	LONG TERM SECURITIES	1400
17,638		15,004		(21,520)		GOVERNMENT BONDS	1410
(5,691)	16,275	(9,091)	5,539	(37,372)	(25,259)	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
400		43,979		2,266		LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
58,352	59,344	82,352	63,083	397,244	380,077	TRADE CREDITS	1800
(2,978)		1,769		(2,001)		INTERBANK CLAIMS	2000
(209,201)	26,316	93,457	10,683	(114,437)	(29,971)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
943,842	943,842	1,524,093	1,524,093	531,492	531,492	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

TABEL 14. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 14. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2003		2004		2005	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(70,366)		(27,383)		(71,942)
0200	Investasi Nonfinansial						
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(70,366)		(27,383)		(71,942)	
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500			(0)			
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(70,366)		(27,383)		(71,942)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(40,489)		103,862		14,409	
0700	Jumlah Sumber Finansial		29,877		131,244		86,351
0800	Cadangan Valas Pemerintah	6,141	24,878		27,891		4,090
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(9,010)	(2,172)	12,864	(19,728)	14,861	8,831
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(7,203)	(9,906)	(2,276)	1,614	3,679	53,941
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(8,049)	(9,946)	2,000	1,610	2,817	53,802
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	846	41	(4,275)	4	862	139
1021	Uang Kertas dan Logam						
1022	Giro	297		(3,538)	(0)	1,676	
1023	Tabungan	720		(921)		102	
1024	Deposito Berjangka	(171)	41	(432)	(42)	(251)	
1025	Simpanan Rupiah lainnya			615	47	(664)	139
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(2,178)	(1,610)	8,978	(41)	8,438	6,330
1200	Kredit (Jumlah)	(874)	445	127,535	(3,581)	(24,494)	1,275
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		733		(832)		299
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	216		26		2,716	
1230	Kredit dalam Valas	(1,090)	(288)	127,510	(2,749)	(27,210)	975
1300	Modal Saham dan Penyertaan	5,224	(39)	36,705	1,695	41,236	179
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	14,906	(115)	14,558	(461)	33,701	1,924
1410	Surat Berharga Pemerintah	4,151		13,965		20,345	
1420	Surat Berharga Lainnya	10,755	(115)	593	(461)	13,355	1,924
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun						
1800	Kredit Dagang			1,714		1,392	
2000	Rekening Antar Bank					6,892	
9000	Rupa-rupa	(47,495)	18,395	(96,219)	123,855	(71,295)	9,781
	JUMLAH	(40,489)	(40,489)	103,862	103,861	14,409	14,409

Keterangan: P = Penggunaan, S = Sumber

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

SEKTOR LUAR NEGERI, 2003-2008 (MILIAR RUPIAH)
FOR REST OF THE WORLD SECTOR, 2003-2008 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR						TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2006		2007 ^{*)}		2008 ^{**)}			
P	S	P	S	P	S		
U	S	U	S	U	S		
	(38,460)		2,782		119,463	GROSS SAVING	0100
						NON FINANCIAL INVESTMENT	0200
(38,460)		2,782		119,463		NET LENDING/BORROWING	0300
						STATISTICAL DISCREPANCY	0400
(38,460)		2,782		119,463		NET FINANCIAL INVESTMENT	0500
44,642		230,651		248,115		TOTAL FINANCIAL USES	0600
	83,101		227,869		128,652	TOTAL FINANCIAL SOURCES	0700
	29,423		157,378		44,180	OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RESERVE	0800
(23,089)	(17,280)	17,315	15,858	7,752	(8,063)	OTHER FOREIGN CLAIMS	0900
(76,257)	(7,943)	6,572	(16,737)	12,383	44,792	CURRENCY AND DEPOSITS	1000
466	(8,034)	2,924	(17,698)	16,475	44,922	FOREIGN EXCHANGE CURRENCY AND DEPOSITS	1010
(76,724)	91	3,648	960	(4,091)	(131)	RUPIAH CURRENCY AND DEPOSITS	1020
						CURRENCY AND COIN	1021
(76,682)	(1)	2,921		(4,462)		DEMAND DEPOSITS	1022
517		(625)		516		SAVING DEPOSITS	1023
(551)		1,117		(57)		TIME DEPOSITS	1024
(7)	92	235	960	(89)	(131)	OTHER RUPIAH DEPOSITS	1030
						POSTAL AND COOPERATION DEPOSITS	1030
2,205	(2,962)	17,320	(3,670)	2	7,361	SHORT TERM SECURITIES	1100
(185,876)	1,531	193,139	1,079	369,071	17,316	CREDIT	1200
	506		(256)		222	BANK LOANS IN RUPIAH	1210
(3,091)		1,594		191		OTHER INSTITUTIONS LOAN IN RUPIAH	1220
(182,786)	1,026	191,544	1,335	368,880	17,094	LOANS IN FOREIGN CURRENCY	1230
79,044	(5,240)	132,278	(142)	(58,283)	41,189	STOCK AND PARTICIPATION	1300
25,991	(2,827)	32,180	(2,755)	69,203	2,727	LONG TERM SECURITIES	1400
11,246		38,666		63,686		GOVERNMENT BONDS	1410
14,745	(2,827)	(6,485)	(2,755)	5,517	2,727	OTHER BONDS AND DEBENTURES	1420
						LIFE INSURANCE AND PENSION RESERVE	1500
2,331	32,183	3,208	12,512	9,169	4,050	TRADE CREDITS	1800
3,297		9,912		(19,534)		INTERBANK CLAIMS	2000
216,997	56,215	(181,273)	64,346	(141,648)	(24,899)	MISCELLANEOUS ACCOUNTS	9000
44,642	44,642	230,651	230,651	248,115	248,115	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

**TABEL 15. NERACA ARUS DANA SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)
TAHUN 2008 (DALAM MILIAR RUPIAH)
TABLE 15. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR
NON BANKS FINANCIAL SECTORS, 2008 (IN BILLION RUPIAHS)**

KODE	KATEGORI TRANSAKSI TRANSACTION CATEGORY	ASURANSI		PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		PEGADAIAN		DANA PENSIIUN		TOTAL		CODE
		INSURANCES		FINANCE COMPANIES		PAWNSHOPS		PENSION FUNDS		TOTAL		
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	
		U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	
0100	Tabungan Bruto		4,531		5,596		499		7,982		18,608	0100
0200	Investasi Nonfinansial	1,873		1,004		63				2,939		0200
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	2,658		4,591		436		7,982		15,668		0300
0400	Selisih Statistik = 0300 - 0500	0				0				0		0400
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	2,658		4,591		436		7,982		15,668		0500
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	12,914		36,843		3,367		7,212		60,336		0600
0700	Jumlah Sumber Finansial		10,256		32,252		2,931		(770)		44,668	0700
0800	Cadangan Valas Pemerintah											0800
0900	Klaim dalam Valas Lainnya		(0)	10	(191)				(0)	10	(191)	0900
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	6,921		1,222		28		(342)		7,829		1000
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(861)		(97)		6		(86)		(1,039)		1010
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	7,782		1,320		22		(256)		8,868		1020
1021	Uang Kertas dan Logam	1,471		(132)						1,339		1021
1022	Giro	(310)		314		(19)		50		35		1022
1023	Tabungan	11		(66)		0		(8)		(63)		1023
1024	Deposito Berjangka	6,612		1,183		41		(298)		7,538		1024
1025	Simpanan Rupiah lainnya	(2)		20		(0)		0		18		1025
1030	Tabungan Giro Pos dan Koperasi											1030
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	27		1	350			40	20	68	370	1100
1200	Kredit (Jumlah)	(8)	977	29,171	28,341	3,221	2,880	2	32,385	32,200	1200	
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		961	29,218	4,637		2,880	1	29,218	8,479	1210	
1220	Kredit Institusi Lain dalam Rp	(8)		(379)		3,221			2,834		1220	
1230	Kredit dalam Valas		16	332	23,704			1	332	23,721	1230	
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(2,245)	182	2	2,936	1			(2,242)	3,118	1300	
1400	Surat Berharga Jk Pjg (Jumlah)	12,321		(47)	(1,463)	(2)	(137)	5,717	(41)	17,989	(1,641)	1400
1410	Surat Berharga Pemerintah	15,199						2,631		17,830		1410
1420	Surat Berharga Lainnya	(2,878)		(47)	(1,463)	(2)	(137)	3,085	(41)	158	(1,641)	1420
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		10,237					532	(868)	532	9,368	1500
1800	Kredit Dagang	1,753	3,933				44			1,753	3,976	1800
2000	Rekening Antar Bank	(220)		(6,694)	26			(169)		(7,084)	26	2000
9000	Rupa-rupa	(5,635)	(5,072)	13,178	2,253	119	143	1,435	118	9,097	(2,558)	9000
	TOTAL	14,787	14,787	37,847	37,847	3,430	3,430	7,212	7,212	63,275	63,275	

Keterangan:
P = Penggunaan, S = Sumber

Note:
U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 1070

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id